

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan perdagangan China dan negara-negara di Asia Tenggara telah terjalin sejak abad ketiga sebelum Masehi, yakni dengan adanya “jalur sutra” yang menghubungkan Asia Tenggara dan garis pantai tenggara China. Perdagangan ini kemudian berlanjut sampai masa modern. Setelah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) berdiri tahun 1967, hubungan antara China dan negara-negara Asia Tenggara berlanjut dan hubungan ini menempati posisi penting dalam hubungan negara-negara di Asia Pasifik. Hubungan China dan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, politik, dan strategi telah bertransformasi karena pertumbuhan ekonomi yang tak terduga, krisis finansial, dan perubahan-perubahan politik yang terjadi.¹

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, perekonomian ASEAN mengalami pertumbuhan yang cukup mengejutkan dalam empat puluh tahun terakhir. Pendapatan perkapita negara anggota ASEAN telah meningkat sebanyak lima kali lipat dalam empat dekade.² Adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di ASEAN tidak membuat perekonomian kawasan ini terlepas dari masalah. Pada akhir tahun 1990an perekonomian kawasan ini dihantam oleh krisis finansial. Krisis finansial ini tidak saja memukul ekonomi ASEAN namun juga negara-negara Asia Timur seperti Jepang, China, dan Korea walaupun dampak yang ditimbulkan dari krisis lebih buruk pada satu negara dibandingkan yang lainnya. Dari pengalaman ini kita dapat melihat bagaimana ASEAN dan China sedikit banyak berbagi nasib yang sama dalam era regionalisme dan globalisasi.

Dilihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan China dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir memang terlihat lebih menjanjikan dibandingkan ASEAN. Reformasi ekonomi China dimulai pada tahun 1978 yang dicetuskan oleh mantan pemimpin Partai Komunis China kala itu, Deng Xiaoping.

¹ Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku, Ed., *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*. (Institute of Southeast Asian Studies: 2005), hlm. x.

² *Ibid.*

China telah bertransformasi dari sebuah negara dengan sistem perekonomian tertutup menjadi sebuah negara dengan sistem ekonomi terbuka yang berorientasi pada pasar dengan pertumbuhan sektor swasta yang cepat dan telah menjadi pemain utama dalam perekonomian global. Reformasi yang dimulai sekitar tiga puluh tahun ini bermula dari sistem ekonomi berbasis pertanian menjadi sistem liberalisasi harga, desentralisasi fiskal, meningkat dan bertumbuhnya badan usaha milik negara, sistem perbankan yang mengacu pada sistem ekonomi liberal, dan pemaparan diri China terhadap perdagangan dan investasi asing. Menurut data terakhir, penanaman modal asing (FDI—*Foreign Direct Investment*) China hampir mencapai US\$108 milyar pada tahun 2008.³

Prestasi yang berhasil dicatat oleh China mencakup kenaikan nilai PDB, meningkatnya daya beli per kapita masyarakat, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan, naiknya nilai investasi, pertumbuhan industri migas dan non-migas, naiknya nilai ekspor-impor, dan melesatnya nilai tukar Yuan Renminbi (RMB) terutama terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Data terakhir menunjukkan bahwa China telah menjadi ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. PDB China pada tahun 2009 berjumlah sebesar US\$ 4,985 trilyun. Hal ini didukung dengan volume ekspor China yang pada tahun 2009 mencapai US\$ 1,204 trilyun dan ini menjadikan China sebagai negara pengekspor terbesar kedua di dunia setelah Uni Eropa.⁴ Ekspor China telah menguasai pasar dunia mengingat pabrik-pabrik yang berlokasi di China membuat 70% produk mainan dunia, 60% sepeda, setengah produk alas kaki, dan sepertiga produksi tas di dunia.⁵ China berhasil menguasai pasar dunia dengan jumlah mitra dagang yang mencapai 227 negara dan kawasan yang tersebar di seluruh dunia dari hanya sekitar beberapa lusin mitra saja pada tahun

³ Sumber: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html> diakses 3/12/10, diakses tanggal 7/10/10.

⁴ *Ibid.*

⁵ Oded Shenkar, *The Chinese Century: The Rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, the Balance of Power, and Your Job*. (Pearson Education, Inc: 2005), hlm. 2.

1978.⁶ Saat ini hampir tidak mungkin kita tidak menemukan produk-produk buatan China di pasar ASEAN maupun di luar Asia.

Reformasi ekonomi China dimulai dengan gagasan dibukanya sistem ekonomi pasar dalam sistem politik dan pemerintahan sosialis. China menolak mengadaptasi sistem kapitalisme *a la* barat yang menurut China tidak cocok bagi negara dan rakyatnya. Data-data statistik dalam kurun waktu 30 tahun telah menunjukkan bagaimana China telah berhasil mencapai tujuan awalnya, yakni membangkitkan perekonomian China setelah kegagalan sistem ekonomi komunis di bawah pimpinan Mao Ze Dong. Menyerap modal asing adalah langkah awal terbukanya China terhadap dunia luar. Salah satu diplomasi komersial China adalah masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO—*World Trade Organization*).

Pada awal masuknya China ke WTO, China telah menyetujui lebih dari 340.000 proyek investasi asing.⁷ Saat ini ada sekitar 400 perusahaan multinasional terkemuka di dunia telah menanamkan modal di China. Masuknya China ke WTO bahkan mendorong lebih banyak lagi perusahaan multinasional raksasa untuk berinvestasi.⁸

Shi Guangsheng, mantan Menteri Perdagangan Asing dan Kerjasama Ekonomi Republik Rakyat China, melihat bahwa masuknya China ke WTO akan sangat mendorong pembangunan perdagangan asing China ke dalam era baru yang mempercepat kerjasama perdagangan China dengan dunia dan hal ini akan menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi perekonomian dunia untuk kesejahteraan yang lebih stabil di abad yang baru.⁹ Hal ini berarti bergabungnya China dengan WTO menandakan momen penting dalam perdagangan internasional, hukum dan hubungan internasional dalam milenium baru. Secara umum banyak pihak berpendapat bahwa efek domestik dari masuknya China ke WTO akan positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang China. Pendapat ini kemudian terbukti

⁶ Shi Guangsheng, *WTO Opens An Era of New Opportunities*. Dalam: L.J. Brahm. *China after WTO*. (Intercontinental Press: 2002), hlm. i.

⁷ *Ibid*, hlm. ii.

⁸ *Ibid*, hlm. ii.

⁹ *Ibid*, hlm. ii.

dengan meningkatnya ekspor China ke seluruh dunia mulai dari sebelum China masuk WTO hingga tahun 2009.

Dari tabel 1.1 di bawah ini kita dapat melihat bagaimana nilai perdagangan China sebelum China menjadi anggota WTO terus menanjak hingga akhir tahun 2009. Pada tahun 2000 ekspor China bernilai US\$ 249,2 milyar dan pada tahun 2002, setahun setelah China masuk WTO, ekspor China naik menjadi US\$ 325,6 milyar dan dalam jangka waktu waktu delapan tahun setelah keanggotaan WTO ekspor impor China naik berkali-kali lipat dari US\$ 620,8 milyar pada tahun 2002 menjadi US\$ 2,207.2 milyar pada tahun 2009.

Tabel 1.1 Perdagangan China dengan Dunia (2002-2009)

Tabel 1: Perdagangan China dengan dunia (US\$ milyar)										
Catatan: Ekspor RRC terlapor berdasarkan <i>free-on-board basis</i> ; impor berdasarkan biaya, asuransi, dan biaya pengangkutan.										
Sumber: Biro Statistik Nasional RRC dan Administrasi Umum Bea Cukai RRC, Statistik Bea Cukai China.										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ekspor	249.2	266.1	325.6	438.2	593.3	762.0	969.0	1,220.5	1,430.7	1,201.7
% <i>perubahan</i>	27.8	6.8	22.4	34.6	35.4	28.4	27.2	26.0	17.3	-16.0
Impor	225.1	243.6	295.2	412.8	561.2	660.0	791.5	956.1	1,132.6	1,005.6
% <i>perubahan</i>	35.8	8.2	21.2	39.8	36.0	17.6	19.9	20.8	18.5	-11.2
Total	474.3	509.7	620.8	851.0	1,154.6	1,421.9	1,760.4	2,176.6	2,563.3	2,207.2
% <i>perubahan</i>	31.5	7.5	21.8	37.1	35.7	23.2	23.8	23.6	17.8	-13.9
Neraca	24.1	22.5	30.4	25.5	32.1	102.0	177.5	264.3	298.1	196.1

Sumber: Data *The US China Business Council* 2010, <http://www.uschina.org/statistics/tradetable.html>, diakses tanggal 12/12/2010.

Kemajuan ekonomi China sejak bergabung dengan WTO semakin memotivasi China untuk mengembangkan kerja sama perdagangannya terutama dengan ASEAN. Maksud dari penggunaan kata ASEAN di sini adalah kesepuluh negara di Asia Tenggara yang merupakan anggota ASEAN; Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kerjasama perdagangan yang dimaksud adalah kerjasama China dengan kesepuluh anggota ASEAN tersebut.

Semangat untuk melaksanakan regionalisme dimaksudkan sebagai pelatihan untuk mempersiapkan negara dalam menerapkan perdagangan bebas global yang menjadi agenda WTO.¹⁰ Regionalisme dapat digunakan China dan mitra dagangnya sebagai anak tangga untuk menerapkan sistem perdagangan di lingkup yang lebih luas. Salah satu dari lima besar mitra dagang China adalah ASEAN. Chen Wen menjelaskan sejak bergabung dengan WTO, impor dari negara-negara ASEAN ke China naik hingga 11.36% pada tahun 2005.¹¹ Dijelaskan juga bahwa ASEAN adalah mitra perdagangan kelima terbesar China pada tahun 2005, sedangkan “China menjadi mitra dagang keempat terbesar ASEAN pada tahun 2007”¹² dan meningkat menjadi menjadi mitra dagang ketiga terbesar ASEAN pada tahun 2010.¹³

Sejak masuknya China ke WTO, terlihat adanya penguatan kerjasama dengan ASEAN. Ini terlihat dengan naiknya total volume ekspor dan impor ASEAN terhadap China. Dalam jangka waktu tujuh tahun total perdagangan ASEAN dengan China naik lebih dari empat kali lipat. Tabel di bawah menunjukkan total *merchandise trade* antara ASEAN dan China. Yang masuk ke dalam *merchandise trade* adalah perdagangan yang hanya mencakup barang dan tidak termasuk di dalamnya sektor jasa, transfer modal, dan investasi asing.

Tabel 1.2 Total Perdagangan ASEAN dengan China (2002-2009)

(Nilai dalam juta dolar)

Mitra Dagang	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
China	42,759.8	59,637	89,066	113,393	139,961.2	171,117.7	196,883	178,185

Sumber: *ASEAN Statistical Yearbook 2010* (ASEAN Secretariat: 2011), hlm. 69.

Membanjirnya produk-produk China di ASEAN menjadi tanda kuatnya diplomasi komersial China di ASEAN. Diplomasi komersial China di ASEAN yang

¹⁰ Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra, *Garuda Terbelit Naga*. (Institute for Global Justice: 2006), hlm. 15.

¹¹ Chen Wen, ASEAN-China Trade Relations: Origins, Progress and Prospect. *Dalam*: S. Swee-Hock. *ASEAN-China Economic Relations* (Institute of Southeast Asian Studies: 2007), hlm. 72.

¹² *Ibid.*

¹³ Situs resmi ASEAN, <http://www.aseansec.org/23752.htm>, diakses tanggal 7/12/2010.

dibahas dalam penelitian ini adalah diplomasi perdagangan yang berada dalam skema *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), yang merupakan kerja sama FTA terbesar di dunia, dan kerja sama bilateral China dengan setiap negara anggota ASEAN baik dalam bentuk *Bilateral Free Trade Agreement* (BFTA) maupun *Preferential Trade Arrangements* (PTA). Kerjasama ini dibatasi pada perdagangan barang dan kerjasama dalam bidang investasi.

ACFTA adalah salah satu strategi ekonomi China guna membawa dirinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.¹⁴ Kerja sama perdagangan bebas ini didorong oleh logika politik untuk merespon regionalisme di dunia yang semakin kompetitif, keinginan China untuk menumbuhkan kerja sama ekonomi dengan ASEAN, dan oleh keinginan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan stabil demi meningkatnya pengaruh China di Asia Timur.¹⁵ Walaupun volume perdagangan China dengan ASEAN tidak sebesar China-AS atau ASEAN-Jepang, kita dapat melihat bahwa perdagangan keduanya bertumbuh dengan pesat. Begitu pesat hingga perdagangan antara keduanya tumbuh sebesar 26% antara tahun 2003 dan 2008.¹⁶

Pada awal tahun 2010 China menanamkan investasi infrastruktur sebesar US\$ 10 milyar untuk membangun jalan, jalur kereta api, penerbangan, teknologi telekomunikasi yang menghubungkan China dan negara-negara ASEAN. Investasi ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

Selain dengan ASEAN secara keseluruhan China juga melakukan hubungan kerja sama bilateral lainnya dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Salah satu contohnya adalah kerja sama bilateral China dengan Singapura. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Singapura adalah mitra dagang terbesar China di kawasan tersebut dan merupakan negara yang paling diuntungkan dengan adanya ACFTA. Pada tahun 2004 ekspor Singapura ke China meningkat sebesar

¹⁴ Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. Viii.

¹⁵ Vincent Wei-cheng Wang, *The Logic of China-ASEAN FTA: Economic Statecraft of "peaceful Ascendancy"*. Dalam: H.K. Leong & S.C.Y. Ku. *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges* (Institute of Southeast Asian Studies: 2005), hlm. 18.

¹⁶ Sumber: <http://www.aseansec.org/24161.htm>, diakses 14/12/2010.

51.5% dan volume perdagangan keduanya mencapai US\$ 31,5 milyar yang berarti naik sekitar 48.6% dan ini merupakan 9.2% dari total perdagangan Singapura.¹⁷

Selain dengan Singapura, China juga melakukan hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia. “Pada tahun 2008 volume perdagangan kedua negara mencapai US\$ 31,5 milyar. China mengekspor barang senilai US\$ 17,19 milyar ke Indonesia dan mengimpor US\$ 14,33 milyar dari Indonesia. Beberapa kontrak ditandatangani dalam proyek konstruksi, jasa buruh kontrak, desain dan konsultasi proyek yang nilainya mencapai US\$ 3,35 milyar. Pada tahun 2008 investasi langsung non-finansial China di Indonesia mencapai US\$ 180 dan FDI Indonesia di China mencapai US\$ 140.”¹⁸

Sejak masuknya China ke WTO, kerja sama China dan Thailand juga meningkat. Terbukti dengan naiknya angka ekspor produk Thailand ke China sebesar 8.3% dari total ekspor Thailand pada tahun 2005. Pada tahun 2007, kabinet Thailand menyetujui pembangunan jembatan yang setelah selesai (yakni pada tahun 2011) akan melintasi sungai Mekong. Pembangunan jembatan ini adalah inisiatif China dan Thailand untuk memudahkan arus barang dan jasa dalam perdagangan kedua negara.¹⁹

China juga menanamkan modalnya di Kamboja. China berinvestasi di bidang infrastruktur Kamboja yang memang masih membutuhkan banyak pembangunan. Tahun 2005 China berinvestasi pada proyek pembangkit listrik tenaga air dan pada tahun yang sama China menghibahkan 8 juta dolar untuk pembangunan rel kereta api sepanjang 255 km.²⁰ Selain itu China juga menanamkan modal sebesar 600 juta dolar

¹⁷ Liu Yunhua, ASEAN AND CHINA: Managing Competition and Exploring Complementarities. *Dalam: H.E.S. Nesadurai and J.S. Djiwandono. Southeast Asia in the Global Economy: Securing Competitiveness and Social Protection* (Institute of Southeast Asian Studies and S. Rajaratnam School of International Studies: 2009), hlm. 71.

¹⁸ Sumber:

<http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>, diakses tanggal 14/1/2011.

¹⁹ Zamroni, “Thailand Agricultural Sector and Free Trade Agreements”. *Asia-Pacific Trade and Investment Review* 2 (2): 51—70 diakses dari www.unescap.org/tid/publication/aptir2436_zamroni.pdf, tanggal 12/1/11.

²⁰ Chang Chiou Yi, ASEAN-China Economic Relations: Moving Towards Services. *Dalam: S. Swee-Hock. ASEAN-China Economic Relations*. (Institute of Southeast Asian Studies: 2007), hlm. 159.

untuk pembangunan bendungan dan jembatan.²¹ Penanaman modal, pemberian hibah serta pinjaman ini dimaksudkan China untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang transportasi, budaya, pendidikan, kesehatan, industri pariwisata yang diharapkan China dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama ekonominya dengan Kamboja. Selain di Kamboja, China juga berinvestasi besar di Vietnam dalam bidang infrastruktur, perbankan, pariwisata, dan pendidikan. China menerima devisa dari 6000 pelajar Vietnam yang datang ke China untuk belajar. Secara tidak langsung hal ini kemudian mendongkrak kerja sama perdagangan di antara dua negara.²²

Faktor penting yang mendorong naiknya volume perdagangan China-ASEAN selain dari masuknya China ke WTO adalah tidak lepasnya peran pemerintah China yang besar dan didukung oleh pihak swasta. Dua pertiga bisnis di China dimiliki oleh pemerintah, sepertiga dimiliki oleh swasta, dan kunci industri dipegang oleh pemerintah.²³

1.2 Permasalahan

Sejak China menjadi anggota WTO, terlihat adanya peningkatan dalam hubungan ekonominya dengan ASEAN. Buktinya adalah ASEAN tercatat sebagai sumber impor ketiga terbesar China pada tahun 2005 dan China menjadi mitra dagang terbesar ketiga ASEAN pada tahun 2010. Selain itu perdagangan China dengan sepuluh negara ASEAN melesat cepat, terutama setelah masuknya China ke WTO. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah **mengapa China berhasil meningkatkan hubungannya dengan ASEAN terutama pasca masuknya China ke WTO? Bagaimanakah kebijakan perdagangan asing China terhadap perusahaan negara dan swasta mempengaruhi hubungannya dengan kesepuluh negara anggota ASEAN?**

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 162.

²³ Scott Kronick, *Branding for China*. Dalam: L.J. Brahm. *China after WTO* (China Intercontinental Press: 2002), hlm. 40.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan di balik terjadinya peningkatan hubungan ekonomi dan kerja sama perdagangan antara China dan ASEAN pasca masuknya China ke WTO. Kedua, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perdagangan asing pemerintah China terhadap perusahaan negara dan swastanya mempengaruhi hubungan ekonominya dengan ASEAN.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerhati masalah internasional khususnya kajian ekonomi politik dalam memahami alasan dibalik peningkatan hubungan ekonomi China dan ASEAN pasca masuknya China ke WTO. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya diplomasi komersial bagi sebuah negara. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pembelajaran tentang strategi perdagangan China di Asia Tenggara serta bagi negara berkembang anggota ASEAN tentang bagaimana China berhasil membangun perekonomiannya melalui diplomasi komersialnya. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tentang literatur hubungan perdagangan China dan Asia Tenggara.

1.4 Kajian Literatur

Gagasan untuk meneliti tentang peningkatan hubungan ekonomi China dan Asia Tenggara didapatkan oleh penulis setelah penulis membaca tulisan Ellen L. Frost (2007) yang berjudul “Promise or Threat: China’s Commercial Diplomacy in Asia”.²⁴ Frost yang menulis buku *Asia’s New Regionalism* ini berpendapat bahwa China telah memanfaatkan integrasi regional di Asia dan menjadi praktisi diplomasi komersial yang handal. Menurutnya, diplomasi komersial adalah perangkat andalan China dan tidak ada negara lain yang mengembangkan peran diplomasi komersialnya dalam perdagangan internasional seperti yang dilakukan oleh China. Melalui diplomasi komersial inilah kemudian China berhasil menumbuhkan

²⁴ Sumber: <http://www.gspia.pitt.edu/LinkClick.aspx?fileticket=Sx9Cut3RQpI%3D&tabid=235>, diakses tanggal 20/11/2010.

perekonomiannya. Dijelaskan pula bahwa diplomasi komersial China di Asia dimulai dengan gagasan China untuk melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan ASEAN. Diplomasi komersial China ini dilakukan bukan hanya semata demi kepentingan ekonomi namun juga sebagai upaya China untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian regional dan mengimbangi dominasi Amerika Serikat. Dengan kata lain, diplomasi komersial membuka kesempatan bagi China untuk meningkatkan pengaruh politik dan keamanan di kawasan tetangganya yang paling penting.

Tulisan ini sendiri tentu belum cukup untuk menganalisis diplomasi komersial China di Asia Tenggara. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai konsep dasar diplomasi komersial penulis membaca buku S. L. Roy. Dalam bukunya Roy mengungkapkan sejarah, definisi, fungsi, dan bagaimana diplomasi komersial atau diplomasi ekonomi digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Ia juga mengungkapkan bahwa “posisi penting yang telah diperoleh diplomasi komersial pada waktu ini bisa diukur dari beberapa hal, dihubungkan dengan misi diplomatik dan kegiatan komersial yang sedang diciptakan. Atase perdagangan dan komisioner perdagangan saat ini dianggap sebagai tambahan yang berguna bagi misi diplomatik.”²⁵

Buku-buku lain seperti *The Changing Politics of Foreign Policy* yang ditulis oleh Christopher Hill, *Modern Diplomacy* oleh R.P. Barston dan modul yang didapatkan penulis dari modul resmi yang dikeluarkan oleh *The Institute for Trade and Commercial Diplomacy* (ITCD) juga digunakan sebagai sumber teori diplomasi dan diplomasi komersial. Institut ITCD yang terletak di Virginia ini adalah pemimpin dalam pelatihan diplomasi komersial. Modul ini membahas definisi dari diplomasi komersial, peran pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat, serta peran diplomat komersial.

Untuk memahami hubungan perdagangan dan kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN, buku *ASEAN-China Economic Relations* yang ditulis oleh Saw Swee-Hock dan diterbitkan oleh ISEAS Publishing Singapura pada tahun 2007

²⁵ S. L. Roy, *Diplomasi*. (Rajawali Pers: 1991), hlm. 125.

digunakan sebagai salah satu referensi. Buku ini secara umum membahas kemajuan ekonomi China selama 30 tahun terakhir dan dinamika hubungan ekonominya dengan Asia Tenggara, yakni negara anggota ASEAN dari sudut pandang ASEAN. Data-data disajikan dengan sistematis terutama pasca keanggotaan China di WTO dengan cara menampilkan data statistik, gambar, tabel, dan grafik volume perdagangan China dengan ASEAN dari sumber yang dapat dipercaya seperti data departemen perdagangan China, data sekretariat ASEAN, data WTO, dan lainnya. Tercatat bahwa ASEAN adalah mitra dagang kelima terbesar China, dan China sebaliknya adalah mitra dagang keempat terbesar ASEAN. Buku ini secara umum dan cukup terperinci menjelaskan dinamika perdagangan antara kedua negara. Dipaparkan pula data hubungan bilateral China dengan negara-negara anggota ASEAN.

Baik ASEAN maupun China melihat satu sama lain sebagai mitra ekonomi yang penting. Hubungan kerja sama ekonomi tidak hanya meliputi perdagangan bilateral dan multilateral melainkan juga kerja sama dalam bidang investasi dan keuangan. Dalam buku *ASEAN-China Economic Relations* ini dijelaskan pula bagaimana setiap negara anggota ASEAN berkompetisi dalam menjalin kerja sama dengan China dan penulis menyebutkan Singapura sebagai salah satu negara yang paling siap dan agresif dalam melakukan kerja sama dengan China. Kita juga dapat membaca dinamika perdagangan kedua kawasan di bawah perjanjian perdagangan bebas ACFTA dimana China tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan melainkan juga bagaimana investor ASEAN berusaha memaksimalkan dan memberdayakan pasar China yang besar bagi produk-produk ASEAN terutama produk yang masuk dalam kategori sensitif yakni produk-produk pertanian dan terkait.

Yang menarik dari buku ini adalah pemaparan realitas hubungan ekonomi ASEAN-China yang tidak selalu terfokus pada keduanya. Buku ini juga menyinggung bagaimana seharusnya hubungan kerja sama dapat lebih ditingkatkan mengingat ASEAN yang secara strategis cukup dekat dengan China namun bukanlah mitra dagang terbesar nomor satu, dua, atau bahkan tiga China (setidaknya sampai buku ini ditulis pada tahun 2007). Penulis membandingkan hubungan dagang dan

keuangan China-Amerika Serikat dengan China-ASEAN. Amerika Serikat adalah partner dagang terbesar pertama China yang disusul oleh Jepang dan Uni Eropa. Jika mempertimbangkan besarnya kebutuhan China atas kebutuhan pertanian, bahan mentah, energi serta mineral, maka seharusnya ASEAN dapat memainkan peran yang lebih besar dalam hubungan ekonomi keduanya.

Buku lain yang juga dijadikan acuan adalah *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges* yang ditulis oleh Ho Khai Leong dan Samuel C.Y. Ku dan diterbitkan oleh ISEAS dan *Center for Southeast Asian Studies* di Singapura dan Thailand pada tahun 2005. Buku membahas pentingnya hubungan ASEAN dan china di Asia-Pasifik dan bagaimana hubungan ekonomi keduanya telah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dibahas pula mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil kedua negara terkait dengan kerja sama perdagangan bebas dan kerjasama bilateral antara China dengan masing-masing negara anggota ASEAN.

Untuk memahami politik perdagangan China di Asia Tenggara, penulis membaca buku John Wong yang berjudul *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*. Buku ini membahas sejarah hubungan dagang China dan Asia Tenggara sejak beberapa tahun sebelum masehi dan bagaimana China melakukan politik perdagangannya di negara-negara Asia Tenggara hingga ASEAN didirikan.

1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep yang umum digunakan dalam studi ekonomi politik internasional. Konsep-konsep yang digunakan adalah sosialisme pasar China, diplomasi dan diplomasi komersial.

1.5.1 Sosialisme Pasar

Balaam dan Veseth mendefinisikan sosialisme pasar dalam studi ekonomi politik internasional sebagai konsep alternatif yang digunakan untuk menjelaskan reformasi ekonomi China yang dimulai oleh Deng Xiaoping.²⁶ Sebutan lain untuk

²⁶ David N. Balaam and Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*. (Prentice-Hall, Inc: 1996), hlm. 302.

konsep ini adalah “sosialisme dengan karakteristik China” atau “ekonomi pasar sosialis”.²⁷ Konsep ini pada dasarnya mewakili transisi ekonomi China yang berangkat dari ekonomi terencana dan beralih ke ekonomi pasar.

Istilah sosialisme pasar mewakili keinginan China untuk mereformasi ekonominya tanpa melakukan perubahan politik. Keinginan ini terwujud dalam program Deng Xiaoping yang bernama “burung di dalam sangkar”. Burung adalah metafora dari pasar yang tumbuh dan berkembang bebas sedangkan sangkar adalah representasi dari kontrol pusat pemerintah China. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan semangat wirausaha individu yang didasarkan pada budaya China dan pada waktu yang bersamaan membuka diri China kepada lingkungan ekonomi global.²⁸ Ini adalah kenyataan yang terjadi di China sekarang. Sistem perekonomian yang berbasis pasar tumbuh dengan pesat di bawah kontrol ketat negara dan menghasilkan reformasi ekonomi yang sukses selama lebih dari 30 tahun terakhir.

Bertell Ollman berpendapat bahwa sistem sosialisme pasar adalah sistem ekonomi yang superior dan satu-satunya bentuk sosialisme yang layak dan diinginkan.²⁹ Sistem ini pada dasarnya membatasi kepemilikan swasta dan gerak pasar. Dengan kata lain, peran swasta diizinkan namun masih dalam pengawasan negara. John Roemer, seperti yang dikutip Ollman, menekankan lima perbedaan fundamental antara kapitalisme dengan sistem sosialis pasar:

“Yang pertama, dalam sistem ini, seluruh saham dari perusahaan-perusahaan di negara penganutnya didistribusikan sehingga setiap warga negara mendapatkan bagian perkapita. Kedua, seluruh bank dinasionalisasikan dan bank-bank ini berfungsi sebagai pemberi pinjaman pada pelaku bisnis seperti layaknya bank kapitalis umumnya. Ketiga, manajemen sebuah perusahaan ditentukan oleh dewan direktur perusahaan tersebut yang terdiri dari perwakilan bank komersial utama yang merupakan pemberi modal, perwakilan dari pekerja firma, dan perwakilan dari para pemegang saham. Keempat, pemerintah yang melakukan perencanaan investasi yang penting. Kelima, firma kapitalis diizinkan tetapi firma itu akan dinasionalisasi ketika telah mencapai ukuran tertentu.”

²⁷ John dan Doris Naisbitt, *China's Megatrends: 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China*. (PT Gramedia: 2010), hlm. xix.

²⁸ Balaam and Veseth, *Op. Cit.*, hlm. 302.

²⁹ David Schweickart, *et. al.*, *Market Socialism: The Debate among Socialists*. (Routledge: 1998), hlm. 10.

Langkah yang diambil China untuk berangkat ke ekonomi yang berorientasi pasar adalah dengan menerapkan desentralisasi yang berarti memberikan kekuasaan lebih besar ke tangan rakyat. Selain itu, sosialisme pasar membuka zona-zona ekonomi khusus yang disebut Naisbitt sebagai “laboratorium eksperimen raksasa bagi perubahan institusi dan yuridiksi”³⁰. Zona-zona ekonomi khusus ini digunakan sebagai daerah percobaan hukum dan regulasi baru yang melewati proses yang disebut Deng Xiaoping “menyeberangi sungai dan merasakan bebatuan”.³¹ Maksud dari proses ini adalah pada dasarnya China harus menetapkan tujuan dengan jelas agar dapat menyeberangi arus pasar yang kuat dan sampai ke tujuan dengan selamat dengan menggunakan strategi yang tepat. Norma hukum, perasuransian, kelembagaan, model investasi, dan regulasi perdagangan harus diuji oleh negara dan dibuktikan efektivitasnya sebelum diterapkan di seluruh negeri.³²

Paradigma sosialisme pasar China yang fokus pada program zona ekonomi khusus memberikan kesempatan bagi tumbuhnya bisnis dan investasi di bawah pengawasan negara. Seperti yang dijelaskan Naisbitt, “negara mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai pengembangan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan devisa, memperluas kewenangan pemerintah dan perusahaan daerah dalam perdagangan luar negeri, serta mendorong pembentukan zona khusus berorientasi ekspor yang lebih banyak.”³³

Inti dari sistem ekonomi pasar sosialis China menjadi jelas dengan diumumkannya “*Decision on Issues Concerning the Establishment of A Socialist Market Economy Structure*” pada bulan November 1993 pada “Pleno Ke-3 Kongres Partai Komunis China ke-14.”³⁴ Isi dari keputusan pemerintah China ini pada dasarnya menyatakan bahwa pendirian struktur ekonomi pasar sosialis ditujukan untuk membuat pasar memainkan peran dasar mengalokasikan sumber daya di bawah kontrol makroekonomi negara. Untuk mewujudkan tujuan ini, negara perlu mempertahankan

³⁰ Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm. xx.

³¹ Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm. 87.

³² Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm. 87.

³³ Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm. 89.

³⁴ Becky Chiu and Mervyn K. Lewis, *Reforming China's State-Owned Enterprises and Banks*. (Edward Elgar Publishing Limited: 2006), hlm. 43.

sektor-sektor milik publik, sementara mendorong pembangunan semua sektor ekonomi, untuk mentransformasi mekanisme manajemen perusahaan milik negara (SOE— *state-owned enterprises*) dan mendirikan sistem perusahaan yang modern agar sesuai dengan persyaratan ekonomi pasar dimana hak kepemilikan properti dan tanggung jawab perusahaan didefinisikan dengan jelas, administrasi pemerintah dan manajemen perusahaan dipisahkan dan sistem hukum untuk mendorong seluruh reformasi didirikan.³⁵

1.5.2 Teori Diplomasi

a. Diplomasi

Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mendefinisikan diplomasi sebagai “*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states*”. Sementara itu, Harold Nicholson mengatakan bahwa diplomasi paling tidak menunjukkan lima hal: politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, cabang dinas luar negeri, dan kualitas abstrak pemberian yang berarti mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti yang buruk mencakup taktik yang lebih licik.³⁶

R.P. Barston memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ia mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen relasi antar negara dan antara negara dengan aktor-aktor lainnya.³⁷ Banyaknya definisi mengenai konsep diplomasi membuat diplomasi tidak selalu dapat didefinisikan dengan jelas dan pasti. Namun ini tidak berarti kita tidak dapat menyimpulkan secara garis besar tentang apa itu diplomasi. S. L. Roy mengatakan bahwa “diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁷ R. P. Barston, *Modern Diplomacy*. (Pearson Education Limited: 1997), hlm. 1.

mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.”³⁸

Tujuan dari diplomasi pada umumnya adalah untuk memenuhi kepentingan sebuah negara. Diplomasi itu sendiri adalah alat yang digunakan negara agar negara tersebut mendapatkan hasil yang menguntungkan. Hasil yang menguntungkan disini maksudnya adalah terjaminnya tujuan dan kepentingan negara. Bagi negara manapun tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan teritorialnya.³⁹ Namun diplomasi tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan politik sebuah negara melainkan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Negara dengan sistem perekonomian terbuka harus selalu mencari cara untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka dan mengawasi perkembangan negara-negara lain agar mereka dapat selalu berkompetisi. Dengan lahirnya *laissez faire* dan sistem perdagangan bebas serta dampak atas penekanan ekonomi nasional, negara-negara maju maupun terbelakang telah menjumpai kenyataan bahwa perdagangan dan keuangan bisa digunakan sebagai alat utama kebijaksanaan nasional. Akibatnya, pencapaian perolehan-perolehan ekonomi telah menjadi tujuan penting dari diplomasi.⁴⁰

b. Diplomasi Ekonomi dan Diplomasi Komersial

Terdapat berbagai pandangan mengenai konsep diplomasi ekonomi dan diplomasi komersial. Ada yang cenderung membedakan diplomasi ekonomi dan komersial, namun ada pula yang menganggap bahwa diplomasi komersial adalah nama lain bagi diplomasi ekonomi. Secara sederhana, diplomasi komersial dapat didefinisikan sebagai sebuah diplomasi yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah asing dan keputusan-keputusan peraturan yang mempengaruhi perdagangan dan investasi global. Perkembangan dunia yang semakin terintegrasi satu sama lain menyebabkan negosiasi perdagangan mencakup area regulasi dan kebijakan pemerintah yang luas. Termasuk di dalamnya adalah standarisasi pada bidang kesehatan, keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen; regulasi-

³⁸ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³⁹ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁰ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 10.

regulasinya mencakupi bidang jasa seperti perbankan, telekomunikasi, dan akuntansi; kebijakan menyangkut kompetisi dan hukum mengenai hukum yang terkait dengan suap dan korupsi, program pendukung pertanian; dan subsidi bagi industri. Diplomasi komersial sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan berkelanjutan perdagangan internasional, penanaman modal langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), dan solusi bagi konflik internasional yang sifatnya non-pasar.⁴¹

Para ahli memiliki beberapa pandangan dasar yang sama mengenai diplomasi ekonomi dan atau komersial. Roy dalam bukunya *Diplomasi* menyebutkan bahwa “pada dasarnya ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari diplomasi modern jaman sekarang, dengan kata lain ekonomi tidak lagi dilihat sebagai elemen yang terpisah dari diplomasi. Yang kedua adalah, berakhirnya Perang Dingin menjadi momen dimana perdagangan dan elemen ekonomi dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain dan membantu sebuah negara mencapai kepentingan nasionalnya. Yang ketiga, dalam diplomasi ekonomi, negara bukan aktor tunggal melainkan diperlukan juga peran-peran aktor lain seperti pihak swasta, organisasi internasional serta masyarakat untuk menjalankan kebijakan ekonomi sebuah negara.”⁴²

Sejarah telah menunjukkan bagaimana instrumen ekonomi telah terbukti dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Pencapaian dalam bidang ekonomi telah menjadi salah satu tujuan utama negara mengingat bahwa kekuatan sebuah negara umumnya diukur dari kekuatan ekonominya. Pentingnya kekuatan ekonomi telah membuat setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara-cara yang damai seperti diplomasi. Dari beberapa instrumen ekonomi, perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Bersamaan dengan perdagangan dan perniagaan, pemberian sanksi bantuan ekonomi juga telah menjadi alat diplomasi penting masa kini. Kita dapat menyebutnya dengan

⁴¹ *Commercial Diplomacy Website*,
http://www.commercialdiplomacy.org/site_userguide/faq2.htm#What is Commercial Diplomacy,
 diakses tanggal 1/10/2010.

⁴² Roy, *Op. Cit.*, hlm. 128.

diplomasi komersial atau diplomasi melalui ekonomi, yaitu diplomasi yang dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi.⁴³

Instrumen ekonomi sangat luas diterapkan dalam waktu perang dan damai; perdagangan internasional dan bantuan internasional digunakan sebagai alat diplomasi yang memudahkan pada masa damai. Selama perang dan Perang Dingin, berbagai tindakan ekonomi terbukti paling efektif digunakan sebagai alat untuk memaksa lawan. Meningkatnya peranan penting perdagangan internasional mempunyai dampak yang tak terelakan pada diplomasi dan praktek-praktek diplomasi.⁴⁴

Christopher Hill dalam bukunya *The Changing Politics of Foreign Policy* juga menegaskan pentingnya peran perdagangan dan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi menurutnya berawal dari kebutuhan untuk mempromosikan kesejahteraan nasional dan menjalankan kebijakan ekonomi luar negeri. Diplomasi ekonomi umumnya bersifat lebih rutin dari *Marshall Aid* atau bantuan IMF. Diplomasi ini biasanya terdiri dari bantuan untuk mendorong ekspor perusahaan-perusahaan negara dan menarik investasi ke dalam yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jepang adalah contoh negara setelah masa perang yang berhasil mempromosikan ekspornya dan Jerman juga berhasil memenej kapitalisme di dalam dan luar negeri bagi keuntungan warga negaranya. Dalam usaha untuk mendapatkan kontrak dengan negara lain, sektor swasta seringkali membutuhkan bantuan negara. Kebijakan negara dapat digunakan untuk memengaruhi pihak swasta asing dan atau kebijakan negara lain. Disinilah saatnya diplomasi ekonomi berjalan, yakni dimana bisnis tidak dapat berjalan tanpa melibatkan diri dengan politik dan diplomasi.⁴⁵

Perdagangan adalah fitur utama diplomasi dan bukannya bagian yang terpisah lagi dari diplomasi seperti dalam diplomasi tradisional dulu. Tugas dari para diplomat adalah untuk menilai hubungan antara kepentingan perdagangan nasional dan kebijakan luar negeri, merekonsiliasi konflik antara perdagangan dan kepentingan kebijakan luar negeri, serta menjamin prospek dan kemungkinan kerjasama

⁴³ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 120.

⁴⁴ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 121.

⁴⁵ Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*. (Palgrave Macmillan: 2003), hal. 143.

perdagangan dengan pihak luar. Oleh karena itu, masalah ekspansi perdagangan ke luar membutuhkan bantuan negara berupa staf dan tenaga kerja.⁴⁶

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan peran ekonomi dan perdagangan dalam diplomasi menurut Roy. Yang pertama adalah ancaman perang nuklir telah menjadi deteren besar bagi penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan, khususnya apabila kepentingan negara-negara besar terlibat. Sehingga untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan untuk tidak terjerumus ke dalam konflik bersenjata, tindakan lain, terutama tindakan-tindakan ekonomi, diterapkan untuk menghasilkan pemecahan yang menguntungkan bagi persengketaan tersebut. Yang kedua adalah meningkatnya interdependensi antar negara dalam hal ekonomi sehingga ekonomi memperoleh kedudukan penting dalam diplomasi. Yang ketiga adalah adanya politik pemberian bantuan ekonomi dari negara-negara besar ke negara yang lebih kecil. Sedangkan yang terakhir adalah karena Perang Dingin telah membawa ke arah penerapan berbagai tindakan ekonomi sebagai taktik diplomasi.⁴⁷

Diplomasi ekonomi dan perdagangan secara khusus mulai banyak diperbincangkan sejak nasionalisasi industri di banyak negara pada tahun 1950an sampai 1970an. Hal ini kemudian melahirkan banyak diplomat dalam bidang perdagangan yang bertugas membantu penjualan produk yang dinasionalisasikan. Sejak disetujuinya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1949, perdagangan telah menjadi salah satu strategi ekonomi terpenting bagi negara-negara yang menganut sistem ekonomi terbuka. Salah satu pencapaian GATT yang terpenting adalah berdirinya WTO pada tahun 1994. Salah satu tujuan GATT dan WTO adalah reduksi tarif yang dapat meningkatkan volume perdagangan dunia. Hasil dari direduksinya tarif memang terbukti telah menaikkan volume perdagangan dan level ekonomi sebuah negara; oleh karena itu, menjadi anggota organisasi perdagangan dunia telah menjadi salah satu strategi utama negara dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar. Dengan bergabungnya sebuah negara dengan WTO, penerapan diplomasi komersial menjadi tidak dapat dihindari.

⁴⁶ Barston, *Op. Cit.*, hlm. 165.

⁴⁷ Roy, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Peran pasar dan swasta penting dalam diplomasi komersial, dimana negara bukan satu-satunya aktor. Susan Strange dan John M. Stopford melihat bahwa negara dan swasta semakin saling tergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan swasta yang semakin besar dengan negara dan negara pun semakin menyadari ketergantungannya kepada sumber daya langka yang dikontrol oleh perusahaan-perusahaan.⁴⁸ Ada beberapa alasan mengapa negara semakin membutuhkan peran swasta dan perusahaan-perusahaan. Pertama, negara membutuhkan alat untuk menciptakan kekayaan di dalam teritorinya dan kekayaan ini digunakan untuk mendapatkan *power* yang lebih besar sehingga pilihan nasional untuk kebijakan industri dan manajemen ekonomi yang efisien mulai lebih diperhatikan dibandingkan dengan kebijakan pertahanan negara.⁴⁹

Kedua, persaingan global di antara perusahaan-perusahaan juga mendorong negara-negara di dunia untuk saling berlomba-lomba mendapatkan lebih banyak lagi kekayaan.⁵⁰ Pihak swasta menyadari bahwa untuk dapat bersaing mereka harus berinvestasi di tempat yang tepat, oleh karena itu tempat-tempat yang menyediakan tenaga kerja terlatih dan memiliki infrastruktur yang baik pun menjadi tempat yang paling menarik bagi investasi. Kebutuhan pihak swasta ini mempengaruhi cara pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menarik investasi masuk yang berpotensi menciptakan lebih banyak lagi kekayaan.

Menurut Strange dan Stopford, perubahan-perubahan ini telah menambahkan dua dimensi baru bagi diplomasi. Negara tidak lagi semata-mata bernegosiasi dengan negara-negara lain, melainkan juga harus bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing.⁵¹ Sementara itu, perusahaan-perusahaan multinasional pun harus menjadi lebih seperti negara (*statesmanlike*) karena mereka harus mencari aliansi korporat, baik permanen maupun sementara, agar dapat bersaing dalam memperebutkan tempat di pasar dunia.⁵² Interaksi dari tiga dimensi ini, negara-swasta-pasar, membutuhkan

⁴⁸ John M. Stopford, Susan Strange, *et. al.*, *Rival States, Rival Firms: Competition for world market shares*. (Cambridge University Press: 1991), hlm. 1.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

keahlian baru dalam manajemen dan pemerintahan.⁵³ Dimensi-dimensi baru ini telah menambah pilihan kebijakan bagi negara dan swasta agar keduanya dapat bekerjasama menghasilkan kebijakan dan kapasitas administrasi yang kuat agar dapat bersaing di dalam tatanan ekonomi dunia yang telah mengalami perubahan-perubahan. Diplomasi dalam bentuk baru pun lahir dari kompleksitas hubungan negara dan swasta ini. Pihak swasta dan pasar memiliki peran yang semakin penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena mengabaikan peran mereka akan berpengaruh terhadap daya saing negara di pasar dunia. Diplomasi ekonomi dan komersial menjadi pilihan ketika bisnis tidak dapat berjalan tanpa campur tangan politik dan diplomasi negara, sementara negara juga membutuhkan swasta untuk memenuhi kepentingan ekonominya. Diplomasi komersial dapat menjadi salah satu *output* dari kebijakan luar negeri negara.

Kesimpulannya, ada beberapa poin penting mengenai diplomasi komersial. Pertama, pada dasarnya diplomasi komersial adalah diplomasi yang menggunakan elemen-elemen ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan sanksi ekonomi. Kedua, isu-isu umum yang dibahas dalam studi kasus diplomasi komersial meliputi strategi perdagangan internasional suatu negara, tingkat keberhasilannya, serta peran pihak swasta yang didukung oleh negara untuk melakukan ekspansi perdagangan di negara-negara mitranya. Ketiga, seperti halnya diplomasi tradisional, diplomasi komersial merupakan alat negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, oleh karena itu negara menjadi aktor utama dalam diplomasi komersial. Meskipun berperan sebagai aktor utama, negara bukanlah pemain tunggal. Peran swasta, individu pelaku bisnis, konsumen, sistem perdagangan internasional, dan kelompok masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan keberhasilan diplomasi komersial sebuah negara.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ The Institute for Trade and Commercial Diplomacy, *loc. cit.*

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Alan Bryman penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang biasanya menekankan pada kata-kata dan bukan pada kuantifikasi dalam kumpulan dan analisis data. Sifatnya induktif, konstruksionis, dan interpretif walaupun peneliti kualitatif tidak selalu memasukkan tiga unsur ini.⁵⁵

Penelitian kualitatif memiliki beberapa macam sebutan. Pertama, penelitian ini disebut dengan *verstehen* (pemahaman mendalam) karena mempertanyakan sebuah objek secara mendalam dan tuntas. Sebutan lainnya adalah Studi Kasus karena objek penelitiannya seringkali bersifat unik, kasuistik, tidak ada duanya. Karena sifatnya yang kasuistik, objek dan hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Pengertiannya adalah bahwa hasil dari penelitian ini sangat dipengaruhi oleh cara, metode, dan penarikan kesimpulan penulis.⁵⁶

Seperti yang dapat kita simpulkan dari paragraf sebelumnya, peran dari penelitian kualitatif adalah sebagai alat untuk mengeksplorasi interpretasi aktor (penulis) atas sebuah permasalahan. Oleh karena interpretasi ini bisa berubah maka penelitian jenis ini cenderung tidak terencana atau dapat diadakan beberapa perubahan-perubahan dalam proses penulisan. Penelitian ini juga tidak memerlukan sebuah generalisasi atau sebuah kesepakatan bersama. Ini berarti pandangan penulis dalam menganalisis permasalahan akan sangat menentukan hasil akhir penelitian. Ini karena dalam metode kualitatif kebenaran yang ada adalah kebenaran yang sifatnya “intersubjektif” dan bukannya “objektif”; oleh karena itu, peneliti kualitatif harus siap dengan berbagai versi kebenaran dalam data penelitiannya.⁵⁷

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah cara berpikir induktif. Metode induktif cenderung bermula dari bawah, yakni dari pengumpulan fakta-fakta dan data di lapangan yang ada. Data ini dikumpulkan dan dicari kesamaan-kesamaannya, pola-pola tertentu, hukum, dan atau prinsip-prinsip

⁵⁵ Alan Bryman, *Social Research Method*. (Oxford University Press: 2004), hlm. 266.

⁵⁶ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (DIA FISISP UI:2006), hlm. 5.

⁵⁷ *Ibid.*

untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum yang bisa menghasilkan sebuah hipotesis.⁵⁸ Jika ada hipotesis yang dikemukakan di awal penelitian maka sifat hipotesis itu umumnya sementara dan dapat berbeda dengan kesimpulan akhir.

Lama penelitian tergantung dari penulis dan pengumpulan data dapat dihentikan ketika penulis merasa data yang dibutuhkan telah cukup. Oleh karena itu, tidak ada batas-batas waktu yang sifatnya sangat mengikat dalam penelitian kualitatif. Menurut Irawan ada lima fase dalam melakukan penelitian kualitatif.⁵⁹ Tahap-tahap tersebut adalah penentuan fokus, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan. Dari satu tahap ke tahap berikutnya tidak terdapat batas yang ketat dan mengikat, atau dengan kata lain penulis dapat selalu kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan atau memasukan dan mengurangi apa yang sebelumnya telah ditulis.

Kasus yang menjadi fokus analisis penelitian ini adalah diplomasi komersial China di ASEAN dengan rentang waktu penelitian difokuskan setelah masuknya China ke WTO (2002) hingga tahun 2010. Adapun **variabel bebas** penelitian ini adalah diplomasi komersial China di ASEAN pasca keanggotaan China di WTO. Maksud dari diplomasi komersial dalam tulisan ini adalah usaha dan peran pemerintah dalam mengatur perdagangannya dengan negara mitra. Wujud dari diplomasi komersial ini sendiri terbagi dalam empat bentuk. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan perdagangan asing China agar sesuai dengan ketentuan WTO dan sekaligus dapat menguntungkan China dalam menjalankan kerja sama perdagangan dengan mitranya. Kedua, strategi yang dilakukan pemerintah China terkait hubungan perdagangan barang dan investasinya dengan ASEAN agar hasilnya sesuai dengan kepentingan nasional China. Ketiga, kebijakan pemerintah China terhadap perusahaan negara (SOE) China yang mempengaruhi ekspansi perusahaan-perusahaan tersebut di ASEAN. Keempat, kebijakan pemerintah China dan pihak swasta terhadap perusahaan swasta China dalam meningkatkan dan menjaga harmonisasi hubungan perdagangan dengan ASEAN. Selanjutnya diplomasi

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 20.

komersial China ini menjadi alasan peningkatan hubungan ekonomi China dan ASEAN dalam kurun waktu delapan tahun (2002-2010).

Adapun **variabel terikatnya** adalah peningkatan hubungan ekonomi China dan ASEAN mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2010. Indikatornya adalah naiknya volume perdagangan dan investasi antara kedua negara. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana hubungan kedua variabel ini dan bagaimana variabel terikatnya dipengaruhi oleh variabel bebas.

Analisis penelitian akan dilakukan dengan cara pengumpulan data yang sesuai dengan studi kasus yang diteliti. Bentuk-bentuk data umumnya berupa dokumen dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Adapun dokumen dan literatur yang diambil berupa data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui buku-buku teks, laporan perdagangan China dan ASEAN, jurnal politik dan ekonomi, data statistik matang dari situs atau terbitan resmi departemen perdagangan China, ASEAN, dan negara-negara yang terkait, serta majalah bisnis dan ekonomi. Data ini didapatkan dari beberapa perpustakaan seperti Unit Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI Depok, Perpustakaan FISIP UI Depok, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Kampus Depok, Perpustakaan Nasional WTO, Sekretariat ASEAN Jakarta, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, situs resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, situs resmi Kementerian Perdagangan China, paper, jurnal dan surat kabar online, dan beberapa sumber lainnya. Jenis penelitian lainnya akan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan seorang nara sumber yang terkait erat dengan subjek penelitian.

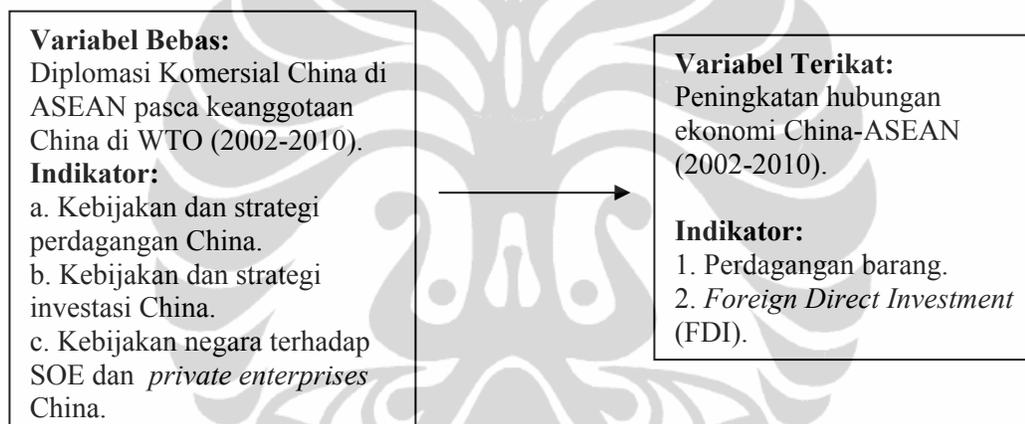
1.7 Hipotesis

Hipotesis utama penelitian ini adalah peningkatan yang cukup signifikan dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan antara China dan ASEAN pasca keanggotaan China di WTO disebabkan oleh peran negara China melalui diplomasi komersialnya di ASEAN. Hipotesis berikutnya adalah bahwa peran negara dalam diplomasi komersial China yang berhasil meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan ASEAN lebih dominan dibandingkan peran swasta. Indikator

naiknya kerjasama ekonomi antara keduanya adalah peningkatan volume perdagangan barang dan investasi. Sedangkan hal-hal yang menjadi indikator diplomasi komersial China adalah kebijakan pemerintah dan regulasi perdagangan asing China, serta kebijakan negara terhadap perusahaan milik negara China dan perusahaan swasta China di ASEAN yang berupa perusahaan swasta domestik, perusahaan gabungan dan perusahaan multinasional China.

1.8 Model Analisis

Gambar 1.1 Model analisis.



Model analisis diatas digunakan untuk menjelaskan penelitian ini. Penelitian akan dimulai dengan mengkaji variabel bebas yakni bagaimana pemerintah China menetapkan dan mengadaptasi peraturan perdagangannya yang didorong oleh kepentingan nasional China untuk meningkatkan perekonomiannya dan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kebijakan yang diambil China ini kemudian menjadi landasan dalam pemilihan dan penerapan diplomasi komersial China di Asia Tenggara.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi ke dalam empat bab sebagai berikut:

Bab Pertama memaparkan latar belakang permasalahan serta tujuan penulisan tesis. Dijelaskan dalam bab ini bagaimana diplomasi komersial telah menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi sebuah negara yang menganut ekonomi yang berorientasi pada pasar. Diplomasi komersial China di ASEAN pasca keanggotaan China di WTO menjadi studi kasus yang diambil. Dalam bab ini terdapat pula pertanyaan dan metodologi penelitian.

Bab Kedua fokus pada dinamika hubungan ekonomi politik China dan ASEAN dan bagaimana terjadi peningkatan hubungan ekonomi di antara keduanya sesudah keanggotaan China di WTO. Dinamika ini akan dijelaskan dalam dua tahapan. Pertama, dinamika politik hubungan perdagangan China dan Asia Tenggara sebelum China menjadi anggota WTO. Kedua adalah tahapan waktu setelah China menjadi anggota WTO yaitu mulai tahun 2002 sampai tahun 2010. Tahapan waktu ini digunakan untuk memperlihatkan fluktuasi dan perkembangan hubungan ekonomi kedua negara dan juga perbedaan politik perdagangan China di ASEAN sebelum dan sesudah China menjadi anggota WTO.

Bab Ketiga membahas diplomasi komersial China di ASEAN melalui perdagangan barang dalam skema ACFTA. Diplomasi ini termasuk kebijakan, hukum, dan regulasi perdagangan asing yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah China secara umum kepada mitra-mitra dagangannya. Bab ini juga akan menganalisis keputusan-keputusan China dalam mengambil keputusan terkait dengan ACFTA yang didasarkan kepada hukum perdagangan asing China, regulasi ekspor impor China, serta pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan politik pemerintah China agar hasil yang didapatkan sesuai dengan kepentingan dalam negeri China.

Bab Keempat fokus kepada kebijakan pemerintah China yang mendukung investasi dari dan ke ASEAN. Bab ini menganalisis strategi pemerintah China dalam mendorong investasi keluar China ke ASEAN dan pada saat yang sama juga menarik investor ASEAN untuk menanamkan modal di China. Terakhir, bab ini membahas strategi pemerintah dalam mendorong perusahaan negaranya dan swastanya untuk berekspansi ke ASEAN serta strategi perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, saran dan masukan untuk agenda penelitian berikutnya.



BAB 2

DINAMIKA POLITIK HUBUNGAN PERDAGANGAN CHINA-ASEAN SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI EKONOMI CHINA

2.1 Sejarah Awal Hubungan Perdagangan China dan Asia Tenggara

Jauh sebelum gaung kerja sama perdagangan bebas China-ASEAN terdengar, China dan negara-negara Asia Tenggara telah memiliki sejarah hubungan perdagangan yang panjang. Hubungan perdagangan (komersial) ini telah dimulai beberapa abad Sebelum Masehi, lama sebelum negara-negara di Asia Tenggara membentuk ASEAN. Sejarah mencatat hubungan perdagangan China dan Asia Tenggara telah dimulai bahkan sebelum istilah Jalur Sutra digunakan. Istilah Jalur Sutra sendiri mengacu pada jalur perdagangan yang melintasi benua Asia dan menghubungkan Barat, Timur, dan Selatan Asia dengan negara-negara di Mediterania, Eropa dan Utara dan Timur Laut Afrika. Dinamakan Jalur Sutra karena rute ini berfungsi sebagai jalur perdagangan sutra China yang dimulai pada Dinasti Han (206 SM- 220 M). Hubungan perdagangan China dan Asia Tenggara sendiri dimulai pada Dinasti Shang (1766-1122 SM), dengan menggunakan kulit kerang sebagai alat tukar.⁶⁰ Kala itu China menyebut Asia Tenggara dengan sebutan “Nanyang” yang berarti Samudra Selatan.

Perdagangan dengan Asia Tenggara kala itu penting bagi Kaum Yue yang hidup di Selatan Sungai Yangze, China, karena dari perdagangan inilah sumber kekayaan mereka berasal.⁶¹ “Sumber Kekayaan” yang berupa sutra dan porselin ini berasal dari Asia Tenggara. Hal inilah yang kemudian membuat Dinasti Qin (221-206 SM) memperluas daerah kekuasaannya dari daerah Selatan provinsi Guandong ke delta Sungai Merah di Utara Vietnam. Meskipun demikian, hingga pada abad pertama Sebelum Masehi, hanya sedikit pedagang China yang berlayar ke Asia Tenggara selain ke Utara Vietnam. Pada awal Masehi, hubungan dagang China dan Asia

⁶⁰ Martin Stuart-Fox, *A Short History of China and Southeast Asia: Tribute, Trade, and Influence*. (Allen & Unwin: 2003), hlm. 23.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 24.

Tenggara sudah sampai ke Indonesia yakni melalui Selat Malaka sampai ke Selatan Sumatera dan Utara Jawa.⁶²

Hubungan perdagangan China-Asia Tenggara mulai berkembang sejak Dinasti Song (960-1279). Kekaisaran China saat itu memiliki hubungan dagang dengan banyak negara di Asia Tenggara. Hubungan ini berupa hubungan upeti dan tujuan pemberian upeti ini adalah sebagai selubung perdagangan.⁶³ Di bawah Dinasti Sui dan Tang perdagangan China dengan Asia Tenggara mulai meningkat karena meningkatnya permintaan barang-barang mewah Asia Tenggara.⁶⁴ Agama Buddha yang merupakan kesamaan antara kedua wilayah juga termasuk pendorong hubungan perdagangan antara keduanya. Hubungan perdagangan ini berlanjut hingga abad ke-15 saat Laksamana Zheng He atau Laksamana Cheng Ho, seorang diplomat dari Dinasti Ming, melakukan ekspedisi perdagangan ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Timur Afrika. Ekspedisi yang berlangsung dari tahun 1405 sampai tahun 1433 ini dirancang untuk memperluas wilayah kekuasaan dan perdagangan China. Negara-negara Asia Tenggara yang dikunjungi Zheng He adalah Kepulauan Malay dan Thailand. Selama perjalanannya ia mendistribusikan dan menerima barang-barang berharga seperti emas, perak, porselin, dan sutra.⁶⁵

Ketika pedagang dari Eropa sampai di Asia Tenggara pada abad ke-16, mereka menemukan banyak pedagang China berada di pelabuhan dan rute-rute perdagangan utama.⁶⁶ Hal ini menunjukkan bagaimana China telah memulai hubungan perdagangannya dengan Asia Tenggara baik untuk tujuan komersil maupun dalam menjalankan sistem hubungan upeti. Setelah abad ke-19 hubungan perdagangan China-Asia Tenggara semakin meningkat dengan besarnya jumlah imigran China yang datang dan menetap di Asia Tenggara pada masa kekuasaan Dinasti Qing.

⁶² *Ibid*, hlm. 26.

⁶³ Dr. John Wong, *Politik Perdagangan China di Asia Tenggara*. (Penerbit Bumi Aksara: 1987), hlm. 13.

⁶⁴ Martin Stuart-Fox, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁶⁵ Eileen H. Tamura, *et. al.*, *China: Understanding Its past*. (University of Hawaii Press: 1997), hlm. 70.

⁶⁶ Dr. John Wong, *Op. Cit.*

Di bawah pemerintahan Dinasti Qing, pedagang-pedagang Eropa mulai datang ke daratan China dan melakukan perdagangan dengan China. Maraknya perdagangan dengan Eropa dan persaingan antar pedagang Eropa sendiri dalam memperebutkan pasar China menimbulkan kekhawatiran pemerintah China. Pemerintah pun menetapkan “Sistem Canton” tahun 1765 yang membatasi seluruh kedatangan pedagang Eropa di satu pelabuhan saja yakni di Pelabuhan Canton, Guang Zhou. Akibat dari diterapkannya sistem ini adalah terjadinya ketidakseimbangan volume perdagangan China dengan perusahaan British East India Company. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini British East India mengadakan perdagangan opium dengan para penyelundup narkotika di China. Dinasti Qing bereaksi keras dan terjadilah Perang Opium tahun 1839 sampai 1842. Perseteruan dagang ini berakhir dengan kekalahan China sehingga China terpaksa menandatangani Perjanjian Nanjing yang merugikan China dan ini mengubah *balance of power* antara China dan dunia luar.⁶⁷ China mulai kehilangan kedaulatan dan integritas wilayahnya sehingga abad tersebut disebut sebagai “Abad Penghinaan” dan mengubah hubungan China dengan negara-negara tetangganya.⁶⁸

2.2. Sistem Ekonomi China Sebelum dan Sesudah Reformasi Ekonomi serta Pengaruhnya terhadap Hubungan Perdagangan China dan ASEAN

Dinasti Qing yang sebelumnya berkuasa jatuh dari tampuk kekuasaan dengan menangnya Partai Komunis China (PKC) pada tahun 1949, dan pada saat yang bersamaan banyak negara-negara Asia Tenggara juga baru merdeka. Kala itu China mulai dilihat sebagai ancaman oleh Asia Tenggara karena berpaham komunis. Pada tahun 1960an negara-negara Asia Tenggara bersekutu dengan dengan Amerika Serikat menentang China. Perbedaan sistem ekonomi dan sosial mempertajam

⁶⁷ Joshua Eisenman, *et. al.*, *China and the Developing World: Beijing's Strategy for the Twenty-First Century*. (M.E. Sharpe Inc.: 2007), hlm. 13.

⁶⁸ *Ibid.*

perbedaan ideologi keduanya dan adanya perbedaan besar antara ekonomi pasar dan sosialis mempengaruhi hubungan perdagangan China dan Asia Tenggara.⁶⁹

Antara tahun 1940 sampai tahun 1950, perdagangan opium kembali terjadi namun kali ini antara China dengan Asia Tenggara. Istilah Perdagangan Opium mengacu pada perdagangan candu antara Thailand, China, dan Jepang. Opium diproduksi di Kengtung, Burma dan China. Namun pada tahun 1946 PBB mengeluarkan larangan untuk merokok opium di Asia Timur dan ekspor opium untuk penggunaan non-medis juga dilarang. Namun karena besarnya keuntungan yang didapatkan melalui perdagangan opium ini, maka pengusaha opium China memutuskan untuk tetap melanjutkan produksi opiumnya. Sindikat narkotika China terus melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan kebijakan pemerintah China yang kala itu berusaha keras untuk mengurangi jumlah kecanduan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada awal tahun 1950an, setelah PKC menang, Myanmar dan Indonesia menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan China. Motif di balik pengakuan Indonesia adalah karena Indonesia sendiri memiliki Partai Komunis Indonesia (PKI) dan jumlah masyarakat etnis China pun cukup banyak sehingga ini menjadi perhatian pemerintah.⁷⁰ Kala itu hubungan China dan Asia Tenggara tidak terlalu baik karena di Thailand dan Filipina terdapat gerakan “anti-China” dan di Jakarta etnis China juga banyak mengalami diskriminasi. Hal ini menyebabkan hubungan perdagangan China-Asia Tenggara cenderung terbatas. John Wong menggambarkan hubungan perdagangan antara keduanya sebagai berikut:

“Filipina menolak semua bentuk hubungan dengan negara-negara komunis sementara Thailand secara resmi menghalangi hubungan perdagangan dengan China. Dengan Indonesia perdagangan sulit karena hubungan diplomatik dengan China masih terhalang. Malaysia dan Singapura pun terhalang melakukan hubungan perdagangan dengan China karena embargo oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).”⁷¹

Baik China maupun negara-negara di Asia Tenggara berusaha untuk memperbaiki hubungan perdagangan yang lesu ini. Keinginan baik ini ditunjukkan

⁶⁹ Dr John Wong, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

⁷⁰ Martin Stuart-Fox, *Op. Cit.*, hlm. 163.

⁷¹ Dr John Wong, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

China dengan menjadi negara pertama yang mengakui Republik Demokrasi Vietnam. Sementara itu Indonesia mengirimkan duta pertamanya ke China pada bulan Oktober 1953 dan mulai mempromosikan perdagangan dengan China.

Momentum penting yang kemudian mengawali perbaikan hubungan ekonomi China dengan Asia Tenggara adalah Konferensi Bandung atau yang juga dikenal dengan Konferensi Asia-Afrika yang diadakan tanggal 18 hingga 24 April 1955 di kota Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan 29 negara-negara Asia dan Afrika yang sebagian besar baru merayakan kemerdekaannya. Perwakilan China yang datang saat itu adalah Perdana Menteri Zhou Enlai. Konferensi ini dijadikan momentum yang baik bagi China untuk membina hubungan yang lebih baik dan menyebarkan pengaruh yang lebih besar dengan negara-negara tetangganya. Kehadiran China di Konferensi Bandung membuka pintu perdagangan dengan negara-negara yang sebelumnya tidak mengakui kemerdekaan China. Menghangatnya hubungan China dan Asia Tenggara membuat perdagangan keduanya meningkat.

Tabel 2.1 Pola neraca perdagangan dunia China dengan Asia Tenggara (1955-1979) (dalam juta dolar)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
1955	85	100	-15
1959	207	137	+70
1965	279	164	+115
1970	212	49	+163
1975	618	132	+468
1976	601	481	+120
1977	655	515	+140
1978	811	700	+111
1979	985	865	+120

Sumber: data dipilih dari 1955-65, A. Ecks tein (id) *China Trade Prospects and The US. Policy* (New York: Praegar, 1971) IMF, *Direction of Trade Year Book 1980* dalam Dr. John Wong, *Politik Perdagangan China di Asia Tenggara*. (Penerbit Bumi Aksara: 1987), hlm. 227.

Hubungan perdagangan dengan Asia Tenggara semakin membaik setelah Konferensi Bandung karena Perdana Menteri Zhou Enlai bertemu dengan Pangeran Sihanouk dari Kamboja pada tahun 1956 dan melakukan kesepakatan dagang dan menerima bantuan dari China. Dua tahun kemudian Phnom Penh mengadakan hubungan diplomatik dengan China. Pada akhir tahun 1950an, hubungan China-Asia Tenggara semakin membaik karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena berkurangnya ketergantungan dagang China dengan Uni Soviet yang kala itu mencapai 74% dari total volume perdagangan China dengan Uni Soviet.⁷² Yang kedua, karena China menerapkan Pembangunan Lima Tahun Jangka Pertama yang berlaku dari tahun 1953 hingga tahun 1958. Pembangunan ini menghasilkan produk-produk manufaktur padat karya yang menemukan pasarnya di Asia Tenggara.⁷³

Selama tahun 1960-an, hubungan politik dan ekonomi China dan Asia Tenggara kembali bergolak. Dampak dari Perang Dingin mempengaruhi hubungan China dan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara bersekutu dengan Amerika Serikat menentang China yang komunis. Kala itu hanya Singapura dan Malaysia yang masih mempertahankan hubungan perdagangan langsung dengan China walaupun tidak ada hubungan diplomatik formal.⁷⁴ Situasi ini diperparah dengan pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan China pada tahun 1965 setelah Gerakan 30 September dan bubarnya poros Peking-Jakarta yang dipicu oleh perselisihan antara ABRI dan PKI. Padahal sebelum pemutusan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan China dengan Indonesia mencapai 11% dan China menjadi pemasok barang-barang untuk Indonesia dan China juga sempat memberikan bantuan kepada Jakarta.⁷⁵

Pada tahun 1967 lima negara Asia Tenggara membentuk ASEAN. ASEAN adalah bentuk regionalisme yang berjalan di negara-negara Asia Tenggara dan bertujuan untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mempererat hubungan antar negara

⁷² John Wong, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 20.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 49.

anggotanya. Dari sudut pandang Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, pendirian ASEAN sebenarnya lahir dari keinginan untuk menghadirkan kekuatan lain yang berfungsi sebagai penyeimbang untuk menandingi atau setidaknya menjadi mitra wicara dan memiliki posisi tawar yang kuat sehingga dapat mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di Asia. ASEAN juga berdiri karena kekalahan Amerika pada Perang Vietnam membuat Asia Tenggara mempertanyakan kesediaan Amerika untuk menjaga Asia Tenggara. Terlebih lagi Uni Soviet juga menarik dukungannya dari Vietnam sehingga Asia Tenggara berusaha mencari akomodasi dengan negara besar yakni China.⁷⁶

Sepanjang tahun 1970an China berusaha memperbaiki hubungan dan citranya di Asia Tenggara. Dekade ini merupakan tahun-tahun yang krusial bagi hubungan keduanya. Pada bulan Februari 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengadakan kunjungan ke China. Kunjungan ini sangat penting bagi proses normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan China. Nixon yang memberikan pernyataan “hanya ada satu China” terkait dengan status Taiwan disambut baik oleh pemerintah komunis China. Pertemuan ini berdampak positif bagi hubungan China dan Asia Tenggara karena setelah hubungan diplomatik Amerika-China terjalin, Malaysia, Filipina, dan Thailand mengakui kedaulatan China. Hubungan perdagangan antara China dan ASEAN pun meningkat. Seperti yang dapat kita lihat dalam tabel 2.1, ekspor China ke negara ASEAN meningkat dari US\$ 212 juta (1970) menjadi US\$ 618 juta (1975).

Pada tahun 1979, pimpinan Partai Komunis China Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan pembukaan ekonomi China ke ekonomi yang berorientasi pada pasar. Reformasi ekonomi ini dilakukan tanpa perubahan politik, yang berarti China tidak mengubah tatanan politik komunis sama sekali. Terdapat banyak perbedaan pada sistem ekonomi China sebelum dan sesudah reformasi dilakukan. Sebelum reformasi, sistem ekonomi China adalah sistem ekonomi sosialis yang mengacu pada sistem ekonomi Uni Soviet, yang merupakan negara komunis terbesar. Sistem perekonomian ini cenderung mengandalkan kekuatan dan sumber daya

⁷⁶ Martin Stuart-Fox, *Op. Cit.*, hlm. 23.

domestik atau berusaha memenuhi kebutuhan negara dari perdagangan dalam negeri. Ekspor tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting sehingga volume perdagangan China dengan negara lain pun tidak terlalu besar. Untuk memenuhi tuntutan sistem ekonomi yang mengandalkan diri sendiri tersebut, industri domestik diproteksi dari kompetitor asing oleh pengawasan langsung negara yang dilakukan pada impor dan investasi dan alokasi administratif valuta asing yang dikombinasikan dengan nilai mata uang yang *overvalued*.⁷⁷ Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perencana pusat ini membangun dinding tinggi yang memisahkan ekonomi domestik dan ekonomi dunia.⁷⁸

Industri pra-reformasi ekonomi ditekankan pada industri berat yang semuanya berada di bawah kontrol pemerintah. Akibatnya, sektor pertanian dan industri ringan cenderung kalah. Porsi perdagangan China lebih cenderung ke barang-barang hasil industri berat yang diimpor China dari Uni Soviet, Jepang, Amerika Serikat, dan negara barat lain. Pola perdagangan ini menjelaskan mengapa volume impor China dari negara-negara ASEAN tidak terlalu besar karena sebagian besar produk ekspor ASEAN adalah produk pertanian seperti beras, gula, karet, dan hasil bumi seperti minyak. Pertumbuhan industri China merosot tajam selama tahun 1974 sampai 1976 dan produksi pertanian pun macet selama 1975 hingga 1977.⁷⁹ Walaupun China tidak sampai mengalami krisis, sistem ekonominya tidak mampu mengangkat perekonomian China.

Deng Xiaoping menemukan banyak masalah dalam sistem ekonomi China ketika ia kembali berkuasa pada pertengahan tahun 1978. Ia mendeteksi banyak masalah struktural yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian China.⁸⁰ Maka ia membawa China kepada sistem ekonomi pasar dengan motif ingin membuktikan bahwa “kemiskinan bukanlah sosialisme” dan “sosialisme melenyapkan “kemiskinan”. Dalam pidatonya pada pleno ketiga sidang Komite

⁷⁷ Susan L. Shirk, *How China Opened Its Door: The Political Success of the PRC's Foreign Trade and Investment Reforms*. (The Brookings Institution: 1994), hlm. 8.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Dr. John Wong, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁸⁰ *Ibid.*

Sentral ke XI Partai Komunis China pada tanggal 13 Desember 1978, Deng mengemukakan keinginannya untuk mereformasi ekonomi dan China ingin melakukan modernisasi pembangunan dengan cara merangkul kelompok yang berbeda dan bukannya meminggirkannya.⁸¹ Kelompok berbeda yang dimaksud oleh Deng salah satunya adalah negara anggota ASEAN yang memiliki hubungan politik dan ekonomi yang pasang surut dengan China.

Reformasi ekonomi yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping pada dasarnya memberikan pasar porsi yang lebih besar dalam perekonomian sosialis. Deng menyebut sistem ini sebagai ekonomi pasar sosialis. Namun pemberian porsi lebih ini tidak dilakukan secara total dan besar-besaran karena sistem sosialis pasar tetap melihat pasar sebagai pelengkap penting saja dan masih tetap di bawah aturan dan pengawasan pemerintah. Reformasi ekonomi ini secara garis besar dibagi ke dalam empat tahap.⁸²

Tahap pertama berlangsung dari tahun 1978 sampai tahun 1984. Kebijakan yang dilakukan pemerintah China selama tahap ini pada intinya memulihkan perekonomian China dengan cara memberikan porsi lebih besar kepada pasar. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan revolusi pada bidang pertanian. Contohnya adalah dengan menaikkan harga produk hasil pertanian, diversifikasi dan spesialisasi produk pangan, dan mendesentralisasi pertanian dari sistem kolektif ke level rumah tangga.⁸³ Pada tahap ini juga dilakukan perubahan kebijakan perdagangan. Badan-badan usaha milik negara diijinkan untuk menjual output mereka yang di atas kuota dengan harga pasar dan badan usaha milik asing dan swasta diijinkan berdiri.⁸⁴ Pada tahap ini China membuka Zona Ekonomi Khusus yang dilakukan untuk menarik penanam modal asing berinvestasi di dalam negeri. Zona Ekonomi Khusus ini sebelumnya bernama Zona Kawasan Ekspor yang diresmikan pada bulan Juli 1979. Kawasan ini adalah Zhuhai, Shantou, Shenzhen, dan Xiamen. Sebelum reformasi tahap pertama

⁸¹ Ratna Shofi Inayati Ed., *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*. (LIPI: 2006), hlm. 2.

⁸² Michael W. Bell, et. al., *China at the Threshold of A Market Economy*. (IMF: 1993), hlm. 2.

⁸³ *Ibid*, hlm. 3.

⁸⁴ Shirk, *Op. Cit.*, hlm. 28.

ini dilakukan China tidak memiliki investasi asing langsung (FDI) sama sekali. Ini adalah sebuah langkah penting yang telah diambil China karena beberapa belas tahun kemudian yakni tepatnya pada tahun 1993 China telah berhasil menarik FDI sebesar US\$ 60 juta dari lebih 70 ribu perusahaan.⁸⁵

Tahap kedua reformasi ekonomi berlangsung dari tahun 1984 hingga tahun 1988. Pada tahap ini pemerintah melakukan reformasi pada sektor industri, perbankan, dan investasi. Sistem investasi dan perbankan diubah agar perusahaan mulai meminjam dana usaha dari bank dan tidak lagi menunggu negara. Untuk mendukung ini sistem *monobank* dihapuskan dan pembangunan Bank Sentral dilakukan.⁸⁶ Untuk mendorong investasi, 14 kota utama di daerah pesisir dibuka untuk perdagangan dan investasi asing.⁸⁷

Pembukaan 14 kota utama tersebut diresmikan pada tanggal 4 Mei 1984. Kota-kota tersebut adalah Tianjin, Shanghai, Dalian (Provinsi Liaoning), Qinhuaodao (Provinsi Hebei), Yantai, Qingdao (Provinsi Shandong), Lianyungang, Nanton (Provinsi Jiangsu), Ningbo, Wenzhou (Provinsi Zhejiang), Fuzhou (Provinsi Fujian), Guangzhou, Zhanjiang (Provinsi Guangdong), Beihai (Daerah Otonom Guangxi Zhuang).⁸⁸

Reformasi periode ketiga berlangsung antara tahun 1988 sampai tahun 1991. Ekonomi China melambat pada periode ini karena terjadi inflasi. Situasi makroekonomi China tidak stabil sehingga negara mengeluarkan kebijakan moneter dan investasi untuk merevitalisasi ekonominya. Tahap berikutnya dimulai tahun 1992 dimana ekonomi sudah mulai stabil. Di awal dekade 1990an ini China membuka ekonominya secara penuh dan menghapuskan sistem ekonomi terencana.

Sebelum reformasi ekonomi dimulai, pertumbuhan ekonomi China selama tahun 1960 dan 1970an cenderung jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangganya di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.⁸⁹

⁸⁵ Shirk, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

⁸⁶ Bell, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Bagus Dharmawan, *Ed. Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*. (PT Kompas Media Nusantara: 2006), hlm. 52.

⁸⁹ Bell, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 6-9.

Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki kecepatan pertumbuhan di atas China sepanjang tahun 1960an hingga 1976. Singapura memimpin dengan Produk Nasional Bruto (PNB) yang tumbuh sebesar 9.6% selama enam belas tahun, disusul dengan Thailand yang mengalami pertumbuhan 7.7% dan kemudian Malaysia sebesar 6.7%. China berada di bawah Malaysia dengan pertumbuhan PNB sebesar 5.7% sebelum reformasi dimulai.

Tabel 2.2 Ekonomi terpilih: kecepatan pertumbuhan PNB dan PNB per kapita (1960-76) (Perubahan persen tahunan)

Negara	PNB	PNB Per kapita
Singapura	9.6	7.5
Thailand	7.7	4.6
Malaysia	6.7	3.9
China	5.7	3.6
Filipina	5.4	2.4
Indonesia	5.2	3.1
Myanmar	2.9	0.7

Sumber: Michael W. Bell, *et. al.*, *China at the Threshold of A Market Economy*. (IMF: 1993), hlm. 9.

Setelah revitalisasi ekonomi, perekonomian China mulai pulih. Perdagangan dan arus investasi meningkat yang didorong dengan kebijakan yang berorientasi pada ekspor dan reduksi hambatan dagang. Ini menjadi salah satu faktor pendukung perdagangan intraregional di Asia. Perdagangan antara China dan negara-negara Asia bertumbuh pesat mencapai 55% dengan Asia Selatan dan 29% dengan Asia Tenggara.⁹⁰ Negara-negara Asia Tenggara mulai berinvestasi di China dan begitupun sebaliknya. Kerja sama dan integrasi perdagangan meningkat di Asia salah satunya dalam bentuk segitiga pertumbuhan. China sendiri membentuk Kawasan Ekonomi China yang di dalamnya termasuk Selatan China, Hong Kong, Taipei, Indonesia, Malaysia dan

⁹⁰ *Asian Development Outlook 1994*. (Oxford University Press: 1995), hlm. 16.

Singapura. Pertumbuhan ekonomi China pada tahun 1993 tumbuh sebesar 13% sementara perdagangan asingnya mencapai 38% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nya.⁹¹ Sampai tahun 1992 ekspor China ke Asia Tenggara mencapai US\$ 2,368 juta sedangkan ekspor Asia Tenggara ke China berjumlah US\$ 2,988 juta.⁹² Ini menandakan hubungan perdagangan yang cukup berimbang dan saling melengkapi satu sama lain.

Pertumbuhan PDB yang mencapai angka 13.4% membuat China menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor industri China pada tahun 1993 tumbuh 20%.⁹³ Investasi China di Asia juga berkembang cepat di luar negeri terutama di Hong Kong dan negara-negara berkembang di Asia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini juga dibarengi dengan inflasi yang mencapai 14.5% atau naik dari 8.6% pada tahun 1992 dan perdagangan pun mengalami defisit sebesar US\$ 9.1 juta, yang merupakan defisit pertama sejak tahun 1989.⁹⁴

Hubungan perdagangan dengan China menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Asia di awal dekade 1990an. Hubungan China-ASEAN memang membaik pada awal tahun 1990an sejak terjalinnya kembali hubungan diplomatik antara seluruh negara ASEAN dengan China setelah Perang Dingin berakhir. Hubungan keduanya juga membaik setelah ASEAN mengundang Menteri Luar Negeri China untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Tahunan ASEAN pada bulan Juli 1991. Pertumbuhan PDB ASEAN pada tahun 1993 adalah 6.4% dan naik sebesar 7.5% pada tahun 1995. Total investasi di kawasan adalah sebesar US\$ 32.239 juta terhitung mulai tahun 1987 hingga 1992. Jumlah ini mengalahkan investasi asing langsung China (tidak termasuk Taiwan) dalam kurun waktu yang sama sebesar US\$ 27,910 juta. Kemajuan ini disebabkan oleh pasar finansial di Asia yang bertumbuhan pesat didukung oleh liberalisasi finansial dan modal.

⁹¹ Shirk, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁹² *Asian Development Outlook 1994*, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁹³ *Ibid*, hlm. 25.

⁹⁴ *Ibid*.

Tabel 2.3 Investasi asing langsung di anggota negara berkembang (1987-1992)
(dalam juta dolar)

Negara	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1987-1992
Ekonomi Industri Baru	4.152	5.485	5.135	7.308	6.782	7.064	35.926
Korea	601	871	758	715	1.116	550	4.611
Singapura	2.836	3.655	2.773	5.263	4.395	5.635	24.557
Taipei	715	959	1.604	1.330	1.271	879	6.758
PRC	2.314	3.194	3.393	3.487	4.366	11.156	27.910
Asia Tenggara	1.467	3.336	4.688	6.399	8.113	8.236	32.239
Indonesia	385	576	682	1.093	1.482	1.774	5.992
Malaysia	423	719	1.668	2.332	4.073	4.118	13.333
Filipina	307	936	563	530	544	228	3.108
Thailand	352	1.105	1.775	2.444	2.014	2.116	9.806

*Data mengacu kepada *net FDI*.

Sumber: Data dari IMF, data statistik *Balance of Payments* (Februari 1994); Bank Sentral China, Statistik *Balance of Payments* (Taipei, September 1993) dalam *Asian Development Outlook 1994*, hlm. 17.

Tabel di atas menunjukkan bagaimana di awal tahun 1990an ASEAN dan kelompok negara Ekonomi Industri Baru (NIEs--*Newly Industrializing Economies*) secara keseluruhan lebih unggul dari China dalam hal investasi. Namun perubahan posisi kemudian terjadi. Pada tahun 1993 China berhasil menumbuhkan ekonominya sebesar 13%, dan ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi di dunia. Setahun kemudian pada 1994, China melakukan devaluasi mata uangnya, Yuan, dan ini menyebabkan pesatnya ekspansi ekonomi yang disebabkan oleh perdagangan dan investasi. Semasa periode ini, China juga menaikkan anggaran pertahanan dan memodernisasi militernya.

Kemajuan ekonomi China yang diikuti dengan kemajuan pertahanan militernya menarik perhatian dunia dan gaung “kebangkitan China” semakin sering terdengar dan muncul pula kesan bahwa China adalah sebetulnya “ancaman baru” yang

patut diwaspadai terutama oleh negara-negara tetangganya seperti ASEAN. Untuk menghadapi dan mengurangi kecemasan terhadap kekuatan China yang baru, ASEAN kemudian mengundang China untuk menghadiri *ASEAN Regional Forum* (ARF). Forum ini dilaksanakan di Bangkok pada bulan Juli 1994 dengan 18 anggota pendiri yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Papua Nugini, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Korea Selatan, Kanada, Selandia Baru, Uni Eropa, China, dan Rusia. Tujuan ARF adalah sebagai *confidence building measures* dan diharapkan dapat memfasilitasi resolusi konflik diantara negara-negara pendirinya. Bagi ASEAN forum ini sangat penting untuk menghadapi raksasa China dan memberikan rasa aman dalam melakukan kerja sama dan integrasi ekonomi dengan China.

Kesediaan China untuk bergabung dengan ARF merupakan salah satu bentuk konsistensi China terhadap kebijakan luar negerinya. Sejak pertengahan tahun 1980an, China meluncurkan dua inisiatif kebijakan utama luar negerinya. Yang pertama adalah “*Policy of Good Neighborliness*” (PGN) dan yang kedua adalah “*New Security Concept*” (NSC).⁹⁵ PGN adalah konsep kebijakan yang ditujukan untuk membina hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan regional serta dalam konteks kebangkitan ekonomi China yang mengesankan. Kebijakan ini tidak secara langsung menyebutkan ASEAN sebagai negara tetangga yang dimaksud, namun ini menjadi alasan yang cukup bagi China untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan ASEAN. Konsep NSC di lain pihak menekankan pada kebijakan keamanan China yang merancang definisi baru tentang keamanan. Definisi baru ini menegaskan bahwa konflik dan tantangan yang datang pada dasarnya tidak akan diselesaikan dengan menggunakan kekuatan persenjataan dan konfrontasi militer, melainkan dengan empat elemen utama: kepercayaan satu sama lain (*mutual trust*), keuntungan bersama (*mutual benefit*), kesetaraan (*equality*), dan koordinasi serta kerjasama (*co-operation/co-ordination*).⁹⁶ Dua kebijakan China ini memberikan implikasi tersendiri bagi hubungan China dan ASEAN, yang

⁹⁵ Jungen Haacke, *The Significance of Beijing's Bilateral Relations: Looking 'Below' the Regional Level in China-ASEAN Ties*, dalam Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 114.

⁹⁶ *Ibid.*

merupakan salah satu tetangga terdekat China.⁹⁷ Implikasi pertama adalah bahwa China berharap untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dengan ASEAN. Kedua, China berharap dapat menjaga stabilitas kawasan. Ketiga, China berharap dapat memiliki porsi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang lebih besar dengan ASEAN. Terakhir, China berharap akan terjadi intensifikasi hubungan sosial, politik, dan budaya di antara keduanya.

China juga memiliki beberapa ekspektasi lain perihal hubungannya dengan Asia Tenggara.⁹⁸ Beijing tidak mengharapkan penempatan basis militer di Asia Tenggara seperti yang Uni Soviet coba dirikan di Vietnam setelah 1978. China juga tidak berharap adanya pemusatan strategis di sub-kawasan Asia Tenggara yang nantinya dapat merusak kepentingan keamanan China atau bahkan mempertanyakan status China di kawasan. Terakhir, China juga berharap akan absennya konflik di antara negara anggota ASEAN yang secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi hubungan ekonomi China dengan ASEAN.

Sepanjang pertengahan tahun 1990an memang tidak ada konflik atau pertikaian besar terjadi di antara negara anggota ASEAN yang berpengaruh besar terhadap hubungan ekonominya dengan China, tetapi bukan berarti tidak terjadi perubahan pola perdagangan antara keduanya. Pada tahun 1995, komitmen China terhadap keanggotaannya di *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) ditingkatkan. Tahun 1987 komitmen China di GATT hanya termasuk kategori barang, sedangkan pada tahun 1995, komitmen ini mencakup perdagangan bidang jasa, hambatan-hambatan non-tarif dan peraturan terkait dengan hak cipta intelektual. Komitmen China terhadap GATT ini juga berlanjut hingga tahun 1997 saat China memberikan kedaulatan kepada Hong Kong sebagai Daerah Administrasi Khusus. Hong Kong merupakan anggota GATT sejak 23 April 1986 dan dengan berubahnya status Hong Kong menjadi bagian ekonomi tersendiri yang memiliki kebijakan ekonomi mandiri, maka volume perdagangan Hong Kong dihitung sebagai bagian terpisah dari perdagangan China daratan. Ini kemudian berdampak pada pola

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 116-117.

perdagangan China-ASEAN. ASEAN mulai berinvestasi di China dan Vietnam, sementara China banyak menanamkan modal di Hong Kong. Investasi China di Hong Kong mengalir deras terutama dalam bidang jasa finansial dimana Hong Kong memiliki keunggulan komparatif.⁹⁹

Terlepas dari meningkatnya hubungan ekonomi China dan ASEAN setelah ARF, volume perdagangan dan investasi China di ASEAN ataupun sebaliknya sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 1995, netto investasi asing langsung (*net FDI*) China di ASEAN hanya berjumlah sekitar US\$ 114,36 juta.¹⁰⁰ Ini berarti jauh tertinggal dibandingkan investasi yang ditanamkan oleh Jepang, Amerika, Uni Eropa, dan bahkan Australia, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Hal yang harus ditandai adalah bahwa baik China maupun ASEAN sama-sama belum menjadikan satu sama lain mitra perdagangan yang terpenting.

Tahun 1997, krisis finansial yang bermula di Thailand, melumpuhkan perekonomian Asia dan berpengaruh terhadap hubungan perdagangan ASEAN dan China. Krisis ini tidak saja menimpa negara-negara ASEAN tetapi juga Jepang, Korea Selatan dan Hong Kong. Terlepas dari fakta bahwa China bergantung pada pinjaman bank asing sejak Desember 1994, ekonomi China tidak ikut terkena dampak buruk krisis finansial. Jepang yang tadinya dianggap sebagai pemimpin ekonomi di Asia juga tidak mampu memimpin negara-negara di Asia untuk keluar dari krisis sehingga secara otomatis harapan pun jatuh ke China.¹⁰¹ Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara secara umum menurun cukup drastis. Persentase pertumbuhan PDB Thailand turun dari 6.7% (1996) menjadi -0.4% (1997) dan -3 (1998), sedangkan PDB Indonesia pada tahun yang sama berturut-turut turun dari 7.8%, 4.7%, dan -5%.¹⁰² Dampak krisis finansial yang relatif kecil terhadap perekonomian China membuat China calon ‘pemimpin’ baru di Asia. Peran China

⁹⁹ *Asian Development Outlook 1994, Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁰⁰ *Statistics of Foreign Direct Investment in ASEAN 2000 Edition*. (ASEAN Sekretariat: 2001), hlm. 20.

¹⁰¹ Zainuddin Djaffar, *Rethinking the Indonesian Crisis*. (Pustaka Jaya: 2006), hlm. 85.

¹⁰² Zainuddin Djaffar, *Op.Cit.*, hlm. 93.

menjadi penting dengan melemahnya Jepang dan hilangnya kepercayaan negara-negara Asia Tenggara terhadap bantuan yang diberikan IMF.

Selain menghadapi krisis finansial Asia, pada akhir tahun 1990an China banyak disibukkan oleh persoalan domestiknya. Tahun 1997 Deng Xiaoping meninggal dunia dan di tahun yang sama Hong Kong kembali ke pemerintah China mengakhiri 150 tahun pengawasan Inggris. Setelah kematian Deng Xiaoping kebijakan ekonomi China fokus pada aspek-aspek perekonomian yang rapuh terhadap pasar dan mempertahankan posisi yang lebih aman di dunia. Selain itu China juga mempersiapkan diri untuk menjadi anggota WTO.

2.3. China Pasca Keanggotaan WTO dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Ekonomi China dan ASEAN

Bergabungnya China dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan bentuk komitmen China terhadap transisi ekonominya ke ekonomi yang berorientasi kepada pasar. Keanggotaan China di WTO bukan saja berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonominya sendiri melainkan juga berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan perpolitikan internasional. China juga melengkapi peran dan fungsi WTO sebagai organisasi tingkat dunia dan ini berimplikasi terhadap kelangsungan ekonomi negara-negara anggota WTO lainnya. Setelah 15 tahun masa negosiasi yang panjang China menjadi anggota WTO yang ke 143 pada bulan Desember tahun 2001.

Perjuangan China untuk menjadi anggota WTO bukanlah hal yang mudah karena China harus menempuh jalan panjang dan melalui proses negosiasi yang berliku. Pada tanggal 24 Maret 1948, Pemerintah Nasionalis China menandatangani *Final Act of the United Nations Conference on Trade and Employment* yang diadakan di Havana, Kuba. Sebulan kemudian China menandatangani GATT dan menjadi satu dari 23 anggota pendiri awal. Dua tahun kemudian, China terpaksa mundur dari keanggotaannya di GATT setelah Partai Nasionalis kalah oleh Partai Komunis dalam perang saudara. Pada tahun 1970an China sebenarnya memiliki kesempatan besar

untuk bergabung kembali dengan dengan GATT namun kesempatan itu ditolak oleh Mao karena keanggotaan GATT dianggap sebagai salah satu bentuk kapitalisme barat.¹⁰³

Setelah reformasi ekonomi dimulai, tepatnya pada tahun 1986, China mendaftarkan diri kembali menjadi anggota GATT. Mulai dari sini selama 15 tahun ke depan China berusaha mempelajari peraturan-peraturan GATT agar jika kemudian diterima China akan dapat segera menyesuaikan diri. Untuk menjadi anggota GATT (dan kemudian WTO), negara pelamar perlu mengajukan permohonan tertulis yang kemudian ditujukan kepada panitia penilai. Setelah surat masuk maka panitia kemudian akan membentuk sebuah “kelompok kerja” untuk menyelidiki negara tersebut untuk menilai apakah pelamar layak menjadi anggota. Proses ini juga harus dilalui oleh China, oleh karena itu pada tanggal 13 Februari 1987 China mengumpulkan Memorandum Perdagangan Asing China dan kelompok kerja untuk China didirikan sebulan kemudian. Rapat kelompok kerja China untuk pertama kalinya diadakan pada bulan Oktober di tahun yang sama. Selama tujuh tahun berikutnya 19 rapat lain diadakan untuk mempertimbangkan keanggotaan China. Proses yang relatif panjang dan memakan waktu lebih dari 10 tahun ini adalah karena pertimbangan sistem ekonomi China. Sistem ekonomi China yang sifatnya direncanakan dan dikontrol oleh pusat membuat China sulit diterima karena sebagian besar anggota terdahulu GATT menganut sistem ekonomi terbuka yang berorientasi pada pasar.

GATT resmi digantikan dengan WTO mulai tanggal 1 Januari 1995 dan ini membawa perubahan terhadap status China di organisasi tersebut. Saat itu China masih belum juga menjadi anggota karena tidak adanya dukungan dari *major power* seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun pada tanggal 11 Juli status China meningkat menjadi negara ‘pemerhati’ di WTO dan beberapa bulan kemudian status lamaran China berubah dari negara pelamar GATT menjadi negara calon anggota WTO dan ini berarti China mulai dicanangkan menjadi anggota WTO. China

¹⁰³ Hui Feng, *The Politics of China's Accession to the World Trade organization: The Dragon Goes Global*. (Routledge: 2006), hlm. 53.

berusaha keras untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai calon anggota yang layak memasuki WTO. China menggunakan kekuatan ekonominya sebagai sebuah strategi politik yang kemudian sukses menarik dukungan banyak negara anggota WTO. Strategi yang dimaksud adalah dengan bergabungnya China dengan Program Penyelamatan IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dihantam krisis finansial pada tahun 1997. China melaksanakan komitmennya dengan mendonasikan 4 milyar dolar. China juga bergabung dengan ASEAN+3 bersama Jepang dan Korea Selatan untuk mengangani permasalahan perdagangan dan moneter yang disebabkan oleh krisis finansial tersebut. Di satu sisi, ini menciptakan citra baru China sebagai negara *major power* baru yang bisa diandalkan terutama bagi negara-negara Asia Tenggara yang paling parah dihantam krisis. Bagi negara-negara lain, ini menunjukkan kesungguhan China untuk mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi dunia.

Kesungguhan China untuk menjadi anggota WTO semakin dipertimbangkan dengan diumumkannya agenda kebijakan pemimpin China yang baru, Zhu Rongji, untuk mereformasi perusahaan-perusahaan negara China.¹⁰⁴ Krisis finansial Asia telah memperlambat pertumbuhan ekonomi China oleh karena itu kebijakan-kebijakan baru harus diimplementasikan untuk merangsang ekspor dan menarik FDI. Pada pertemuan kelompok kerja China yang ke-18 tanggal 17 September 2000, 1500 halaman perjanjian multilateral China diloloskan.¹⁰⁵ Akhirnya, pada Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-4 di Doha, Qatar, tanggal 11 November 2001, China menandatangani perjanjian keanggotaan dan secara resmi menjadi anggota WTO yang ke 143. Bergabungnya China dengan WTO menjadi tanda kesiapan China untuk berinteraksi dan mempererat kerjasama terutama dengan *major power*. Secara otomatis ini membuat China menjadi 'lebih terlihat' oleh dunia khususnya oleh negara-negara non-komunis sebagai bentuk keseriusan untuk menjadi ekonomi yang berorientasi pada pasar. Ini juga membuat Beijing menjadi target mitra ekonomi

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁰⁵ *Ibid*.

negara-negara yang berada di kawasan baik karena alasan ekonomi maupun alasan politik.

Hasil dari kesepakatan dengan WTO adalah China setuju untuk berkomitmen dalam membuka dan meliberalisasi rezimnya dalam rangka berintegrasi dengan perekonomian dunia dan menawarkan lingkungan yang lebih mudah diprediksi bagi perdagangan dan investasi sesuai dengan regulasi WTO. Beberapa komitmen China, seperti yang diungkapkan WTO, adalah sebagai berikut; 1) China akan memberlakukan perlakuan non-diskriminatif kepada seluruh anggota WTO. Seluruh individu dan perusahaan, termasuk yang tidak berinvestasi dan terdaftar di China akan diperlakukan tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan kepada perusahaan di China berkenaan dengan hak untuk berdagang, 2) China akan menghilangkan praktik *dual pricing* serta perbedaan dalam perlakuan yang diberikan kepada barang yang diproduksi untuk dijual di Cina dibandingkan dengan yang diproduksi untuk ekspor, 3) Kontrol harga tidak akan digunakan untuk tujuan melindungi industri domestik dan penyedia jasa, 4) Kesepakatan WTO akan diimplementasikan oleh China secara efektif dan seragam dengan cara merevisi peraturan domestik yang ada dan memberlakukan undang-undang baru yang sesuai dengan perjanjian WTO, 5) Setelah tiga tahun menjadi anggota, seluruh perusahaan memiliki hak untuk mengimpor dan mengekspor seluruh barang dan perdagangan di seluruh wilayah pabean dengan pengecualian terbatas, 6) China tidak akan memberikan subsidi ekspor apapun bagi produk pertanian.¹⁰⁶

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, China telah memperkenalkan perubahan-perubahan hukum yang ekstensif, terutama mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan investasi asing.¹⁰⁷ Setelah menjadi anggota WTO, China menyatakan komitmennya untuk terus menyelaraskan pasar ekonomi dan sistem hukumnya dengan lingkungan internasional yakni dengan merevisi atau menghapuskan 3.000 hukum nasional dan 200.000 hukum daerah agar

¹⁰⁶ WTO News, *WTO Successfully Concludes Negotiations on China's Entry* (2001). Diakses dari http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm, tanggal 15/3/2011.

¹⁰⁷ N. Mark Lam and John L. Graham, *China Now*. (PT Elex Media Komputindo: 2007), hlm. 109.

sesuai dengan ketentuan WTO dan hukum internasional.¹⁰⁸ Lingkungan bisnis telah berubah dari yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan kemudian dilakukan bersama oleh perusahaan milik pemerintah dan swasta.¹⁰⁹

Usaha milik swasta mulai disahkan sejak tahun 2002. Pengesahan terhadap kepemilikan swasta ini merupakan sesuatu yang esensial bagi China dengan mendesaknya kebutuhan negara untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta. Biro Statistik China mengategorikan usaha swasta ke dalam beberapa kelompok; perusahaan swasta milik warga domestik, perusahaan swasta milik warga asing, dan perusahaan swasta gabungan milik warga domestik dan asing.¹¹⁰ Sejauh ini, lebih dari 50% ekspor dilakukan oleh perusahaan multinasional asing yang beroperasi di China dan telah menjadi motor penggerak ekonomi China.¹¹¹ Peran perusahaan swasta di China tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan skala besar saja namun juga termasuk di dalamnya Usaha Kecil Menengah dan juga Bisnis Swasta Daerah yang dikenal dengan nama *Township and Village Enterprises (TVE)*. Hingga saat ini lebih dari dua pertiga produksi PDB China dikuasai oleh swasta.¹¹² Perusahaan swasta yang berinvestasi di China banyak yang datang dari negara-negara maju seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang. Ketika mereka mengekspor produk mereka dari China maka otomatis ekspor tersebut akan terhitung sebagai ekspor China sehingga ekonomi China semakin maju dan negara-negara maju tersebut harus mengalami defisit perdagangan dengan China.

Keanggotaan China di WTO dan konsistensinya menjalankan kesepakatan membuat perekonomian China meroket. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2005, ekspor China naik sekitar 25 kali lipat.¹¹³ Kemajuan ekspor terutama didorong oleh sektor manufaktur yang sejak tahun 2000 sampai 2005 menguasai 32% dari total PDB dan

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Taufik Adi Susilo, *China Connection*. (Ar-Ruzz Media Group: 2008), hlm. 80.

¹¹¹ Shenkar, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹¹² Susilo, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹¹³ Robert C. Feenstra and Shang-Jin Wei, Ed., *China's Growing Role in World Trade*. (The University of Chicago Press: 2010), hlm. 137.

89% dari total ekspor produk *merchandise*.¹¹⁴ Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN dan negara berkembang lainnya, pertumbuhan sektor manufaktur China adalah yang tertinggi.

Tabel 2.4 Spesialisasi dalam manufaktur negara-negara berkembang (2000-2005)
(Dalam persen)

Negara	Manufaktur (% Ekspor <i>Merchandise</i>)	Manufaktur (% PDB)	Negara	Manufaktur (% Ekspor <i>Merchandise</i>)	Manufaktur (% PDB)
China	88.21	32.28	India	75.30	15.79
Filipina	85.83	22.56	Sri Lanka	74.93	16.12
Pakistan	84.96	15.91	Thailand	74.23	32.60
Hungaria	83.09	23.48	Ukraina	68.89	24.99
Meksiko	82.65	19.96	Moroko	62.55	56.22
Turki	80.14	15.48	Afrika Selatan	56.22	19.36
Rumania	79.85	24.11	Brazil	54.18	-
Polandia	78.32	18.66	Indonesia	52.15	27.62
Malaysia	78.26	30.23	Vietnam	46.47	18.47

Sumber: Data dipilih dari Robert C. Feenstra and Shang-Jin Wei, *China's Growing Role in World Trade*. (The University of Chicago Press: 2010), hlm. 139.

Dengan meroketnya sektor manufaktur kebutuhan China terhadap bahan mentah meningkat secepat pertumbuhan ekspornya.¹¹⁵ Hal ini membuat ASEAN sebagai sumber bahan mentah sekaligus pasar bagi produk manufaktur China yang sempurna. Sejak awal tahun 1990an mayoritas produk impor China yang masuk ke ASEAN berasal dari sektor manufaktur. Beberapa diantara produk manufaktur itu adalah mesin elektronik, perekam suara, reaktor nuklir, produk rokok, bahan pakaian, perahu dan kapal, berbagai alat pengukur dan timbangan, bahan-bahan kimia organik. Yang menarik adalah peningkatan signifikan volume impor produk-produk tersebut sejak keanggotaan China di WTO. Hubungan perdagangan bilateral China-ASEAN

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Barry Eichengreen, *et. al.*, Ed. *China, Asia, and the New World Economy*. (Oxford University Press: 2008), hlm. 88.

pertumbuhan tahunan rata-ratanya adalah sebesar 26.96% dari tahun 2000 sampai 2005 dan selama periode 1990 sampai 2005, perdagangan China-ASEAN tingkat tahunan rata-ratanya berada di angka 21.47%, bandingkan dengan pertumbuhan total perdagangan internasional China yang tumbuh 18.22%.¹¹⁶

Setahun sebelum China menjadi anggota WTO, China mulai melancarkan strateginya untuk merangkul Asia Tenggara. Perdana Menteri China kala itu, Zhu Rongji, menawarkan kerjasama yang lebih erat dengan ASEAN dengan cara mengadakan kerjasama perdagangan bebas. Usul ini dikemukakan pada Pertemuan Puncak ASEAN yang ke-6 dan setahun kemudian, tahun 2001, para pemimpin ASEAN dan China merancang proposalnya di Brunei. Pada bulan November tahun 2002, pada Pertemuan Puncak ASEAN kedelapan di Kamboja, kedua pihak menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China*).

Latar belakang dari keinginan China untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN harus dilihat jauh ke beberapa tahun sebelumnya yakni ketika China meluncurkan kebijakan luar negerinya antara tahun 1982 hingga 1993. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah China kala itu adalah Kebijakan Luar Negeri Bebas Damai.¹¹⁷ Tujuan yang ingin dicapai pemerintah China melalui kebijakan ini adalah: 1) Mencapai lingkungan internasional yang damai guna menjamin pembangunan ekonomi China, serta mempertahankan rejim komunisme; 2) Mempromosikan pertukaran ekonomi untuk memperluas kekuatan nasional China secara menyeluruh; 3) Menghapuskan persepsi China sebagai ancaman yang kerap muncul di negara-negara lainnya di Asia.¹¹⁸ Kebijakan ini pada awalnya memang tidak ditujukan secara khusus kepada ASEAN, namun kebijakan ini semakin jelas implementasinya setelah China menjadi anggota WTO dan kemudian mengajukan proposal kerjasama perdagangan bebas dengan ASEAN. Sebenarnya, sebelum ACFTA pun China sudah mengadakan kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN dalam bidang

¹¹⁶ Saw Swee-Hock, *Op. Cit.*, hlm. 72.

¹¹⁷ Yu-Shek Cheng dalam Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹¹⁸ Ministry of Foreign affairs of the PRC dalam Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 26.

ekonomi dan perdagangan, namun China yakin bahwa kerjasama perdagangan bebas akan mempererat kerjasama yang sebelumnya terjalin dan akan meningkatkan volume perdagangan dengan dihapuskannya tarif.

Skema kerjasama perdagangan bebas China-ASEAN tidak semata digerakan oleh logika ekonomi saja namun juga karena alasan-alasan lain. Setidaknya terdapat tiga motif China di balik proposal FTA China-ASEAN yakni motif ekonomi, motif politik, dan sekuritas energi China. Pertama, China melihat ASEAN sebagai sumber daya bahan baku dan mentah yang diperlukan China terutama untuk terus menjalankan produksi manufakturnya. Selain itu China juga melihat ASEAN sebagai pasar yang besar bagi produk-produk ekspornya. Investasi menjadi alasan lainnya. Sejak bangkitnya ekonomi China, negara ini telah menjadi salah satu sasaran investasi asing langsung terbesar di dunia. Dengan menarik ASEAN sebagai mitra dagang, China berharap akan menarik lebih banyak lagi investasi yang masuk baik dari luar kawasan maupun dari ASEAN sendiri. Sejak ACFTA direncanakan, China mulai banyak menarik penanaman modal asing dari ASEAN terutama dari Singapura. Pada tahun 2005 sebanyak \$ 38,22 milyar nilai modal asing datang ke China dari ASEAN dan 80%nya datang dari Singapura.¹¹⁹

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa hal sebaliknya juga terjadi. Persentasi penanaman modal asing dari China membanjiri ASEAN. Berdasarkan data badan statistik ASEAN, investasi asing langsung yang masuk ke ASEAN melambung tinggi dari 2002 ke 2003. Negara dengan lonjakan penanaman modal asing terpesat ke ASEAN adalah China dan Amerika Serikat. Seperti yang kita dapat lihat di tabel investasi langsung China di ASEAN melonjak dari US\$ -71,9 juta menjadi US\$ 186,6 juta. Peningkatan ini terjadi pada tahun 2003, dua tahun setelah China menjadi anggota WTO dan setahun setelah China dan ASEAN menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Keseluruhan antara ASEAN dan China.

¹¹⁹ China Daily (2006) dalam Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Tabel 2.5 Arus investasi asing langsung ke ASEAN oleh negara asal (2002-2009)
(Dalam juta dolar)

Negara Asal	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2002-2009
ASEAN	3,812	2.702	2.958,6	4.060,3	7.755,6	9.682	10.461	4.428	45.861
Asian NIEs	1,110	1,348	1,638,8	8,888	3,248.8	4,995.9	4,775	3,691	21,698
China	-71,9	186.6	735	608,4	1,045.6	1,684.3	2,109	1,509	7,807.1
India	94.5	102,4	81,9	417,5	-282	1,466.2	698.6	983.6	3,562.8
Jepang	3,026	3,908	5,667.4	6,644.7	10,439	8.828.7	4,657	5.308	48,481
UE	3,743	6,679.2	11,270.2	11,289.5	13,159	17,765.5	9,520.1	7,297.2	80,724.3
Kanada	376.6	101	852.6	740.7	255	394.1	799.4	310.9	3,830.2
AS	-212	1,494.7	4,384.4	3,216.4	3,018.3	8,067.6	5,132.6	3,357.7	28,458.8
Australia	80.6	156.7	490	212.2	317	1,491.5	919.7	700.9	4,368.6

NIEs: Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010, *op.cit.*, hlm. 110.

Motif ekonomi China yang lain dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN adalah karena perjanjian perdagangan bebas bilateral adalah bentuk komitmen China terhadap keanggotaannya di WTO. Anggota WTO diharapkan mengadakan kerjasama perdagangan bebas dengan anggota lain dalam rangka mempromosikan sistem perdagangan global. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan banyak waktu serta kesiapan dan latihan yang mantap. Latihan ini dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perdagangan tingkat kawasan terlebih dahulu sebelum akhirnya bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih maju lagi.¹²⁰ ACFTA sebenarnya merupakan “batu pijakan” bagi China sebelum maju ke arah perjanjian perdagangan dengan kawasan yang lebih luas, misalnya dengan seluruh Asia atau bahkan Asia Pasifik.

Selain motif ekonomi, China juga memiliki beberapa motif politik. ACFTA dapat dilihat sebagai bagian dari usaha China untuk mendapatkan *power* yang lebih besar di Asia Timur. Dengan melesatnya perekonomian, China juga telah meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan cara menaikkan pengeluaran militernya. Tetapi China menyadari bahwa kenaikan ini masih belum cukup untuk mengimbangi pengeluaran militer Amerika Serikat. Yang dapat dilakukan adalah

¹²⁰ Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 17.

dengan meningkatkan pengaruh yang lebih besar dan kuat di Asia dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar lagi. Bersama-sama ASEAN, China membentuk kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia. Selain itu, kedua pihak memiliki kesempatan untuk menciptakan sebuah pasar tunggal yang akan jadi sangat menarik bagi pasar besar lainnya seperti Amerika dan Uni Eropa. China berharap dengan bekerjasama dengan ASEAN bersama keduanya akan memiliki posisi tawar yang lebih besar di pasar global. oleh karena itu, mengadakan persekutuan dengan ASEAN adalah sebuah pilihan yang rasional terutama mengingat dua pemain utama lain di kawasan, Jepang dan Korea, tidak bersedia untuk mengadakan kerjasama perdagangan bebas dengan China karena alasan-alasan ekonomi dan politik.¹²¹

Pasang surutnya hubungan China dengan AS terutama dalam ekonomi dan sengketa perdagangan, membuat China harus memikirkan strategi yang dapat memperkuat posisi China di dunia. Dengan menggandeng ASEAN, China akan menampilkan sosok pemimpin baru ekonomi Asia yang hidup berdampingan baik dengan negara tetangga dan “halaman belakangnya”.

Motif terakhir China di balik ACFTA adalah sumber daya alam dan ketahanan energi. Sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat di dunia, China membutuhkan banyak sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan menjaga roda perekonomian tetap berputar. Dengan masifnya pertumbuhan industri manufaktur China, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, China haus akan sumber daya alam dan energi. Ekspor dari ASEAN yang sebagian besar terdiri dari minyak mentah, gas alam cair, produk pertanian dan pertambangan cocok dengan kebutuhan China. ASEAN juga melengkapi kebutuhan China akan bahan-bahan mentah dan *intermediate goods*.¹²² Oleh karena itu China menyebarkan perusahaan minyaknya di Asia Tenggara demi ekspansi ekonomi dan pencarian energi.

Pencarian energi juga dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan ASEAN. Ada beberapa kerjasama bilateral yang dilakukan China dengan negara anggota ASEAN; 1) Pembelian lahan minyak Widuri dan Tinta di Indonesia senilai

¹²¹ Saw Swee-Hock, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹²² *Ibid*, hlm. 8.

585 juta dolar AS oleh *China National Offshore Oil Corporation*, 2) Kontrak senilai 950 juta dolar AS oleh *Shanghai Baosteel Group Corporation* dan *Jinchuan Nonferrous Metal Corporation* untuk merehabilitasi pabrik nikel di Filipina, 3) Komitmen sebesar 500 juta dolar AS oleh CITIC (dana investasi milik negara) dan berinvestasi di bidang perkebunan minyak sawit di Indonesia, 4) Proyek 1,5 milyar dolar AS dalam aluminium di Vietnam, dan 5) Hak eksplorasi selama 30 tahun atas 800 juta ton tambang potasium di Laos.¹²³

Sampai saat ini kemajuan ACFTA telah melalui tahap-tahap berikut; 1) China dan Thailand menandatangani *China-Thailand Early Harvest Program Agreement* pada Juni 2003, 2) Beberapa bulan kemudian pada bulan Oktober 2003, China-Thailand mempelopori diterapkannya tarif nol persen bagi 180 produk pertanian pada perjanjian yang telah disebutkan pada poin pertama, 3) Pada Pertemuan Puncak ASEAN-China ke-tujuh di Bali 2003, keduanya menandatangani *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*. Protokol ini untuk memuluskan jalan bagi implementasi penuh *Early Harvest Program* (EHP) mulai 1 Januari 2004, sebagai langkah awal ACFTA, 4) Januari 2004, EHP diresmikan mencakup tarif khusus bagi lebih dari 500 produk pertanian, 5) Juni 2004, Singapura masuk ke dalam *China-Thailand EHP*, 6) Pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-8 tahun 2004 di Vientiane, keduanya menandatangani *Agreement on Trade in Goods* dan *Agreement on Dispute Settlement Mechanism*, 7) Juli 2005, China-ASEAN memulai penurunan tarif bagi 7000 komoditi perdagangan, 8) Perjanjian perdagangan dalam bidang jasa China-ASEAN pada 14 Januari 2007, 9) Perjanjian investasi pada 15 Agustus 2009, dan 10) Pada Januari 2010, ACFTA telah dimulai bagi enam negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, dan Filipina).¹²⁴

Hubungan China-ASEAN berkembang pesat sejak keanggotaan China di WTO. Ini ditandai dengan penurunan tarif impor sejak 2002 sebagai persiapan bagi

¹²³ Inayati, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 47-48.

¹²⁴ Poin 1-7 dikutip dari ASEAN Sekretariat dalam Inayati, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 55-56, dan poin 8-10 diakses dari <http://www.aseansec.org/19105.htm>, 22/3/2011.

dukungan pembentukan kawasan perdagangan bebas China-ASEAN.¹²⁵ Contohnya adalah yang terjadi dengan Thailand. Sejak Kesepakatan Percepatan Penghapusan Tarif (ACTE— *Agreement on Accelerated Tariff Elimination*) dengan China dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004, impor barang-barang China di Thailand meningkat sebanyak 180%.¹²⁶ Secara otomatis pasar Thailand dibanjiri oleh produk-produk impor dari China. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara ASEAN lainnya. Sebaliknya, China juga menawarkan pasarnya yang besar bagi impor dari negara ASEAN. Pada *China-ASEAN Exposition* (CAEXPO) yang diadakan pada bulan Oktober 2005, China telah menawarkan penurunan tarif bagi ASEAN dan China memastikan bahwa produksi pertanian, energi, dan produk elektronik ASEAN mendapatkan tempat di pasar China.¹²⁷

Secara keseluruhan, sejak China menjadi anggota WTO dan proposal ACFTA diajukan, ASEAN mengalami defisit perdagangan dengan China (lihat tabel 2.6). Tetapi, data menunjukkan bahwa China juga mengalami defisit perdagangan dengan ASEAN dalam beberapa produk seperti minyak mentah, karet, dan tembaga (lihat tabel 2.7).

Tabel 2.6 Ekspor dan impor ASEAN dengan China pasca WTO (2002-2009)
(Dalam juta dolar)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ekspor ASEAN ke China	19,547.5	29,059.9	41.351.8	52.257.5	65,010.2	77.945	87,594.6	81.591
Impor ASEAN dari China	23,212.2	30,577	47,714.2	61,136.1	74,951	93,172.7	109,289	96,594.3

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010, *op.cit.*, hlm. 71.

¹²⁵ Zainuddin Djaffar, *Indonesia, ASEAN, & Dinamika Asia Timur*. (PT Dunia Pustaka Jaya: 2008), hlm. 129.

¹²⁶ Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹²⁷ Dharmawan, *Op. Cit.*, hlm. 144.

Perdagangan barang antara China dan ASEAN meliputi produk hasil pertanian, minyak dan gas, peternakan, kayu, kertas, peralatan mesin dan elektronik, pakaian jadi, alas kaki, plastik, kulit, makanan jadi, alat transportasi, alat-alat komunikasi, batu bara, dan alat-alat transistor dan semikonduktor. Dengan produk-produk seperti minyak mentah, karet, tembaga, dan plastik, China mengalami defisit perdagangan dengan ASEAN, namun untuk produk-produk lain seperti peralatan mesin dan produk manufaktur lainnya, China mengungguli ASEAN. Yang perlu dicatat adalah China hampir masuk ke dalam seluruh daftar lima besar pasar ekspor ASEAN dan negara pemasok utama 20 komoditas utama ASEAN (lihat tabel 2.8).



Tabel 2.7 10 Komoditas ekspor dan impor utama ASEAN-China dengan 2 digit *HS Code** (2009) (*Nilai* dalam juta dolar dan *saham* dalam persen)

Komoditas Ekspor ASEAN ke China				Komoditas Impor ASEAN dari China			
HS	Komoditas	Nilai	Saham	HS	Komoditas	Nilai	Saham
85	Peralatan elektronik, peralatan suara dan pertelevisian.	21,630.2	26.5	85	Peralatan elektronik, peralatan suara dan pertelevisian.	28,424.1	29.4
84	Reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanik, dan bagiannya.	12,295	15.1	84	Reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanik, dan bagiannya.	23,191.2	24
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk hasil penyulingannya, zat bitumin, dan lilin mineral.	11,212	13.7	27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk hasil penyulingannya, zat bitumin, dan lilin mineral.	5,658	5.9
40	Karet dan produk hasilnya.	5,284.5	6.5	73	Barang-barang dari besi dan baja.	3,214.2	3.3
15	Lemak dan minyak hewan atau sayuran, produk lemak yang dapat dimakan, hewan atau sayuran.	4,866.2	6	72	Besi dan baja.	2,395.6	2.5
39	Plastik dan produk hasilnya.	3,951.8	4.8	39	Plastik dan produk hasilnya.	1,973.6	2
29	Bahan kimia organik.	3,431.3	4.2	29	Bahan kimia organik.	1,930.5	2
90	Optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah.	1,187.3	1.5	90	Optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau bedah.	1,789.6	1.9
26	Bijih, terak, dan abu.	1,046.5	1.3	28	Kimia anorganik, senyawa organik atau anorganik dari logam mulia dan logam langka-bumi, dari radioaktif.	1,378.3	1.4
38	Bermacam-macam produk bahan kimia.	982.8	1.2	87	Kendaraan, (bukan kereta api, trem, rel), bagian&aksesorinya.	1,298.9	1.3
	Total	65,887.6	80.8		Total	71,254	73.8

*HS: *Harmonized system*, kode barang.

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm. 86.

Tabel 2.8 Top 5 pasar dan pemasok 10 komoditas ASEAN (2009)

1. Kode SITC: 776	2. Kode SITC: 334	3. Kode SITC: 333	4. Kode SITC: 764	5. Kode SITC: 759
Transistor, semi-konduktor, perlengkapan, katup, etc.	Minyak bumi dan produknya.	Minyak mentah.	Peralatan komunikasi, NES, & suku cadang.	Aksesoris & suku cadang mesin kantor & pemroses data otomatis.
Negara Saham	Negara Saham	Negara Saham	Negara Saham	Negara Saham
Pasar Utama	Pasar Utama	Pasar Utama	Pasar Utama	Pasar Utama
HKG 21.3 ASEAN 19.6 China 16.3 UE 27 12 Korsel 8	ASEAN 48.1 HKG 12.3 AUS* 8.8 China 7.8 UE 27 3.6	ASEAN 36 AUS 15.8 China 12.6 Korea 10.9 Jepang 9.7	ASEAN 24.4 AS 17.7 UE 27 15.7 HKG 11.6 Jepang 8.1	ASEAN 30.9 UE 27 14.9 AS 13.4 China 12.1 HKG 8.7
Pemasok Utama	Pemasok Utama	Pemasok Utama	Pemasok Utama	Pemasok Utama
ASEAN 26.5 AS 13.6 Korsel 13 Jepang 12.2 UE 27 9.2	ASEAN 41.5 Korea 7.2 China 7.1 India 4.4 Jepang 4.4	SA** 25 UAE*** 19.1 ASEAN 15.3 Qatar 12 Kuwait 4.7	China 40 ASEAN 13.7 UE 27 9.8 Korea 8.9 Jepang 7.6	ASEAN 34.3 China 31.6 AS 10.4 Jepang 7.3 HKG 5.3

*AUS : Australia

**SA : Saudi Arabia

***UAE : Uni Arab Emirat

6. Kode SITC:752	7. Kode SITC:343	8. Kode SITC: 772	9. Kode SITC: 422	10. Kode SITC:778
Mesin pemroses data Otomatis	Gas alam	Switcher elektrik, relay, sirkuit, NES.	Lemak dan minyak nabati	Mesin listrik
Negara Saham	Negara Saham	Negara Saham	Negara Saham	Negara Saham
Pasar Utama	Pasar Utama	Pasar Utama	Pasar Utama	Pasar Utama
AS 30.1 China 17.4 UE 27 16 ASEAN 11.5 Jepang 7.1	Jepang 47.8 ASEAN 21.7 Korea 17.7 China 5.7 Taiwan 4.3	ASEAN 30.5 AS 23.7 UE 27 9 Jepang 8.5 China 6.5	China 19.3 India 18.7 UE 27 15.6 ASEAN 10.9 Pakistan 5.7	ASEAN 32.6 AS 11.4 UE 27 11 HKG 8 Jepang 7.9
Pemasok Utama	Pemasok Utama	Pemasok Utama	Pemasok Utama	Pemasok Utama
China 51.6 ASEAN 26.5 AS 7.7 UE 27 3.5 HKG* 3.4	ASEAN 69.1 Qatar 6.7 UAE 6 China 5.3 Iran 5.1	ASEAN 27.2 Jepang 21.5 China 18.4 UE 27 8.2 AS 7.9	ASEAN 94.6 India 2 China 1 PNG** 0.5 UE 27 0.5	Jepang 23.9 ASEAN 23.8 China 19.8 AS 7.8 UE 27 7.6

*HKG : Hong Kong

**PNG : Papua Nugini

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

Keseluruhan bab ini pada intinya menggambarkan dinamika politik dan hubungan ekonomi China dan ASEAN sejak awal hubungan perdagangan keduanya terjalin. Bab ini juga menggambarkan usaha serta diplomasi perdagangan China di Asia Tenggara secara umum sejak sebelum China melakukan reformasi ekonominya. Ada beberapa perbedaan yang patut dicatat dalam membandingkan hubungan dagang China dan ASEAN sebelum dan sesudah keanggotaan China di WTO.

Sebelum China menjadi anggota WTO, China mengalami perubahan sistem ekonomi besar-besaran dari sistem ekonomi sosialis menjadi sistem ekonomi pasar sosialis sehingga China menjadi begitu fokus dengan perekonomian domestiknya. Hubungan China dengan Asia Tenggara pada awal kemenangan PKC penuh dengan gejolak dan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik domestik dan ideologi komunis China. Hubungan perdagangan berjalan dengan ‘longgar’ tanpa ada ikatan dan hukum yang jelas. China sempat mengalami periode ‘tanpa hukum’ selama dua puluh tahun, sejak kampanye Anti-Kanan di akhir 1950-an hingga berakhirnya Revolusi Kebudayaan (1966-1976).¹²⁸ Jangankan sistem hukum yang mengatur pola perdagangan asing, bahkan upaya membangun sistem hukum Sosialis pada pertengahan dasawarsa 1950-an terhenti secara mendadak. Sistem ekonomi yang berlaku sifatnya bergantung pada diri sendiri, dimana China tidak bergantung pada perdagangan asing. Dalam sistem yang seperti ini hubungan perdagangan China dengan Asia Tenggara seringkali berjalan secara informal karena pada awal PKC berkuasa sebagian besar negara Asia Tenggara bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan China.

Setelah reformasi ekonomi dimulai, hubungan China dan ASEAN mulai membaik seiring dengan terbukanya ekonomi China dan terjalannya hubungan diplomatik. Volume perdagangan keduanya meningkat dan China berusaha untuk lebih merangkul negara tetangganya sesuai dengan kebijakan politik luar negerinya. Namun, setelah ASEAN berdiri hingga awal dekade 1990-an, China belum menjadikan ASEAN sebagai mitra perdagangan yang penting walaupun China secara politik mengakui pentingnya posisi ASEAN bagi kepentingan dalam negeri China.

¹²⁸ Lam and Graham, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Sejak krisis finansial Asia terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, baik ASEAN maupun China merasakan perlunya hubungan yang lebih erat dengan satu sama lain. ASEAN melihat China sebagai kesempatan untuk membantu mereka keluar dari krisis dan China melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi hegemon ekonomi di Asia dengan melemahnya kekuatan Jepang. China juga menjadikan momen membantu Asia ini sebagai sebuah strategi politik untuk meluruskan jalan China menuju WTO setelah 15 tahun berjuang menjadi anggota.

Setelah menjadi anggota WTO, China merevisi hukum perdagangan asingnya agar sesuai dengan ketentuan WTO. Hubungan perdagangan regional dilandasi oleh hukum perdagangan asing China (2004) dan tertulis dalam bab 1 pasal 5 yang berbunyi, “Republik Rakyat Cina akan, atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, mempromosikan dan mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara dan kawasan lain, masuk ke dalam atau berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan ekonomi regional seperti perjanjian kesatuan pabean (*custom union*), perjanjian perdagangan bebas dan berpartisipasi dalam organisasi ekonomi regional.”¹²⁹ Dengan demikian pasal ini melandasi hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan China dengan ASEAN.

Posisi ASEAN semakin penting bagi China sejak menjadi anggota WTO. Kawasan ini adalah pasar yang sangat strategis bagi produk China. Penting bagi China untuk menjalankan diplomasi komersial yang tepat di kawasan ini. Diplomasi komersial terpenting yang dilakukan China menjelang masuk WTO adalah dengan mengajukan proposal ACFTA. Kerjasama perdagangan bebas dengan ASEAN adalah langkah yang tepat sebelum China melangkah ke FTA yang lebih besar lagi. China juga menunjukkan kesediannya mengadakan kerjasama dan perjanjian ekonomi bilateral dengan negara anggota ASEAN dengan cara berinvestasi besar-besaran di negara-negara tersebut, sesuatu yang belum pernah dilakukan China di tahun-tahun sebelum keanggotaan China di WTO.

¹²⁹ *Foreign Trade Law of the People's Republic of China (2004)*. Diakses dari <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>, tanggal 23/12/2010.

BAB III
DIPLOMASI KOMERSIAL CHINA DI ASEAN MELALUI SEKTOR
PERDAGANGAN BARANG DALAM SKEMA ACFTA

3.1 Kebijakan Umum Perdagangan China yang Melatarbelakangi Diplomasi Komersial China di ASEAN

Masuknya China ke WTO akan mendorong peningkatan perdagangan asing China ke babak yang baru dan mendorong kerjasama perdagangan antara China dan dunia.¹³⁰ Keanggotaan WTO merepresentasikan perubahan mendasar pada kebijakan ekonomi China. China telah mengubah orientasi kebijakan luar negerinya dengan mengefektifkan kerjasama dengan negara-negara dan kawasan berkembang dan salah satunya adalah dengan ASEAN. Salah satu bukti dari keinginan China untuk mengubah sistem ekonominya terutama setelah WTO adalah dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan yang menunjukkan komitmen China terhadap liberalisasi perdagangan.

Pada tanggal 1 Juli 2004 China melegalisir Hukum Perdagangan Asing China¹³¹ (*China's Foreign Trade Law*) yang mengatur bagaimana China melakukan hubungan perdagangan dengan pihak asing. Hukum Perdagangan Asing China ini terdiri dari 11 pasal dan 70 ayat yang membahas setiap detil aturan-aturan perdagangan China yang berlaku bagi China dan mitra dagangnya. Hukum perdagangan ini membahas kerjasama perdagangan dengan pihak asing, ekspor impor barang dan teknologi, perdagangan jasa, perlindungan terhadap aspek-aspek perdagangan dan hak cipta intelektual, investigasi dan pengawasan perdagangan asing, promosi perdagangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan penyelesaian permasalahan seperti *dumping* dalam perdagangan asing. Pada pasal 1 ayat 5, tertulis

¹³⁰ Shi Guangsheng, *Op. Cit.*, hlm. iii.

¹³¹ *Foreign Trade Law* China dipublikasikan oleh Situs Kementerian Perdagangan Asing China dalam Bahasa Mandarin dan Inggris pertama kali pada tanggal 1 Juli 2004. Hukum ini terdiri dari 11 pasal dan 70 ayat. Data diakses dari <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>, tanggal 22/2/11.

bahwa China diperbolehkan untuk melakukan perdagangan dengan pihak asing yang didasarkan kepada prinsip keuntungan bersama, baik secara bilateral, multilateral, maupun dalam berbagai jenis perjanjian kerjasama perdagangan seperti *custom union*, perjanjian perdagangan bebas, maupun organisasi ekonomi regional.

Selain mengeluarkan hukum perdagangan asing, China juga memperkenalkan regulasi ekspor dan impor China.¹³² Regulasi ini terdiri dari 6 pasal dan 67 ayat dan secara umum membahas ketentuan tarif ekspor dan impor barang China. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 3, keputusan penentuan tarif tiap barang yang masuk dan keluar dari dan keluar China berada di tangan Dewan Negara, dengan kata lain negara adalah pemegang keputusan utama. Pemerintah membagi jenis tarif ke dalam beberapa bagian; tarif konvensional, tarif MFN, tarif umum, serta tarif kuota. “Tarif MFN” diterapkan bagi mitra dagang yang merupakan anggota WTO atau yang telah melakukan kesepakatan kerjasama bilateral, “tarif konvensional” diterapkan kepada impor barang yang negara asalnya telah disepakati dalam perjanjian perdagangan dengan China dan mengandung klausa kewajiban preferensial, “tarif khusus” diberlakukan untuk negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan China dan menyepakati klausa kewajiban preferensial khusus pula, sedangkan “tarif umum” diberlakukan untuk barang-barang yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis tarif lainnya.

Pemerintah China tidak hanya mendukung sektor perdagangan dengan mengeluarkan dan mengubah undang-undang perdagangannya, melainkan juga mendukung sektor investasi, baik investasi yang datang ke dalam maupun investasi yang keluar. Pertama, kebijakan investasi dilakukan pemerintah dengan memberikan stimulus-stimulus bagi berbagai sektor untuk menarik investor asing masuk yang bertujuan mengeksport keluar China barang-barang yang diproduksi di China. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang memudahkan investor asing masuk dan

¹³² *Regulations of People's Republic of China on Import and Export Duties Foreign Trade Law* dipublikasikan oleh Website Kementerian Perdagangan Asing China dalam Bahasa Mandarin dan Inggris pertama kali pada tanggal 1 Januari 2003. Data diakses dari: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715851.html>, tanggal 22/2/11.

menanamkan modal seperti pemotongan pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi ke China dengan orientasi ekspor ke luar. China juga mendorong perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi keluar dengan penerapan kebijakan “going global” ke berbagai negara. Kedua, pemerintah mereformasi sistem perpajakan China menjadi lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi China.¹³³ Kategori pajak tidak langsung utama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak usaha, dan pajak konsumsi. Pemerintah menerapkan PPN yang berbeda-beda bagi setiap produk dengan tujuan untuk membatasi ekspor beberapa jenis produk, serta mendorong atau mencegah ekspor demi memastikan persediaan domestik.¹³⁴ Pajak langsung terdiri dari pajak pendapatan perusahaan dan individu. Pajak yang dibebankan kepada perusahaan asing umumnya lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan domestik China, hal ini bertujuan untuk menarik investor asing masuk dan berinvestasi.¹³⁵

Tujuan kebijakan-kebijakan perdagangan China secara umum mencerminkan reformasi ekonomi China yang didukung oleh keanggotaan China di WTO.¹³⁶ Tujuan pertama, untuk mempercepat pembukaan ekonomi China ke dunia. Kedua, untuk mempelajari teknologi asing dari negara lain. Ketiga, membangun perdagangan asing. Keempat, mempromosikan pembangunan ekonomi yang aman. Kelima, untuk mengeratkan sistem perdagangan multilateral. Keenam, kebijakan perdagangan China ditujukan untuk intensifikasi perjanjian perdagangan bebas secara bilateral maupun multilateral dengan mitra perdagangannya. Hukum ini kemudian mendasari setiap kebijakan perdagangan asing yang ditetapkan pemerintah China. Kebijakan ini kemudian juga menjadi landasan bagi China dalam melakukan ekspansi perdagangan dan diplomasi komersial baik dalam tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

Diplomasi komersial China di ASEAN mulai jelas terlihat sejak China menyadari pentingnya merangkul ASEAN dalam kerjasama perdagangan untuk mempertahankan status China di kawasan sebagai hegemon ekonomi. Ekspansi

¹³³ *Trade Policy Review: China 2006* (World Trade Organization and Bernan: 2006), hlm. 16.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 17.

¹³⁵ *Ibid*.

¹³⁶ *Trade Policy Review: China 2008* (World Trade Organization and Bernan: 2008), hlm. 24.

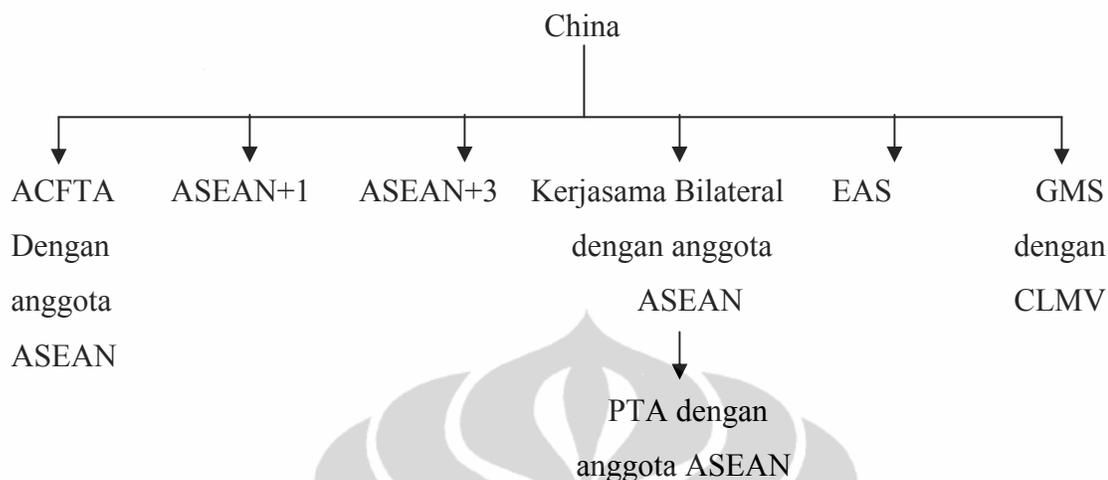
perdagangan di Asia Tenggara dapat menguntungkan China baik secara politik maupun ekonomi dan ini akan meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Asia Tenggara yang telah dimulai sejak China belum menjadi anggota WTO. Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN, pejabat-pejabat China membangun hubungan politik yang lebih dekat dengan ASEAN melalui diplomasi yang efektif dan sering pula diplomasi tingkat tinggi yang memperhatikan berbagai kepentingan negara anggota ASEAN.¹³⁷ China menjalankan diplomasi yang lincah dan aktif dalam menjalin hubungan ekonomi dengan ASEAN baik secara bilateral maupun dengan ASEAN secara institusional.¹³⁸

Kerjasama yang dilakukan China dengan ASEAN pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketakutan ASEAN akan kekuatan ekonomi China yang sangat besar. China melakukan kebijakan-kebijakan yang spesifik kepada ASEAN untuk membantu negara-negara ASEAN menyelesaikan masalah perdagangan dan investasi dan juga membantu ASEAN menjaga stabilitas finansialnya. Para pemimpin China berusaha membangun citra China yang dermawan melalui proposal kerjasama ekonominya. China juga berusaha meyakinkan bahwa pihaknya siap menawarkan kerjasama yang bersifat “menang menang” sehingga ASEAN lebih tenang dan percaya bahwa China yang kuat akan membantu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

Kerjasama ekonomi dengan ASEAN ini diantaranya mencakup ASEAN+1 (ASEAN + China) yang kemudian diantaranya melahirkan ACFTA, ASEAN+3 (ASEAN+ Jepang, Korea Selatan dan China), Kerjasama Perdagangan Bilateral dengan beberapa anggota ASEAN termasuk di dalamnya PTA dengan anggota ASEAN, *East Asia Summit* (ASEAN+ Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru), dan Kerjasama Daerah Aliran Sungai Mekong (China + CLMV). Skema-skema hubungan ekonomi dan kerjasama perdagangan ini dapat diringkas dalam grafik 3.1.

¹³⁷ Inayati, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 95

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 99

Grafik 3.1 Skema hubungan ekonomi dan perdagangan China-ASEAN

Sumber: Elaborasi penulis.

3.2 Diplomasi Komersial China di ASEAN melalui Sektor Perdagangan di bawah Skema ACFTA

Skema kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN adalah skema yang paling banyak dibicarakan. Kerjasama ini mempromosikan China sebagai mitra utama kerjasama eksternal ASEAN dalam lima sektor prioritas yakni, pertanian, sumber daya manusia, teknologi komunikasi dan informasi, investasi, dan pengembangan daerah aliran Sungai Mekong. Beberapa pihak mengklaim bahwa ACFTA pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak, namun sejauh ini implementasi di lapangan menunjukkan bahwa China lebih diuntungkan.¹³⁹ *ASEAN-China Expert Group* pada tahun 2001 memperkirakan dengan masuknya China ke WTO impor China dari ASEAN akan meningkat menjadi US\$ 13,3 milyar antara tahun 2000-2005 dan 4 milyarnya dihasilkan pasca keanggotaan China di WTO.¹⁴⁰ Pernyataan ini terbukti dengan naiknya nilai ekspor dan impor keduanya sebesar

¹³⁹ Michael J. Montesano and Lee Poh Onn Ed., *Regional Outlook: Southeast Asia 2011-2012*. (ISEAS Publishing: 2011), hlm. 4.

¹⁴⁰ Dalam makalah Chia Siow Yue, *ASEAN-China Free Trade Area*. Makalah ini dipresentasikan di Konferensi AEP di Hong Kong, 12-13 April 2004. Diakses dari: <http://www.hiebs.hku.hk/aep/chia.pdf>, tanggal 1/4/11.

empat kali lipat dari US\$ 42,759 milyar pada tahun 2002 menjadi US\$ 178,185 milyar pada tahun 2009.¹⁴¹

China akan mendapatkan banyak keuntungan dari ACFTA. Pertama, Asia Tenggara adalah sumber alternatif bagi kebutuhan energi China. Pencarian China akan minyak dan sumber daya energi lainnya di seluruh dunia telah menjadikan China sebagai negara yang menjalankan apa yang dinamakan dengan *oil-nation diplomacy*. Negara anggota ASEAN yang kaya sumber alam menjadi target impor China untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya. Beberapa perusahaan minyak milik negara China juga beroperasi di negara anggota ASEAN. Kedua, bersama dengan ASEAN China akan membentuk sebuah pasar raksasa yang akan berguna sebagai penarik modal asing yang masuk dari negara-negara ketiga. Keuntungan lainnya adalah China akan mendapatkan sumber pangan dari ekspor ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Walaupun China juga mengekspor produk pertanian ke ASEAN, beberapa produk pertanian keduanya bersifat komplementer karena adanya perbedaan produk. China membutuhkan produk buah-buahan tropis dari ASEAN sementara ASEAN mengimpor sereal, sayur-sayuran, timbal dan seng dari China. Keuntungan lain adalah bahwa China dapat mengalihkan perdagangan dari perdagangan intra negara anggota ASEAN dan dari negara di luar kawasan dengan dihapuskan atau diturunkannya hambatan tarif dan non-tarif.

China menjalankan diplomasi komersial di ASEAN dengan strategi-strategi yang umumnya didasarkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian berdampak pada perdagangannya dengan mitra dagang terkait, yang dalam penelitian ini adalah ASEAN. Strategi pertama China dapat kita analisis dalam Rencana Aksi yang disusun oleh China dan ASEAN pada tahun 2003.

ACFTA merupakan salah satu hasil dari kesepakatan China dan ASEAN dalam melaksanakan “Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis ASEAN-China untuk Perdamaian dan Kesejahteraan (*Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*). Deklarasi ini

¹⁴¹ ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm. 69.

merupakan rencana besar kedua pihak untuk lebih mendalami dan mengeratkan hubungan ASEAN-China yang saling menguntungkan dalam jangka waktu lima tahun yakni tahun 2005-2010.¹⁴² Deklarasi ini dibagi menjadi enam kategori kerjasama yang terdiri dari enam bidang dan salah satunya adalah bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi terbagi lagi ke dalam bidang pertanian, informasi, teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi, Daerah Pertumbuhan China-Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA), dan kerjasama Usaha Kecil dan Menengah. Beberapa pasal dari rencana kerjasama bidang ekonomi ini dengan jelas menunjukkan strategi China untuk memenangkan hati ASEAN dalam rangka ekspansi perdagangannya.

Poin 2.12 dari Rencana Aksi yang membicarakan kerjasama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini membicarakan kemungkinan kerjasama antara UKM China dan ASEAN.¹⁴³ Poin berikutnya menyebutkan tentang program pengembangan UKM ASEAN dimana China berperan sebagai pihak yang menawarkan bantuan untuk pengembangan UKM ASEAN.¹⁴⁴ Niat China ini kemudian diajukan dalam kasus UKM Indonesia. Pada bulan Maret 2010, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, Sandiaga S. Uno memaparkan bahwa bantuan langsung terkait UKM yang ditawarkan China kepada Indonesia berupa skema pengadaan mesin-mesin baru atau revitalisasi maupun bantuan dana serta inovasi baru bagi UKM. Apa yang tampak sebagai sebuah bentuk dukungan China untuk negara anggota ASEAN dalam menghadapi ACFTA sebenarnya adalah sebuah strategi diplomasi perdagangan yang dijalankan

¹⁴² Deklarasi ini ditandatangani pada ASEAN-China Summit yang ke-7 pada tanggal 8 October 2003 di Bali.

¹⁴³ Rencana Aksi atau *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. Bunyi poin 2.12 yang dimaksud adalah “Jointly identify possible areas of cooperation, including promotion of business collaboration, investment and finance, and marketing development, capacity building for SMEs, business matching, and exchange of information on SMEs policies and best practices through seminars, workshops, networking, research and development for SMEs, and promotion of industrial clustering between SMEs of both sides and Promote programmes for enhancing ASEAN Small and Medium Enterprise and Industries’ capacity, technology, financing, business opportunities and market access.” Diakses dari <http://www.aseansec.org/16805.htm>, tanggal 14/2/2011.

¹⁴⁴ *Ibid.*

pemerintah China terhadap ASEAN. Strategi ini dilakukan China guna menciptakan pencitraan yang baik mengenai kebangkitan ekonomi China dan jika negara ASEAN menerima bantuan ini maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor ASEAN ke China.

Di samping menawarkan bantuan kepada UKM ASEAN, China juga melakukan beberapa strategi perdagangan lainnya. Pada poin 4.4.6 Rencana Aksi, China menyatakan kesediannya mendukung Laos dan Vietnam untuk menjadi anggota WTO.¹⁴⁵ Kedua negara ASEAN ini memang bukan anggota WTO, namun China bersedia untuk memberikan perlakuan *Most Favored Nation* (MFN)¹⁴⁶ kepada keduanya. Ini berarti keduanya mendapatkan perlakuan yang sama dari China seperti anggota ASEAN lainnya yang memiliki keanggotaan WTO dengan beberapa pengecualian. Dengan memberikan MFN kepada Laos dan Vietnam, ini berarti China menetapkan kesepakatan tarif dan non-tarif yang sama seperti anggota ASEAN lainnya. Selain itu China juga memberikan akses pasar dan *national treatment* yang sama kepada anggota ASEAN yang non-WTO. Kebijakan ini sesuai dengan pasal 4 ayat 24 Hukum Perdagangan Asing China¹⁴⁷ yang berkomitmen untuk memberikan akses pasar dan *national treatment* kepada seluruh mitra dagangnya sesuai dengan ketentuan WTO. Dengan memberikan perlakuan yang sama China dapat meningkatkan volume perdagangannya dengan CLMV. Adapun pengecualian yang diberikan China kepada anggota non-WTO—misalnya dengan memberikan waktu empat tahun setelah ACFTA berjalan kepada Vietnam untuk menghilangkan restriksi kuantitas impornya—umumnya bertujuan untuk membantu kesiapan negara tersebut untuk bersaing.

Pada poin 6.2 Rencana Aksi ini, China menyatakan komitmennya untuk menyediakan bantuan teknis kepada Sekretariat ASEAN untuk mengkoordinasi dan

¹⁴⁵ Bunyi poin 4.4.6 Rencana Aksi adalah “Support the accession of Laos and Viet Nam to the WTO at the earliest possible time.”

¹⁴⁶ MFN merupakan prinsip WTO yang melarang negara anggota untuk mendiskriminasikan mitra dagangnya. Setiap mitra dagang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

¹⁴⁷ Bunyi pasal 4 ayat 24 adalah, “In respect of international trade in services, the People's Republic of China shall, in accordance with the commitments made in international treaties or agreements to which the People's Republic of China is a contracting party or a participating party, grant the other contracting parties or participating parties market access and national treatment.”

mengimplementasikan butir-butir rencana yang telah disepakati.¹⁴⁸ Poin ini terwujud pada tahun 2005 ketika China memberikan bantuan ekonomi kepada negara anggota ASEAN sebesar 3 milyar dolar.¹⁴⁹ Kemudian pada Forum Kerjasama Perdagangan China-ASEAN tahun 2009, China membicarakan lebih jauh mengenai kesediaan China dalam memfasilitasi perdagangan dengan ASEAN. Forum ini dihadiri oleh 260 delegasi dari pemerintah China, pihak pabean China, perusahaan-perusahaan China dan anggota ASEAN. Rapat konsultasi dengan pihak pabean ASEAN dilakukan oleh China setiap tahunnya dalam rangka menjalankan beberapa proyek gabungan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih baik bagi ASEAN.

Pada Pertemuan Komisi Bersama ke-10 di Indonesia, China menandatangani *Agreed Minutes of The Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* yang merupakan bentuk komitmen China untuk membantu Indonesia dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi sektor perdagangan Indonesia yang terkena dampak ACFTA.¹⁵⁰ Salah satu caranya adalah dengan mendirikan “Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan” yang ditujukan untuk memfasilitasi perdagangan antara China dan Indonesia. China juga mengeksport hasil industri tradisionalnya seperti teknologi pembuatan sutra dan produksi beras hibrida. Guangxi State Farms Group telah membangun industri singkong di Thailand, Laos, dan Myanmar untuk menolong petani-petani di ASEAN meningkatkan keuntungan yang lebih besar dari ACFTA.

Fasilitasi perdagangan menunjukkan keseriusan China dalam menjalankan program kerjasama dengan ASEAN khususnya kerjasama ekonomi di bawah kerangka ACFTA. ASEAN pun diuntungkan dengan adanya bantuan-bantuan perdagangan dari China sehingga mereka menikmati surplus perdagangan dengan China dalam beberapa sektor. China menjalankan diplomasi total di ASEAN untuk menjamin kerjasama ekonomi antara keduanya berjalan lancar.

¹⁴⁸ Bunyi poin 6.2 adalah “Promote programmes for enhancing ASEAN Small and Medium Enterprise and Industries’ capacity, technology, financing, business opportunities and market access.”

¹⁴⁹ David C.Kang, *China Rising : Peace, Power, and Order in East Asia*. (Columbia University Press: 2007), hlm. 132.

¹⁵⁰ “RI, China set up working group to overcome ACFTA’s impact”, 5/4/10, diakses dari <http://antara.co.id/en/news/1270479482/ri-china-set-up-working-group-to-overcome-acftas-impact>

Selain fakta bahwa ACFTA pada awalnya adalah inisiatif pemerintah China, pada tahap awal implementasi pun kerjasama ini dimulai dengan inisiatif pemerintah China dalam menawarkan program EHP, yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi China namun juga sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan politik mengenai status ekonomi China. Program ini diresmikan dengan ditandatanganinya Kerjasama Perdagangan Barang antara ASEAN dan China pada tahun 2004. Pasal 14 perjanjian ini menyatakan bahwa setiap anggota ASEAN mengakui China sebagai ekonomi pasar penuh.¹⁵¹ Pasal ini mengindikasikan bahwa China menginginkan pengakuan ASEAN bahwa China adalah negara dengan sistem ekonomi pasar penuh yang dapat melakukan kerjasama perdagangan dengan ekonomi pasar lainnya

Program ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi produk pertanian ASEAN agar dapat memasuki pasar China tanpa tarif apapun. Produk yang dimaksud meliputi sayuran, buah-buahan, ikan tawar dan ikan laut, ikan asin, dan daging yang diekspor dari negara-negara ASEAN. Program ini dapat dilihat sebagai bentuk diplomasi China untuk meredakan ketakutan ASEAN akan persaingan dengan China yang produknya membanjiri kawasan Asia Tenggara. Dalam jangka waktu dua tahun (2004-2006), penghapusan tarif produk pertanian mencapai 0% dilakukan oleh China.¹⁵² Terdapat sekitar 530 produk yang termasuk dalam program pembebasan tarif EHP. Untuk produk pertanian yang masuk ke dalam daftar sensitif, penurunan tarif akan dimulai pada tahun 2012, dimana semua tarif harus mencapai tingkat tarif tertinggi sekitar 20%.¹⁵³ Setelah itu semua tarif akan diturunkan lagi secara bertahap dan harus mencapai 0-5% pada tahun 2018.¹⁵⁴

¹⁵¹ Pasal yang dimaksud tertulis dalam *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Bunyi pasal 14 ini adalah, "Each of the ten ASEAN Member States agrees to recognise China as a full market economy and shall not apply, from the date of the signature of this Agreement, Sections 15 and 16 of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to the WTO and Paragraph 242 of the Report of the Working Party on the Accession of China to WTO in relation to the trade between China and each of the ten ASEAN Member States." Diakses dari <http://www.aseansec.org>, tanggal 20/4/11.

¹⁵² Pambudi dan Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

Di satu sisi ini merupakan keuntungan bagi ASEAN, namun logika di balik pemberian EHP tidak berhenti sampai disini. China mengetahui dengan pasti kebutuhan tiap-tiap propinsinya, sehingga China pun mengetahui bahwa jika ia membuka pasar seluas-luasnya untuk produk ASEAN, volume impor dari ASEAN tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pasar domestik China yang besar. Selain itu, hukum perdagangan asing China juga telah mengatur sedemikian rupa sehingga produk yang masuk ke China dapat dibatasi jika memang diperlukan.

Pasal 1 ayat 16 poin 8 Hukum Perdagangan Asing China¹⁵⁵ menyebutkan bahwa restriksi pada impor produk pertanian, hewan, dan ikan dalam bentuk apapun diperlukan. Selain peraturan domestik China, salah satu ketentuan perjanjian perdagangan barang ASEAN-China juga menyebutkan hambatan non-tarif seperti kuantitas yang dapat dibatasi jika memang membahayakan negara pengimpor. Peraturan ini dapat menjadi batu sandungan bagi produk yang diimpor dari ASEAN yang sebagian besar memang merupakan produk hasil pertanian. Memang hal yang sama juga dapat terjadi kepada produk China yang masuk ke ASEAN, tetapi ASEAN akan lebih dirugikan karena beberapa alasan. Pertama, terlepas dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 3 perjanjian perdagangan barang ASEAN-China¹⁵⁶ mengenai *safeguard* ACFTA yang dapat diberlakukan kepada salah satu pihak yang ekspornya mengancam pasar domestik negara pengimpor, yang terjadi di pasar adalah membanjirnya produk China di ASEAN dan bukan sebaliknya. Kedua, pasar China yang lebih besar memiliki kemampuan menyerap impor yang lebih besar pula. Kesimpulannya, penghapusan hambatan tarif dan mekanisme *safeguard* ACFTA saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan ekspor ASEAN ke China karena masih harus menghadapi hambatan-hambatan non-tarif yang ditetapkan China dan juga

¹⁵⁵ Bunyi asli pasal 1 ayat 16 poin 8 yang dimaksud penulis adalah “*the restriction on the import of agricultural, animal husbandry or fishery products in any form is necessary.*”

¹⁵⁶ Isi pasal 9 ayat 3 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China* adalah “A Party shall be free to take ACFTA safeguard measures if as an effect of the obligations incurred by that Party, including tariff concessions under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement or this Agreement...”

perjanjian kerjasama perdagangan ASEAN-China. Pada akhirnya, China akan menjadi pihak yang lebih diuntungkan.

Dengan berjalannya EHP, produk-produk pertanian China juga semakin bebas memasuki pasar ASEAN. ‘Diplomasi senyum’ yang diterapkan China melalui EHP mau tidak mau membuat ASEAN membuka pintu pasarnya lebih lebar lagi bagi China. Hasilnya adalah produk pertanian China seperti sayuran dan buah-buahan dengan cepat membanjiri pasar ASEAN. Dalam kasus Indonesia, volume impor Indonesia tumbuh lebih cepat dari volume eksportnya. Di pasar-pasar tradisional dan modern di Indonesia, produk pertanian China seperti sayuran dan buah-buahan terlihat menguasai pasar karena harga yang lebih murah dan kualitas barang yang lebih baik dibandingkan produk lokal. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara ASEAN lainnya yang juga merasa kesulitan bersaing dengan produk China walaupun dalam tingkat ketahanan yang berbeda-beda.

China menyadari bahwa kapasitas tiap negara anggota ASEAN berbeda dalam menghadapi EHP, oleh karena itu China mengadakan Kesepakatan Percepatan Penghapusan Tarif (ACTE) dan PTA dengan beberapa negara anggota ASEAN. Bagi Thailand, sektor pertanian menempati 30% dari total sektor yang akan diuntungkan oleh ACFTA.¹⁵⁷ Dalam perjanjian ini, Thailand memasukkan 242 produk kategori sensitif yang tarifnya akan dipotong hingga mencapai 20% pada tahun 2012 dan 100 produk yang masuk kategori sangat sensitif akan dipotong sebesar 50% pada tahun 2015.¹⁵⁸ Logika percepatan pemotongan tarif ini jelas, semakin cepat penurunan tarif dilakukan, semakin cepat pula Thailand dan China menikmati hasilnya. Selain dengan Thailand, China juga mengadakan PTA dengan tiga negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2005, Wen Jiabao mengumumkan PTA China dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar yang dimulai tanggal 1 Januari 2006.

Kesepakatan-kesepakatan bilateral ini mengacu kepada regulasi ekspor impor China yang menetapkan bahwa tarif khusus dapat diterapkan kepada produk-produk impor yang telah menyetujui perjanjian dagang dengan China yang berisi klausa

¹⁵⁷ Evelyn Goh and Sheldon W. Simon *Ed.*, *China, the United States, and Southeast Asia* (Rotledge: 2008), hlm. 25.

¹⁵⁸ *Ibid.*

kewajiban tertentu.¹⁵⁹ Regulasi tarif dan penerapannya dalam kerjasama bilateral dengan ASEAN menunjukkan bahwa China tidak mau membuang waktu menunggu reduksi atau penghapusan tarif sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, China memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk meningkatkan volume perdagangannya dengan ASEAN.

Program EHP tidak diajukan China tanpa perencanaan yang matang. Salah satu perubahan kebijakan perdagangan China setelah menjadi anggota WTO adalah perubahan kebijakan pada sektor pertanian. Perubahan utama adalah dengan mengganti kebijakan penerapan pajak pada sektor pertanian domestik menjadi kebijakan yang mendukung sektor ini.¹⁶⁰ Bentuk dukungan negara ini adalah dengan menghapuskan sebagian besar pajak pada produk pertanian domestik pada tahun 2006 dan para petani China diberikan bantuan finansial sejak 2004.¹⁶¹ Subsidi bagi sektor pertanian ini mulai berjalan bersamaan dengan dimulainya program EHP.¹⁶² Subsidi ini adalah bentuk antisipasi China terhadap produk pertanian impor yang datang dari ASEAN dan ini juga menjadi bukti bahwa China telah mempersiapkan sektor pertanian domestiknya agar dapat bersaing dengan produk ASEAN. Inilah yang dikhawatirkan ASEAN, yakni bahwa pemerintah China menggunakan seluruh kekuatan negara untuk mendukung penuh perdagangan China.

China menyadari bahwa kontribusi sektor pertaniannya ke total PDB negara mengalami penurunan dan mulai digantikan dengan sektor manufaktur. Kontribusi pertanian China ke total PDB nya menurun dari 13.4% pada tahun 2004 menjadi 11.8% pada tahun 2006 dan 40% pekerja China juga beralih ke manufaktur.¹⁶³ Faktanya adalah negara dengan populasi sebesar China membutuhkan persediaan pangan yang sangat besar. Jika produksi sektor pertanian semakin kecil, maka negara perlu

¹⁵⁹ Bunyi pasal 2 ayat 10 *Regulations of the People's Republic of China on Import and Export Duties* adalah, "The special tariff rate shall be applied to the import goods whose place of origin is a country or region that has concluded with the People's Republic of China a trade agreement that contains clauses of special preferential duty."

¹⁶⁰ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 88.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Pemberian subsidi pada industri domestik merupakan salah satu hambatan non-tarif yang juga diatur dalam ketentuan WTO. Sebelum Putaran Uruguay, tarif adalah satu-satunya hambatan perdagangan.

¹⁶³ *Ibid.*

mengimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan demikian, proposal program EHP adalah sebuah diplomasi perdagangan yang tepat yang dilakukan oleh China mengingat bahwa produk pertanian adalah salah satu produk unggulan bagi sebagian besar negara anggota ASEAN.

Satu hal yang harus diperhatikan dari ekspor impor produk pertanian ASEAN dan China adalah usaha China untuk mengatasi perbedaan tingkat tarif yang ditetapkan oleh kedua pihak. Sebelum EHP diterapkan, rata-rata tarif yang diberikan China kepada produk pertanian ASEAN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diberikan ASEAN kepada produk China yang masuk. Ini juga masih terjadi bahkan setelah China menjadi anggota WTO. Pada tahun 2001 rata-rata tarif produk pertanian yang ditetapkan oleh China adalah sebesar 54%.¹⁶⁴ Setelah menjadi anggota WTO tarif yang ditetapkan China berkurang sekitar setengahnya, namun jika dibandingkan tarif yang ditetapkan ASEAN bagi produk pertanian yang datang dari China, tarif dari China jauh lebih tinggi. Tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara tarif yang ditetapkan kedua pihak baik pada produk pertanian maupun non-pertanian pada tahun 2002.

Tabel 3.1 Tingkat tarif bilateral untuk ASEAN dan China (%)

Tarif ASEAN yang diterapkan kepada China		Tarif China yang diterapkan kepada ASEAN	
Buah/sayuran	5.0	Buah/sayuran	27.4
Batu bara	9.4	Minyak biji-bijian	21.4
Produk makanan	5.0	Produk minyak bumi	8.4
Barang elektronik	4.8	Beras	112.8
Minuman/tembakau	6.2	Bahan kimia/karet/produk plastik	19.2
Mesin	3.4	Barang elektronik	16.6
Rata-rata	2.3	Rata-rata	9.4

Sumber: Chulalongkorn and Monash General Equilibrium Model (CAMGEM), Chulalongkorn University dalam Calla Wiemer and Heping Cao, *Ed., Asian Economic Cooperation*. (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.: 2004), hlm 367.

¹⁶⁴ “China to help push forward Doha round talks”, http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=1741, diakses tanggal 13/4/2011.

Tabel 3.2 *Tariff Equivalents* hambatan non-tarif ASEAN dan China (%)

Tarif ASEAN yang diterapkan pada China		Tarif China yang diterapkan pada ASEAN	
Komoditas lain	13.6	Komoditas lain	76.6
Produk susu	17.0	Beras	100.0
Minuman/tembakau	51.2	Produk logam	83.7
Tekstil	7.3	Produk kulit	76.8
Produk mineral	9.6	Produk hasil hutan	96.8
Rata-rata	9.2	Rata-rata	69.1

Sumber: *Ibid.*

Dalam perjanjian perdagangan bebas, penghapusan hambatan dagang akan menyebabkan ekspansi perdagangan antara China dan ASEAN. Penghapusan ini akan mengurangi ongkos dagang, meluaskan perdagangan di kawasan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi.¹⁶⁵ Melihat jauhnya perbedaan tarif antara ASEAN dan China, maka China sepakat dengan ASEAN untuk menurunkan tarifnya menjadi di bawah tarif MFN China. Hal ini mengacu kepada Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2002. Pasal 6 ayat 3b kesepakatan ini mengatur mengenai reduksi dan eliminasi tarif yang harus dilakukan oleh ASEAN dan China. Pada tahun 2007 tarif produk non-pertanian China telah diturunkan sampai sebesar 8.9% dari 42% tahun 1992 sementara itu produk pertanian tarif telah dipotong menjadi 15.3% dari 54% pada tahun 2001.¹⁶⁶ Pengurangan tarif MFN ini merupakan komitmen China setelah Putaran Doha dilaksanakan. Komitmen ini juga berdampak kepada komitmennya dengan ACFTA. Untuk mendorong perdagangan dengan ASEAN, China kemudian mengurangi dan bahkan mengeleminasi tarifnya yang tinggi terhadap produk ASEAN seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.3 dan 3.4.

¹⁶⁵ Calla Wiemer and Heping Cao, *Ed. Asian Economic Cooperation in the New Millennium: China's Economic Presence*. (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.: 2004), hlm. 367.

¹⁶⁶ "China to help push forward Doha round talks", *Loc. Cit.*

Tabel 3.3 Perbandingan tarif MFN China dan ACFTA dalam EHP

Tarif MFN China	Tarif ACFTA	
	2005	2006
Lebih dari 15%	5%	0%
Antara 5% (inklusif) and 15% (inklusif)	0%	0%
Kurang dari 5%	0%	0%

Sumber: data diakses dari aseansec.org, tanggal 20/4/11.

Tabel 3.4 Perbandingan Tarif MFN China dan ACFTA dalam Kesepakatan perdagangan barang

Tarif MFN China	Tarif ACFTA			
	2005	2007	2009	2010
Lebih dari atau sama dengan 20%	20%	12%	5%	0
Antara 15% (inklusif) dan 20%	15%	8%	5%	0
Antara 10% (inklusif) dan 15%	10%	8%	5%	0
Antara 5% dan 10%	5%	5%	0	0
Kurang dari atau sama dengan 5%	Tetap sama		0	

Sumber: *Ibid.*

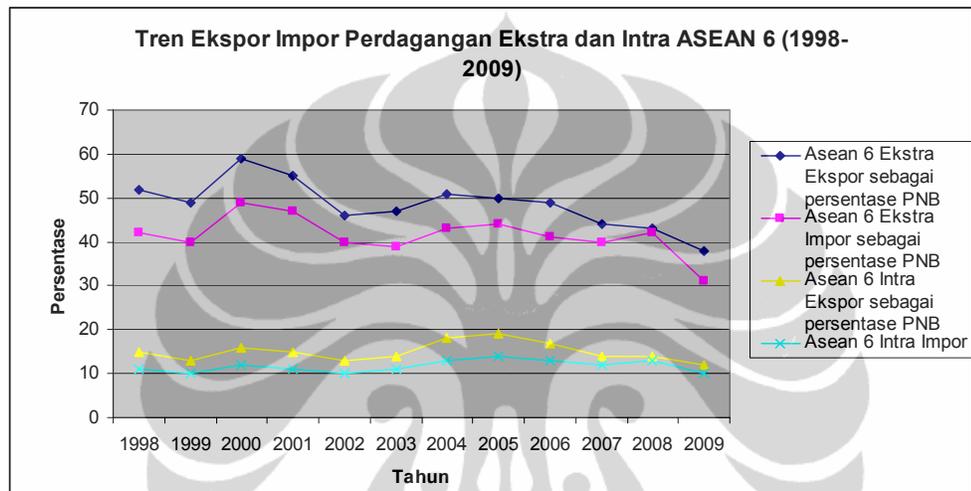
Pengurangan tarif diharapkan dapat meningkatkan intensitas perdagangan barang antara China dan ASEAN dan perdagangan produk pertanian dalam program EHP. Konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung China dari dihapuskannya tarif ini telah dipertimbangkan dengan seksama sejak sebelum China mengajukan proposal FTA dengan ASEAN. Hukum perdagangan China mengatur masalah investigasi atau uji kelayakan perdagangan asing yang mungkin berdampak pada industri domestik dan kemampuan kompetisi barang-barang impor dan ekspor. Hukum ini juga menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyelidiki hambatan tarif.¹⁶⁷

Pengurangan atau eliminasi tarif melalui ACFTA akan sangat menguntungkan bagi China bahkan mungkin melebihi keuntungan yang akan didapatkan ASEAN karena kesempatan terjadinya pengalihan perdagangan. Sebelum ACFTA diajukan

¹⁶⁷ Investigasi terhadap perdagangan dengan mitra dagang asing ini diuraikan pada pasal 7 ayat 37 Hukum Perdagangan Asing China. Pasal yang dimaksud berbunyi, " In order to maintain the foreign trade order, the authority responsible for foreign trade under the State Council may carry out investigations on the following matters in accordance with laws and administrative regulations at its disposal or in conjunction with other relevant administrations..."

oleh China, data yang ada menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN dengan mitra dagang di luar kawasan (*extra ASEAN trade*) selalu lebih besar dari perdagangan ASEAN dengan sesama negara anggotanya (*intra ASEAN trade*). Grafik 3.2 menunjukkan tren ini.

Grafik 3.2



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Grafik 3.2 menunjukkan ketergantungan ASEAN yang sangat besar dengan mitra dagang di luar kawasan. China menyadari besarnya dependensi ASEAN dengan mitra perdagangan luar ini sehingga mengajukan proposal kerja sama perdagangan bebas dengan Asia Tenggara. Dengan adanya FTA antara ASEAN-China, hambatan tarif dihapuskan dan ini akan memperbesar pasar karena para eksportir antara kedua pihak memiliki kesempatan berbisnis di pasar yang lebih terintegrasi. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya perdagangan intra ASEAN-China sehingga terjadi penciptaan perdagangan (*trade creation*), peningkatan pada skala ekonomi, berkurangnya biaya produksi, dan pertumbuhan ekonomi pun akan semakin efisien.

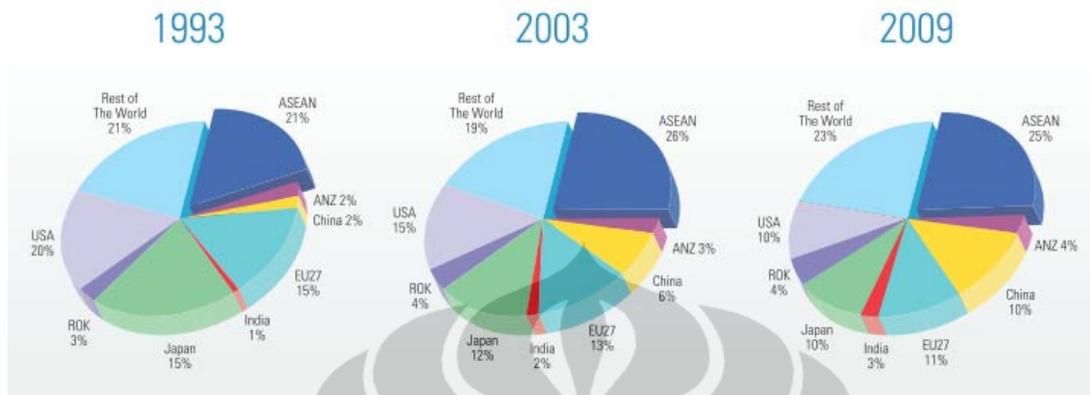
Tetapi jika total perdagangan ASEAN dengan China lebih besar dari total perdagangan intra ASEAN maka kemungkinan yang ada adalah terjadinya pengalihan

perdagangan (*trade diversion*) dari sesama negara anggota ASEAN ke China.¹⁶⁸ Pengalihan perdagangan dari negara ASEAN ke China dimungkinkan karena China memiliki keuntungan komparatif dan kompetitif. Pertama, China unggul dalam hal produktivitas buruh. Kedua, China unggul dalam bidang manufaktur. Ketiga, dengan adanya ACFTA maka tarif untuk memasuki pasar China akan turun drastis. Pada tahun 2007, ASEAN dan China sepakat untuk menuruni paling sedikit 60% tarifnya menjadi 0-5% dan pada tahun 2010 seluruh tarif harus dieleminasi kecuali produk-produk yang masuk daftar sensitif yang akan dihapuskan tarifnya pada tahun 2018.

Faktor yang memungkinkan terjadinya pengalihan perdagangan dari ASEAN ke China adalah tipisnya perbedaan tarif ekspor rata-rata yang diberlakukan kedua pihak. Pada tahun 2010, rata-rata tarif produk yang dikenakan China kepada produk yang berasal dari ASEAN 6 diturunkan sampai sekitar 0.1%. Sebaliknya, produk ekspor dari China yang masuk ke ASEAN 6 rata-rata dikenai tarif sebesar 0.6%. Ini berarti, produk China yang masuk ke ASEAN dikenai tarif yang hampir sama dengan produk ASEAN yang masuk ke China. Nilai hambatan tarif yang nyaris sama, keunggulan komparatif China dan lingkungan bisnis yang cenderung lebih kondusif di China berpotensi menyebabkan pengalihan perdagangan dari ASEAN ke China, baik yang datang dari intra-ASEAN maupun dari luar. Salah satu penanda dari pengalihan perdagangan ini adalah dengan berkurangnya nilai ekspor di ASEAN antara sesama negara anggotanya dan bertambahnya nilai ekspor ASEAN ke China seperti yang terlihat pada grafik 3.3. Hal yang sama juga terjadi pada impor ASEAN dan China (lihat grafik 3.4).

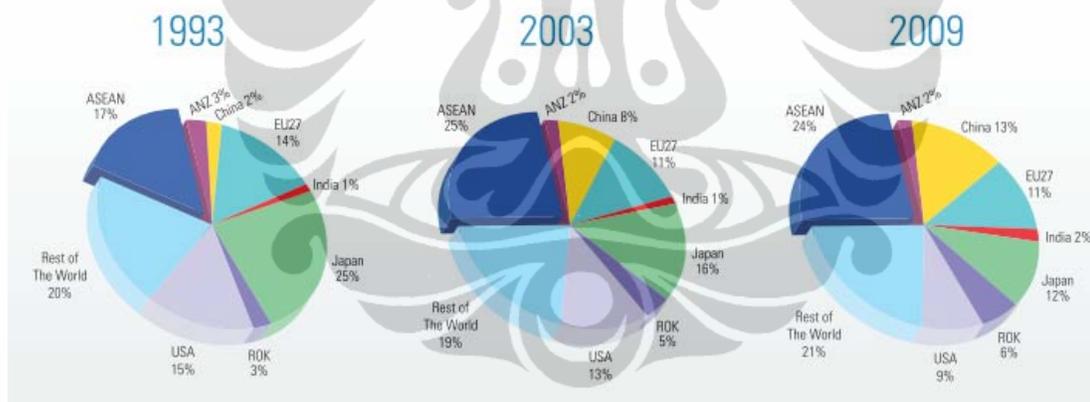
¹⁶⁸ Dalam makalah Tulus Tambunan “*Is ASEAN still Relevant in the Era of the ASEAN-China FTA?*”. Makalah ini dipersiapkan untuk *Asia Pacific Economic Association (APEA) Second Conference*, di Seattle, Amerika Serikat, 29-30 Juli 2006, diakses dari <http://www.apeaweb.org/confer/sea06/papers/tambunan.pdf>, tanggal 13/3/11.

Grafik 3.3 Pembagian ekspor ASEAN dengan beberapa negara mitra dagang



Sumber: *The ASEAN Economic Community Chartbook 2010*. (ASEAN Secretariat: 2011), hlm. 23-24.

Grafik 3.4 Pembagian impor ASEAN dengan beberapa negara mitra dagang



Sumber: *Ibid.*

Pengalihan perdagangan dari ASEAN ke China akan sangat menguntungkan China. ACFTA berpotensi mengurangi daya tarik ASEAN di mata investor asing baik yang datang dari luar kawasan maupun dari dalam Asia Tenggara sendiri yang melihat China sebagai pasar yang lebih potensial. Ini akan menguntungkan investasi dan perdagangan China dalam jangka panjang.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Goh and Simon, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Program EHP dan PTA di bawah kerangka ACFTA bukan satu-satunya strategi China dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangannya dengan ASEAN. Produk ekspor unggulan China terutama berada di sektor manufaktur. Manufaktur menyumbang bagian yang besar dari total PDB China. China memproduksi 50% dari seluruh kamera digital di dunia, sepertiga AC dan TV di dunia, 30% mesin cuci dan 25% kulkas.¹⁷⁰ Produk-produk manufaktur termasuk bagian dari ekspor China yang terpenting dari ASEAN. ASEAN akan sulit bersaing dengan produk China yang terutama menguasai sektor tekstil, perabot rumah tangga, alas kaki, mesin-mesin manufaktur, dan peralatan elektronik sederhana yang selama ini sifatnya vital bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN.¹⁷¹ Lebih jauh lagi, China juga membangun pabrik-pabrik manufaktur di ASEAN yang berpotensi menggeser produsen lokal, produk lokal seperti Mobil Malaysia dan teknologi digital Singapura.¹⁷²

Dalam melihat Asia Tenggara sebagai mitra dagang dan target pasar, China mengambil keuntungan dari beberapa kondisi dan realisasi kerjasama ekonomi di Asia Tenggara. Lama sebelum ACFTA diajukan oleh China, negara-negara ASEAN telah terlebih dahulu mengadakan kerjasama FTA (AFTA). Realisasi di lapangan adalah AFTA belum dapat dikatakan berjalan dengan sukses. Alasan lambannya kemajuan AFTA adalah karena rendahnya komplementaritas antara negara anggota ASEAN¹⁷³ yang sebagian besar merupakan negara berkembang dan kaya sumber daya alam sehingga masih mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan barang tambang, mineral, dan minyak bumi. Rendahnya komplementaritas antara negara anggota ASEAN menyisakan celah yang dapat dijadikan kesempatan bagi mitra dagang di luar kawasan. Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa ASEAN memang menjadi pilihan utama untuk melakukan ekspansi perdagangan ke luar kawasan, namun, jika berbicara mengenai tingkat kemampuan beli sebagian besar masyarakat ASEAN (kecuali Singapura dan Brunei), maka kerjasama dengan China akan lebih

¹⁷⁰ Inayati, *Op. Cit.*, hlm. 83.

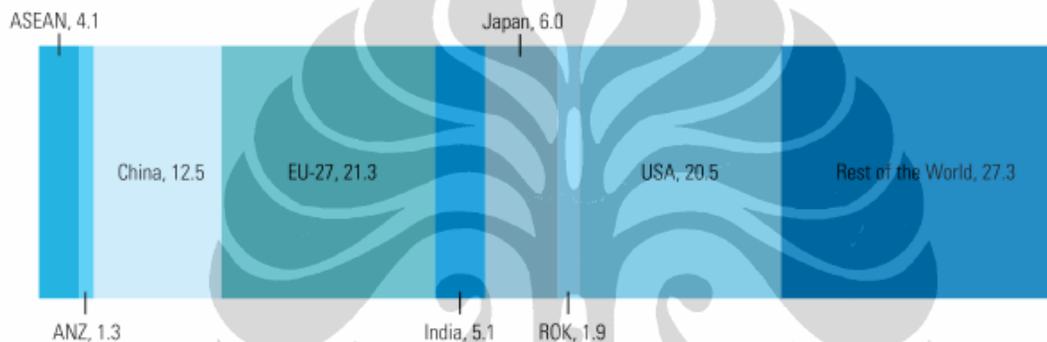
¹⁷¹ Goh and Simon, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Inayati, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 72.

rasional karena sebagian besar produk China lebih kompetitif karena harganya yang lebih terjangkau bagi penduduk Asia Tenggara. Daya beli sebagian besar masyarakat ASEAN yang masih rendah adalah kunci sukses ekspor China di kawasan ini. Grafik 3.5 berikut menunjukkan perbandingan saham ASEAN dan beberapa negara lain dalam PDB dunia yang didasarkan pada daya beli (PPP) dalam dolar.

Grafik 3.5 Saham ASEAN dan negara mitra dagang dalam PDB dunia berdasarkan daya beli masyarakat (PPP) dalam dolar (2009)



Sumber: IMF World Economic Outlook Database dalam *The ASEAN Economic Community Chartbook 2010, Op. Cit.*, hlm. 2.

Sejak China menjadi anggota WTO dan proposal FTA dengan ASEAN diajukan, ASEAN mengalami defisit perdagangan barang dengan China (lihat tabel 3.5) kecuali dalam perdagangan minyak bumi dan produk hasil penyulingannya. Ekspor China ke ASEAN meningkat sekitar 44.8% menjadi US\$ 154,59 milyar pada tahun 2010. Sejak ACFTA berjalan, perdagangan bilateral naik sebesar 37.5% per tahun menjadi sekitar US\$ 292,78 milyar. Tren defisit perdagangan ASEAN terhadap China menyebabkan meningkatnya dependensi perdagangan ASEAN terhadap produk China. Semakin tergantung ASEAN kepada China maka akan semakin sulit juga bagi ASEAN untuk mempertahankan independensinya dan semakin besar pula kemungkinan China mengontrol atau menyetir kebijakan perdagangan ASEAN agar sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Tabel 3.5 Neraca perdagangan ASEAN dengan 5 mitra dagang (2002-2009)
(Nilai dalam juta Dolar)

Mitra Dagang	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Amerika	18,159	21,462	24,451	31,965	32,961	33,683	20,091	14,831
UE 15	14,344	18,019	19,246	20,017	26,305	25,013	20,886	10,364
Jepang	-8,580	-7,004	-8,807	-8,321	789	-2,785	-2,625	-4,726
China	-3,664	-1,517	-6,362	-8,878	-9,940	-15,227	-21,694	-15,003
Hongkong	14,123	20,525	21,261	25,604	30,553	45,216	39,541	45,478

Sumber: *ASEAN Statistical Yearbook 2010, Op. Cit.*, hlm.73.

Pada kasus Indonesia, contohnya, neraca perdagangan Indonesia-China defisit di pihak Indonesia. Pada tahun 2008, perdagangan keduanya mencapai US\$ 31,5 milyar atau merepresentasikan pertumbuhan sebesar 25.7%. China mengekspor barang sebesar US\$ 17,19 milyar, sedangkan Indonesia mengekspor barang sebesar US\$ 14,33 milyar ke China.¹⁷⁴ Nilai ekspor Indonesia ke China nilainya US\$ 49,2 milyar sementara impor dari China nilainya adalah US\$ 52 milyar.¹⁷⁵ Produk China yang menguasai pasar membuat nilai impor naik 45.9% dan berkontribusi 15% dari total impor Indonesia.¹⁷⁶

Indonesia merupakan target pasar yang sempurna bagi produk-produk China mengingat daya beli masyarakat yang cocok dengan harga produk murah dari China. selain itu, Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang memiliki cadangan sumber daya alam terbesar yang termasuk di dalamnya adalah minyak bumi dan gas. Dalam ukuran populasi pun Indonesia merupakan negara ASEAN dengan total penduduk terbesar sehingga pasarnya mampu menyerap produk-produk yang datang dari China, baik yang datang dari jalur legal maupun ilegal. Sampai tahun 2009, China merupakan pasar andalan Indonesia keempat setelah Jepang, Amerika Serikat, dan

¹⁷⁴ *Economic and Commercial Counsellor's Office, Embassy of P.R.China, Bilateral Economic and Trade Cooperation* (Maret: 2009), Sumber: <http://id2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/inbrief/200809/20080905771803.html>. Diakses tanggal 1/2/2011.

¹⁷⁵ "Produk China di Setiap Lini", Kompas, 11/4/11. diakses dari: <http://cetak.kompas.com/read/2011/04/11/03194964/produk.china.di.setiap.lini>, tanggal 15/4/11.

¹⁷⁶ *Ibid.*

negara ASEAN lainnya dalam memasarkan produk ekspor non-migasnya (lihat tabel 3.6).

Tabel 3.6 Perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut negara tujuan
(Nilai dalam juta dolar)

NO	NEGARA	2005	2006	2007	2008	2009	TREN (%) 05-09	PERUB (%) 09/08	PERAN (%) 2009	Jan- Ags 2009	Jan- Ags 2010
1	JEPANG	9.561,8	12.198,6	13.092,8	13.795,3	11.979,0	5,91	-13,17	12,29	7.004,0	10.401,8
2	AMERIKA SERIKAT	9.507,9	10.682,5	11.311,3	12.531,1	10.470,1	3,59	-16,45	10,74	6.694,3	8.666,5
3	REP.RAKYAT CINA	3.959,8	5.466,6	6.664,1	7.787,2	8.920,1	21,87	14,55	9,15	5.251,7	8.216,6
4	SINGAPURA	7.068,6	7.824,2	8.990,4	10.104,6	7.947,6	5,02	-21,35	8,15	5.216,6	6.164,4
5	INDIA	2.865,4	3.326,5	4.885,0	7.060,9	7.351,4	30,17	4,11	7,54	4.502,8	6.067,5

Sumber: Situs Departemen Perdagangan Indonesia, diakses dari:
[http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_ekspor_nonmigas_\(negara_tujuan\)/](http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_ekspor_nonmigas_(negara_tujuan)/), tanggal 20/12/10.

Jika defisit perdagangan Indonesia terhadap ASEAN berlanjut tanpa ada perubahan berarti, akan semakin besar kemungkinan perdagangan Indonesia akan semakin bergantung dengan China. China menyadari bahwa interdependensi ekonomi tidak berarti persamaan antara negara yang saling tergantung melainkan lebih mengarah pada hubungan asimetris yang tercipta dari pola tersebut. Dalam kasus ASEAN dan China, hubungan asimetris dapat tercipta ketika China menjadi lebih dominan dibandingkan ASEAN. Diplomasi perdagangan China di ASEAN mungkin bertujuan untuk menciptakan hubungan dagang yang sifatnya menang sama menang, namun di lapangan, ACFTA mulai terlihat lebih memihak China.

Defisit perdagangan terhadap China juga dialami oleh negara anggota ASEAN lainnya, misalnya Thailand (lihat tabel 3.7). Perdagangan bilateral China-Thailand naik dari 3,8 milyar dolar pada tahun 1996 menjadi 20,3 milyar pada tahun 2005.¹⁷⁷ Pasar Thailand dipenuhi dengan produk buah dan sayuran China sementara pasar China mengkonsumsi karet dan singkong Thailand.

¹⁷⁷ Jun Tsunekawa, *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*. (The National Institute for Defense Studies Japan: 2009), hlm.98.

Tabel 3.7 Hubungan dagang Thailand dan China sebelum dan sesudah keanggotaan China di WTO (1993-2008) (Dalam juta dolar)

Tahun	Total Perdagangan	Neraca Perdagangan Thailand terhadap China
1993	1,629.38	-547.77
1998	3,568.66	-35.17
2002	8,452.54	-1,342.47
2004	15,257.08	-1.030.17
2006	25,331.95	-1,876.05
2008	28,635.04	-2,924.67

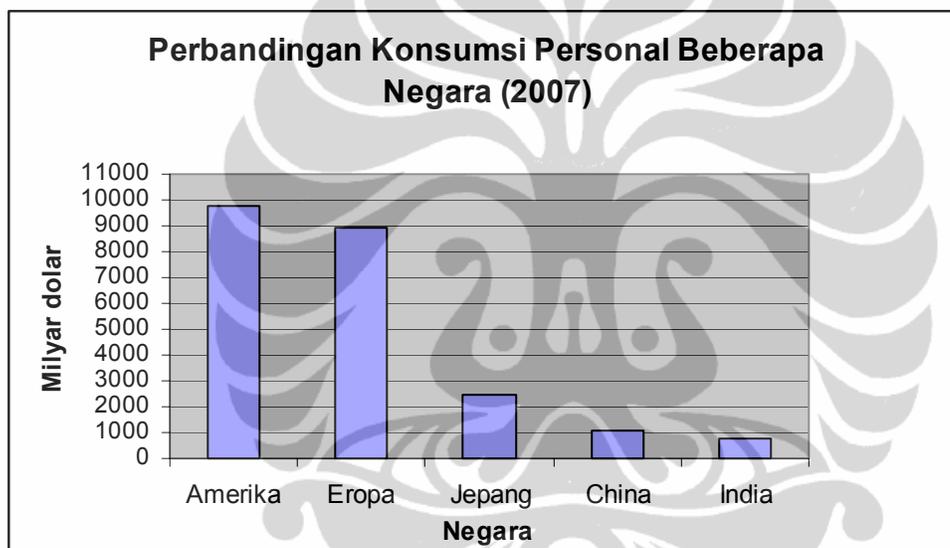
Sumber: Jun Tsunekawa. *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, (The National Institute for Defense Studies Japan : 2009), hlm. 109.

Surplus perdagangan China terhadap ASEAN bukan satu-satunya bentuk diplomasi ekonomi China di Thailand. Dalam kerangka ACTE, China dan Thailand setuju untuk memulai EHP pada tanggal 1 Oktober 2003. Perjanjian ini memang mendongkrak jumlah ekspor kedua negara, namun bagi pihak Thailand perjanjian ini tidak berjalan dengan mulus. Yang mempersulit Thailand adalah pemberlakuan hambatan non-tarif yang berlaku di tingkat propinsi di China. China daratan memiliki 22 propinsi, 5 daerah otonom, dan 4 kota otonom. Masing-masing propinsi dan daerah atau kota memiliki peraturan hambatan non-tarif yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyulitkan ASEAN ataupun mitra dagang yang lain.

Ekspansi perdagangan dengan ASEAN tidak hanya diperlukan China untuk mendorong liberalisasi perdagangannya, meningkatkan ekspornya ataupun dalam misi pencarian energi, bahan mentah, dan sumber daya alam. Diplomasi perdagangan yang efektif dengan ASEAN dapat membantu China untuk meningkatkan level konsumsi masyarakatnya. Walaupun secara ekonomi China telah berpengaruh besar terhadap fluktuasi ekonomi dunia serta mengancam kedudukan negara-negara *major power* seperti Amerika dan Uni Eropa, tingkat konsumsi penduduk China jauh lebih rendah dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi besar lainnya (lihat grafik 3.6). Kesuksesan ekonomi China selama tiga dekade menitikberatkan pada ekspor dan

investasi tetap (*fixed investment*).¹⁷⁸ Kedua sektor ini menguasai antara 75% dan 80% dari total PDB China.¹⁷⁹ Roach (2006) berpendapat Jika China terus bergantung pada dua sektor ini maka suatu saat ekonomi China akan mengalami kemunduran. Salah satu cara yang bisa China lakukan untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan mengubah model pembangunannya menjadi *consumer-driven dynamic* atau pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada dinamisme tingkat konsumsi masyarakatnya.¹⁸⁰

Grafik 3.6



Sumber: Morgan Stanley Research dalam Stephen S. Roach, *The Next Asia: Opportunities and Challenges for A New Globalization*. (John Wiley & Sons, Inc.: 2009), hlm. 173.

Saat ini tingkat konsumsi masyarakat China masih rendah dan ekspansi perdagangan bisa menjadi jawaban untuk meningkatkan konsumsi masyarakat China. Strategi perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian perdagangan bebas pada dasarnya akan mempermudah liberalisasi bisnis dan perdagangan dan mempermudah arus barang dan jasa. ASEAN sebagai mitra dagang China akan menemui banyak

¹⁷⁸ Stephen S. Roach, *The Next Asia: Opportunities and Challenges for A New Globalization*. (John Wiley & Sons, Inc.: 2009), hlm. 173.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 172.

kemudahan dalam memasarkan produknya di China dan kemudahan ini akan meningkatkan kuantitas produk yang diekspor ke China. Dengan beragamnya barang-barang terjangkau dari Asia Tenggara yang masuk ke China dan beberapa diantaranya merupakan produk komperatif ASEAN, maka logikanya penduduk China akan memiliki lebih banyak pilihan yang dapat dijangkau sehingga diharapkan tingkat konsumsi pun akan meningkat. Salah satu penentu tingkat konsumsi masyarakat adalah harga barang. Oleh karena itu, jika China memanfaatkan ACFTA sebaik-baiknya demi kepentingan ekonominya, maka kerjasama perdagangan bebas dengan ASEAN berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi domestik China.

Implikasi lain dari hubungan ekonomi China yang lebih erat dengan ASEAN adalah pengukuhan posisi China sebagai mitra ASEAN yang sangat penting dalam kerjasama kawasan yang lebih besar, yakni *East Asia Summit* (EAS). Integrasi ekonomi kawasan merupakan komponen yang penting yang harus dimainkan oleh Asia Tenggara untuk meraih pengaruh politik dan strategis yang lebih penting lagi. EAS merupakan kerjasama yang dapat memfasilitasi peran Asia Tenggara sebagai sentral kebijakan tidak hanya di kawasan tetapi juga di Asia Timur. EAS adalah wadah yang tepat bagi ASEAN untuk bersuara dan menentukan langkahnya sendiri ke depan tanpa harus didikte oleh kekuatan-kekuatan *superpower* lain yang lama berkuasa, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Jika ASEAN dapat menentukan langkahnya sendiri maka secara politik ini akan menguntungkan China karena ASEAN akan memiliki kebebasan untuk bersikap dalam pengambilan keputusan terkait konflik di Laut China Selatan, Taiwan, Tibet, dan konflik lain yang melibatkan kepentingan nasional China di masa sekarang dan yang akan datang.

Diplomasi komersial China di ASEAN melalui sektor perdagangan barang di bawah kerangka kerjasama ACFTA terwujud dalam kebijakan yang memiliki tujuan tertentu (lihat tabel 3.8), serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Diplomasi komersial China di ASEAN bukannya tidak menemui hambatan. Hambatan ini umumnya datangnya dari pihak swasta yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dengan cara tidak mematuhi peraturan perdagangan asing yang telah dibuat negara.

Pertama, pemerintah China disulitkan oleh pihak swasta yang diisukan melakukan praktek *dumping* terhadap barang-barangnya yang masuk ke ASEAN, contohnya ke Indonesia. Penuntutan akan praktek *dumping* bukan masalah yang mudah dilakukan mengingat banyaknya prosedur yang harus dilakukan negara penuntut sebelum melakukan penuntutan ke WTO. Padahal China dalam bab 6 pasal 33 hukum perdagangan asingnya tidak mengizinkan praktek-praktek kecurangan dalam perdagangan.¹⁸¹

Kedua, sebagian besar produk kebutuhan sehari-hari dan produk hasil usaha kecil China—seperti sayuran, buah, dan kosmetik—yang masuk ke ASEAN masuk melalui jalur ilegal.¹⁸² Ini terjadi karena pihak swasta melakukan bisnis tanpa memperhatikan dampak besar yang akan merugikan negara dan mencemari nama China di negara mitra dagangnya. Pemerintah China perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap produk ekspor agar bentuk kecurangan-kecurangan tidak perlu terjadi lagi karena ini hanya akan menjadi poin negatif bagi diplomasi komersial China di ASEAN. Praktek ini juga akan sangat merugikan ASEAN karena barang-barang ilegal tidak membayar pajak dan tidak harus melewati hambatan-hambatan non-tarif. Akibatnya, tingkat kepercayaan ASEAN terhadap China akan menurun jika pemerintah China tidak segera melakukan tindakan untuk mengatasi masuknya produk ilegal dari China di pasar ASEAN.

Pemerintah China juga perlu melakukan pengawasan kepada pihak-pihak distributor produk asal China yang akan diekspor keluar untuk mencegah para pelaku komersial menarik untung dari praktek-praktek kecurangan yang tidak diizinkan dalam hukum perdagangan asing China. Para pelaku bisnis dapat diberikan edukasi bahwa praktek curang yang mereka lakukan akan merugikan China dan mencoreng nama China di mata mitra perdagangannya.

¹⁸¹ Pasal yang dimaksud berbunyi “*In foreign trade activities, such unfair competition activities as selling the products at unreasonable low prices, colluding with each other in a tender, producing and releasing false advertisements and conducting commercial bribery and others like are not allowed*”.

¹⁸² Inayati, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 88.

Tabel 3.8 Diplomasi komersial China di ASEAN dalam sektor perdagangan di bawah kerangka kerjasama ACFTA (2002-2010)

Kebijakan	Tujuan	Implementasi	Hasil
Memberikan bantuan kepada UKM-UKM ASEAN.	Menunjukkan sikap kooperatif China dalam bekerjasama dengan ASEAN.	Penawaran bantuan langsung berupa pengadaan mesin, revitalisasi UKM dan bantuan dana kepada untuk UKM Indonesia (2010).	Hingga tahun 2010, bantuan ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.
Program EHP.	<ul style="list-style-type: none"> -Meredam ketakutan ASEAN atas membanjirnya produk pertanian China di kawasan. - Memenuhi kebutuhan domestik China yang besar. - Memperoleh pengakuan politik ASEAN mengenai status ekonomi China sebagai ekonomi pasar. - Mengantisipasi menurunnya kontribusi sektor pertanian China yang digantikan oleh sektor manufaktur. 	<ul style="list-style-type: none"> -Membebaskan tarif produk pertanian ASEAN yang masuk ke China (2004-2018). - Hambatan non-tarif masih berlaku bagi produk ASEAN yang masuk ke China. - Mengadakan percepatan penghapusan tarif (ACTE) dengan Thailand. - Mengadakan PTA dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar (2006). -Subsidi sektor pertanian China untuk bersaing dengan ASEAN. 	- Lebih dari 1100 Produk pertanian China-ASEAN telah dikenai tarif sebesar 0-5% (2009).*
Penerapan prinsip WTO terhadap negara ASEAN non-WTO.	Menunjukkan komitmen China, memberikan akses pasar kepada ASEAN dan menjalin kerjasama sesuai dengan ketentuan WTO.	Memberikan perlakuan MFN dan <i>national treatment</i> kepada Vietnam dan Laos yang bukan anggota WTO.	Sedang berjalan.

Tabel 3.8 (Lanjutan)

Kebijakan	Tujuan	Implementasi	Hasil
Memfasilitasi perdagangan negara berkembang ASEAN.	Menunjukkan keseriusan China dalam membantu kemajuan perdagangan negara anggota ASEAN.	- Memberikan bantuan 3 milyar kepada ASEAN (2005). -Mendirikan “Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan” untuk memfasilitasi perdagangan Indonesia-China (2009).	- Beberapa tawaran bantuan langsung dari China disikapi dengan hati-hati oleh ASEAN. - Fasilitas perdagangan juga dilakukan China dengan membangun <i>link</i> transportasi penghubung ASEAN-China.
Menurunkan tarif produk China secara signifikan dalam kesepakatan perdagangan barang dengan ASEAN.	- Menunjukkan sikap murah hati China dalam bekerjasama dengan ASEAN. - Meningkatkan intensitas perdagangan China-ASEAN.	- Tarif China menurun drastis dengan adanya ACFTA. Penurunannya jauh lebih signifikan dibandingkan penurunan tarif yang dilakukan ASEAN.	- Pada tahun 2009 terdapat sekitar 7.868 produk barang ASEAN dan China yang tarifnya telah dipotong menjadi 0-5% untuk mendukung ACFTA, padahal tarif MFN China sendiri berkisar 0-45%.*
Menjadikan China sebagai negara sasaran pengalihan perdagangan dari sesama negara anggota ASEAN.	- Meningkatkan potensi China untuk menjadi mitra dagang eksternal ASEAN terbesar. - Menarik investor dari ASEAN.	- Perbedaan tarif antara ASEAN dan China setelah ACFTA sangat tipis dan mendukungnya lingkungan bisnis China berpotensi menyebabkan pengalihan perdagangan dari negara anggota ASEAN ke China.	- Tarif yang dikenakan China kepada produk ASEAN 6 rata-rata 0.1%. - Tarif yang dikenakan ASEAN 6 kepada produk China rata-rata 0.6%.

* Sumber: *China-ASEAN FTA Rate (China's Tariff Book 2009)*. Diakses dari: http://ditjenkpi.depdag.go.id/Website_tr/Preferential%20Tariff/ASEAN-CHINA/China_s%20tariff%20book%20in%202009.pdf, tanggal 2/4/11.

Tabel 3.8 (Lanjutan)

Kebijakan	Tujuan	Implementasi	Hasil
Membidik pasar ASEAN yang memiliki daya beli rendah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya saing produk China di ASEAN. - Mempertinggi tingkat dependensi ASEAN terhadap China. - Mengontrol atau menyetir kebijakan ASEAN agar sesuai dengan kebijakan perdagangan China. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata negara ASEAN mengalami neraca perdagangan yang negatif dengan China dalam perdagangan barang. - Meningkatnya ketergantungan ASEAN terhadap produk China. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2009 neraca perdagangan ASEAN dan China adalah sebesar US \$ - 15.003 juta. - Produk China mengisi setiap lini pasar ASEAN.
Meningkatkan kerjasama perdagangan barang dengan ASEAN.	Meningkatkan tingkat konsumsi domestik China dengan ragam produk ASEAN, terutama yang memiliki keunggulan komparatif terhadap China.	- Perjanjian-perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral di bawah ACFTA (2002-2010).	<ul style="list-style-type: none"> - ACFTA diresmikan tahun 2010 dan masih berlangsung hingga sekarang. - Dalam sektor non-migas secara keseluruhan negara-negara ASEAN mengalami defisit pada neraca perdagangannya terhadap China.

Sumber: Elaborasi penulis.

BAB IV

DIPLOMASI KOMERSIAL CHINA DI ASEAN MELALUI INVESTASI ASING DAN EKSPANSI PERUSAHAAN NEGARA DAN SWASTA

4.1 Diplomasi Komersial China di ASEAN melalui Investasi Asing setelah Keanggotaan China di WTO

Pemerintah China telah mengatur kebijakan investasi yang mengatur tingkat dan jenis penanaman modal asing sejak Kebijakan Pintu Terbuka. Pada awal reformasi ekonomi tahun 1978, perdagangan asing China hanya menyumbang 10% terhadap PDB dan kala itu China belum melakukan penanaman modal di luar negeri dan tidak menerima investasi asing. Pada tahun 1993 peran perdagangan terhadap PDB negara meningkat menjadi 38%. Kala itu terdapat 60 juta dolar modal asing tertanam di lebih dari 70.000 perusahaan di China dan China segera menjadi negara dengan FDI terbesar diantara negara berkembang lainnya.¹⁸³ Setelah China menjadi anggota WTO beberapa regulasi diperkenalkan untuk meliberalisasi FDI dan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mudah diprediksi yang didasarkan kepada hukum dan peraturan.¹⁸⁴ Keanggotaan China di WTO diharapkan dapat menghasilkan *spill-over effect* yang positif bagi hubungan perdagangan dan investasi antara China dan ASEAN.

Sejak ACFTA diajukan oleh China, China menjadi salah satu negara utama sumber FDI yang masuk ke ASEAN setelah Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2009 investasi yang datang dari China ke ASEAN meningkat sebanyak 40 kali lipat sejak tahun 2002.¹⁸⁵ Meski demikian, nilai investasi China di ASEAN tidak cukup signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan investasi ASEAN di China. Walaupun bukan sumber FDI terpenting di China, beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Vietnam adalah beberapa dari beberapa investor terpenting bagi beberapa propinsi di China.

¹⁸³ Shirk, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁸⁴ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁸⁵ ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm. 110.

Salah satu indikasi berkembangnya diplomasi komersial China di ASEAN adalah dengan menjadikan dirinya penanam maupun penarik FDI di dan dari ASEAN serta bagaimana China memanfaatkan ACFTA untuk melancarkan kepentingannya di kawasan. Aktor utama dalam misi ini adalah negara dan pihak swasta. Pihak swasta dari China berperan sebagai sumber FDI yang datang ke ASEAN dan pihak swasta ASEAN berperan sebagai penanam modal di China. Negara memiliki kapasitas sebagai pendukung, regulator dan pengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan kebijakan yang menyangkut FDI. Di dalam negeri, pemerintah mengatur segala bentuk FDI yang masuk dan keluar serta memastikan kondisi dan lingkungan bisnis yang mendukung dan mampu menarik FDI dengan negara mitra dagang, yang dalam kasus ini adalah ASEAN. Pihak swasta penanam modal yang datang dari China maupun ASEAN mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah China berupa bantuan finansial ataupun yang datang dalam bentuk jaminan lingkungan bisnis yang mendukung dan memadai.

Diplomasi China terhadap ASEAN dalam sektor investasi memiliki beberapa tujuan dasar. Pertama, ACFTA diharapkan dapat meningkatkan investasi China di ASEAN yang sebenarnya juga memiliki beberapa keuntungan komparatif bagi China seperti sumber daya alam, energi serta upah buruh yang bahkan lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh di beberapa propinsi di China. Kedua, sektor swasta China akan diuntungkan dengan adanya kerjasama ACFTA di bidang investasi yang memberikan kebijakan preferensial khusus sehingga mendorong mereka berinvestasi di ASEAN. Ketiga, China ingin menarik lebih banyak lagi investasi yang datang dari ASEAN. Keempat, ACFTA sebagai sebuah kerjasama perdagangan bebas diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi investasi ke China dari mitra dagang asing di luar ASEAN.

4.1.1 Strategi dan Tujuan Pemerintah China dalam Mendorong Investasi ke ASEAN

China telah menjadi salah satu negara penerima investasi terbesar di dunia. Strategi pemerintah China adalah dengan menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk (IDI— *inward direct investment*) ke China untuk membangun perekonomian. Tetapi, IDI bukan satu-satunya strategi yang diterapkan China. Selain IDI, China juga aktif berperan sebagai investor yang menanamkan modal di negara-negara lain yang umumnya adalah negara-negara maju seperti Amerika dan Uni Eropa. Salah satu target investasi keluar (ODI—*Outward Direct Investment*) China di negara berkembang adalah negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa pertanyaan akan muncul terkait dengan ODI China di Asia Tenggara. Pertama, mengapa China menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu target investasinya di luar negeri? Kedua, sejauh apa perkembangan investasi China di ASEAN? Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemerintah China dalam mendorong investasi ke ASEAN yang datang baik dari perusahaan negara maupun swasta? Ketiga pertanyaan ini akan menjadi fokus subbab ini.

Pada tahun 2009, total investasi China di ASEAN adalah 2.3% dari total FDI yang masuk ke ASEAN.¹⁸⁶ Jika dibandingkan dengan FDI yang masuk dari Jepang sebesar 14.5%, dari Uni Eropa sebesar 24.2%, dan dari Amerika Serikat sebesar 8.5%, maka China adalah sumber FDI terbesar keempat di ASEAN.¹⁸⁷ Angka ini memang tidak cukup signifikan jika dilihat dari jumlah satu tahun saja (US\$ 1,5 milyar pada tahun 2009), tetapi akan terlihat cukup menjanjikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama saat China mengalami defisit investasi terhadap ASEAN pada tahun 2002 sebesar US\$ -71.9 juta.¹⁸⁸ Pada tahun 2010, sejak ACFTA dimulai, ODI China di ASEAN mencapai US\$ 2,57 milyar.¹⁸⁹

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁸⁸ ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm. 110.

¹⁸⁹ “China’s Direct Investment to ASEAN Countries Reaches \$2,57b”, diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-03/02/content_12104984.htm, pada tanggal 22/4/2011.

Tabel 4.1 Saham FDI di ASEAN menurut negara sumber (2002-2009)

Negara	Saham FDI (%)
ASEAN	13.7
Australia	1.3
Kanada	1.1
China	2.3
UE	24.2
India	1.1
Jepang	14.5
New Zealand	0.2
AS	8.5
Lainnya	20.8

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2010, *Op. Cit.*, hlm.112.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1, FDI China di ASEAN tidak terlalu besar, terutama jika dibandingkan dengan FDI ASEAN di China. Pada tahun 2008 total investasi keduanya adalah US\$ 60 milyar¹⁹⁰ dan pada pertengahan tahun 2010 naik menjadi US\$ 69,4 milyar.¹⁹¹ Walaupun ada peningkatan, tetapi porsi ODI keduanya tidak seimbang. Tabel 4.2 menunjukkan perbandingan FDI China dan ASEAN.

Tabel 4.2 *Outward Direct Investment* China dan ASEAN (Kumulatif 2002-2010)

ODI	2008	2010
ODI ASEAN di China	US\$ 52 milyar	US\$ 59,8 milyar
ODI China di ASEAN	US\$ 8 milyar	US\$ 9,6 milyar

Sumber: Data tahun 2008 diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/21/content_12290261.htm, sedangkan data tahun 2010 diakses dari http://eng.caexpo.org/special/7thExpoReview/EventsNews/t20101023_92492.html, tanggal 24/4/11.

Karena investasi China di ASEAN yang relatif kecil, terutama sebelum ACFTA diajukan, maka pemerintah China dan ASEAN pun menetapkan perjanjian kerjasama dalam sektor investasi di dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis ASEAN-China dan menjadikan investasi sebagai salah satu sektor utama yang

¹⁹⁰ "China attracts \$52 bln investment from ASEAN", 21/10/2009, diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/21/content_12290261.htm, tanggal 24/4/11.

¹⁹¹ "Investment Cooperation to Be New Engine for China and ASEAN", 23/10/2010, diakses dari http://eng.caexpo.org/special/7thExpoReview/EventsNews/t20101023_92492.html, tanggal 24/4/11.

menjadi fokus ACFTA. Pada poin 2.2.1 hingga 2.2.4 perjanjian tersebut, tertulis bahwa kedua pihak sepakat untuk saling mempromosikan investasi dengan cara meningkatkan pertukaran dan rasa saling pengertian diantara otoritas investasi dan pihak swasta ASEAN dan China.¹⁹² Kedua pihak juga sepakat menjalin kerjasama antar pemerintah, asosiasi bisnis, dan institusi akademik untuk mempromosikan kebijakan investasi di ASEAN dan China. Untuk mendukung investasi di kedua wilayah, kedua pihak juga sepakat untuk mengadakan *ASEAN-China Business and Investment Summit* dan *ASEAN-China Business Council*.

Dalam Rencana Aksi ini Wen Jiabao mengajukan ide untuk mengadakan pameran perdagangan internasional tahunan yang diadakan di Nanning dalam rangka fasilitasi kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN. Pameran ini kemudian dinamakan China-ASEAN Expo. CAEXPO mengundang tidak hanya negara anggota ASEAN tetapi juga beberapa negara mitra dagang lainnya. Penyelenggaraan pameran ini memang dapat menguntungkan ASEAN, namun China sendiri akan lebih diuntungkan. Pemilihan Nanning sebagai tempat pameran akan menguntungkan China karena berarti ini merupakan pengenalan salah satu kota di China kepada ASEAN dan mitra dagang lainnya sebagai salah satu tempat dimana mitra dagang dapat berinvestasi di China. China juga diuntungkan dengan masuknya para peserta pameran ke China karena ini berarti China mendapatkan devisa dari turis yang datang.

Dalam Rencana Aksi poin 2.2.3, China berjanji untuk mendorong perusahaan-perusahaan di China untuk menjadikan negara anggota ASEAN sebagai prioritas tujuan investasi dan sebaliknya juga untuk menciptakan iklim yang menarik dan kondusif bagi arus investasi. Sementara itu, pemerintah China sendiri juga menerapkan strategi “going out” yang mendorong antusiasme perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi di ASEAN. Dorongan ini berupa dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan dana dan himbauan langsung untuk menjadikan ASEAN sebagai target ODI China.

¹⁹² Poin yang dimaksud berada dalam *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. Data diakses dari <http://www.aseansec.org/16805.htm>, tanggal 21/4/2011. Perincian perjanjian terlampir.

China juga tertarik untuk meningkatkan investasi di ASEAN dengan adanya Daerah Investasi ASEAN (AIA— *ASEAN Investment Area*) yang disetujui anggota ASEAN pada tahun 1998. Pada dasarnya AIA ditujukan untuk mendorong lebih banyak lagi investasi yang masuk ke negara anggota ASEAN. AIA berimplikasi pada strategi investasi dan aktivitas produksi di kawasan.¹⁹³ AIA mendorong investor untuk berinvestasi di ASEAN dan menyediakan lingkup yang lebih luas bagi pembagian kerja dan aktivitas industri sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya dan daya saing.¹⁹⁴

FDI China yang masuk ke ASEAN berasal dari perusahaan negara (SOE), dan perusahaan-perusahaan swasta yang terdiri dari perusahaan asing, perusahaan swasta domestik, dan usaha gabungan swasta lokal dan asing. Sebagian besar FDI yang masuk dari China berasal dari SOE yang dikuasai oleh pemerintah China. Firma-firma China ini membangun pabrik-pabrik manufaktur di ASEAN yang berpotensi menggantikan produsen lokal. Dua tujuan utama investasi China di ASEAN adalah untuk pencarian energi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara miskin dan berkembang di Asia Tenggara. Dua kebijakan ini dikenal dengan nama *oil-nation diplomacy* dan *infrastructure diplomacy*.

China menanamkan investasi terkait dengan pencarian energi di Asia Tenggara dengan cara mengerahkan SOE-SOE China yang bergerak dalam pencarian minyak seperti *China Petroleum and Chemical Company* (SINOPEC), *China National Petroleum Company* (CNPC), dan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC). Walaupun Asia Tenggara tidak memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun pasokan minyak dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina cukup penting sehingga negara ini tidak lepas dari diplomasi China untuk eksplorasi minyak di negara-negara tersebut.¹⁹⁵ Peran signifikan pemerintah dapat dilihat dari bantuan pemerintah dalam usaha lobi-lobi politik ke beberapa negara dan

¹⁹³ “ASEAN Investment Area: An Update”, diakses dari <http://www.aseansec.org/7664.htm>, tanggal 23/4/11.

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Dwijaya Kusuma, *China Mencari Minyak: Diplomasi China ke Seluruh Dunia 1990-2007*. (CCS: 2008), hlm. 82.

dukungan modal yang sangat besar, baik berupa pinjaman ataupun pemberian modal ke tiga perusahaan minyak milik negara.¹⁹⁶ Pada tanggal 14 Maret 2005 China mengajak Filipina dan Vietnam untuk menandatangani kesepakatan untuk melakukan survei untuk mencari cadangan minyak di Laut China Selatan.

Dalam bidang infrastruktur China merupakan investor terbesar di Kamboja dan China juga memberikan bantuan berupa kerjasama bilateral yang berupa bantuan skala besar untuk konstruksi infrastruktur di Vietnam, Myanmar, dan Laos.¹⁹⁷ Di Kamboja, perusahaan negara China juga berinvestasi besar-besaran pada sektor infrastruktur dan kebutuhan dasar, contohnya adalah *China Road and Bridge Corporation* dan *China International Water and Electric Company*.¹⁹⁸ Di Vietnam, terdapat setidaknya 50 perusahaan China yang berinvestasi di sektor pembangkit listrik, pertambangan, besi dan baja, sepeda motor, bahan kimia, dan bahkan persenjataan. Beberapa SOE China yang berinvestasi di Vietnam adalah *China Metallurgical Construction Corporation*, *China Iron and Steel*, dan *China State Construction Engineerir and Harbin Power*.¹⁹⁹

China melihat bahwa penanaman modal untuk membangun infrastruktur di negara-negara ASEAN, terutama yang berbatasan langsung dengan China, akan menguntungkan dalam jangka panjang karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan perdagangan. Selain itu, China juga berniat untuk membangun infrastruktur jalan dengan rute transportasi yang menghubungkan Yunnan dan Asia Tenggara. Inisiatif China ini dinamakan dengan “Bridgehead Strategy” yang diumumkan oleh Presiden Hu Jintao pada bulan Juli 2009. Yunnan adalah propinsi di China yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Laos, dan Myanmar dan merupakan salah satu propinsi yang paling tinggi volume ekspor impornya dengan Asia Tenggara. Perdagangan China dan ASEAN di Yunnan dan Guangxi mencapai

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁹⁷ “Beijing Keen to Unlock ASEAN Investment Doors”, diakses dari http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HK02Cb01.html, tanggal 20/4/2011.

¹⁹⁸ Dalam makalah Stephen Frost, *Going to Southeast Asia: Chinese Foreign Direct Investment and Its Implications*. (City University of Hong Kong), hlm. 21. Diakses dari http://www.cctr.ust.hk/materials/conference/workshop/2/Frost-SE_Asia_Dstr-01.pdf, tanggal 27/4/11.

¹⁹⁹ *Ibid*.

35.6% yakni sebesar 1,6 milyar dolar atau sekitar 3.8% dari total perdagangan China dan ASEAN.²⁰⁰

ACFTA telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi China dan ASEAN. Setelah ACFTA diajukan, China dan Bank Pembangunan Asia (ADB) berinvestasi besar-besaran di Asia Tenggara. China bahkan mendirikan *China-ASEAN Fund* sebesar 10 milyar dolar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan. Sistem kereta api yang menghubungkan China dan negara-negara aliran Sungai Mekong akan selesai pada tahun 2020 dengan China sebagai investor utama.²⁰¹ Dengan besarnya investasi China di ASEAN, China berharap ini akan menstabilkan ekonomi propinsinya yang berada di sebelah selatan dan berbatasan langsung dengan ASEAN dan akan meningkatkan level pembangunan ekonomi di propinsi-propinsi miskin China yang berada di barat daya. Selain itu China juga harus membantu ASEAN dalam bersaing dengan China karena jika ASEAN tidak dapat bersaing dengan China maka kesempatan investasi China di ASEAN pun akan rendah karena rendahnya daya serap ASEAN.

Selain perusahaan milik negara, perusahaan swasta China juga berinvestasi di ASEAN. Investasi yang dilakukan pihak swasta China sebagian besar juga berkisar pada investasi yang bertujuan mengeksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam dan bahan mentah yang berasal dari ASEAN. Di Indonesia, pengusaha swasta China menanamkan modal besar-besaran pada perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan yang juga berbatasan dengan sebagian wilayah Malaysia. Seperti yang diketahui, Indonesia dan Malaysia adalah beberapa dari negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Investasi pengusaha swasta China di Thailand umumnya berada di sektor tekstil, garmen, peralatan elektronik rumah tangga, mesin bangunan, rokok, obat-obatan, perdagangan, dan perumahan.²⁰² Beberapa perusahaan China yang berinvestasi di Thailand adalah Dongguan Nokia, Zhuhai Canon, dan Intel China. Di Singapura investasi China kebanyakan berada pada sektor asuransi, perbankan,

²⁰⁰ Inayati, *Ed, Op. Cit.*, hlm. 93.

²⁰¹ Montesano and Lee Poh Onn *Ed., Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁰² Goh and Simon, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 28

finansial, pengapalan barang, dan perdagangan.²⁰³ Walaupun sebagian besar perusahaan China yang berinvestasi di Vietnam dan Kamboja adalah perusahaan negara, terdapat pula perusahaan swasta China yang berinvestasi di kedua negara tersebut, misalnya adalah perusahaan telekomunikasi Huawei.

China memiliki beberapa alasan yang kuat untuk menanamkan modal di ASEAN selain untuk menjalankan misi pencarian energi, eksploitasi sumber daya alam, dan peningkatan ekonomi propinsi China yang berbatasan dengan Asia Tenggara. Pertama, Asia Tenggara memiliki beberapa pasar yang kurang atau bahkan tidak diminati sama sekali oleh beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa karena alasan-alasan politik. Myanmar adalah contoh negara non-demokrasi dan seringkali dianggap sebagai salah satu negara dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia terburuk di dunia. Karena alasan-alasan HAM ini, banyak negara yang memilih untuk tidak melakukan kerjasama ekonomi sama sekali dengan Myanmar.²⁰⁴ Dalam hal ideologi politik, China jelas bersebrangan dengan Amerika Serikat dan seringkali tidak sepaham dalam strategi sosialisasi dan aplikasi *soft power* dan kebijakan ekonomi. China tidak melihat ada sesuatu yang salah dengan berinvestasi di Myanmar ataupun negara non-demokrasi lainnya yang tidak sepaham dengan AS. Sebaliknya, China lebih melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk merangkul negara-negara yang tidak pro-AS dan melihatnya sebagai mitra kerjasama yang dapat membantunya melancarkan strategi ekonominya di kawasan.

Alasan kedua China mendorong investasi ke ASEAN lebih karena alasan ekonomi, yakni alasan efisiensi biaya produksi. Beberapa negara anggota ASEAN menetapkan upah buruh yang bahkan lebih rendah dari China (lihat tabel 4.2). Negara-negara CLMV menetapkan upah buruh yang lebih rendah dibandingkan China, terutama di propinsi-propinsi China yang paling maju seperti Beijing dan Shanghai. Jika China berinvestasi di negara tetangga yang jaraknya relatif dekat dan berupah lebih rendah, maka China akan dapat memotong biaya produksi dan

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

meningkatkan efisiensi kerja. Jarak yang relatif dekat juga menjadi nilai tambah Asia Tenggara karena akan memudahkan pergerakan barang dan jasa.

Tabel 4.3 Perbandingan upah buruh di China dan negara anggota ASEAN (2000, 2003, 2005, 2006)

Negara	Upah Minimum	Upah Maksimum
China	270 RMB/bulan tahun 2005 di Jiangxi (41.49 USD).	750 RMB/bulan tahun 2006 di Shanghai (115.26 USD).
Indonesia	340.000 IDR/bulan tahun 2005 di Jawa Timur (39.44 USD).	884.628 IDR/bulan tahun 2005 di Jakarta (102.6 USD).
Laos	93.600 LAK/bulan pada tahun 2003 (11.63 USD).	
Vietnam	450.000 VND/bulan tahun 2006 (21.6 USD)	870.000 VND/bulan tahun 2006 di Hanoi dan Ho Chi Min City (41.76 USD)
Kamboja	45 USD/ bulan pada sektor tekstil, garmen, dan alas kaki.	

*Konversi ke dolar hanya sebagai panduan berdasarkan pada kurs dolar tanggal 24/4/2011.

Sumber: Data *International Labor Organization* (ILO). Data diakses dari <http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/minimumwages?pageClass=org.ilo.legislation.work.web.ReferencePage&LinkId=18357>, tanggal 24/4/2011.

4.1.2 Peningkatan Investasi ASEAN di China dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

China melihat FDI sebagai kesempatan penting untuk mengintegrasikan ekonominya ke pasar global dan mempromosikan pembangunan ekonominya, oleh karena itu pemerintah China pun memberlakukan berbagai macam kebijakan yang mendukung penarikan investasi ke dalam negeri. Sejak reformasi ekonomi China telah mengatur tingkat dan jenis penanaman modal asing dan sejak Mei 1995 pengawasannya dilakukan oleh tim Pimpinan Penanaman Modal Asing Dewan Negara. Kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang ramah dan kondusif sehingga penanam modal dari seluruh dunia datang untuk berinvestasi, tidak terkecuali dari ASEAN.

Keanggotaan China di WTO membuka pintu investasi yang lebih besar dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang lebih menguntungkan bagi investor asing. Sebelum China menjadi anggota WTO, pasar domestik China berada di bawah proteksi ketat pemerintah, sehingga hanya beberapa perusahaan diperbolehkan berdagang dengan pihak asing dan pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan mengenai siapa yang akan memperoleh keuntungan dari perdagangan dan investasi asing.²⁰⁵ Kebijakan ini menyebabkan perdagangan dan investasi asing sifatnya sangat selektif dan rentan dipolitisasi. Setelah menjadi anggota WTO, komitmen yang dijalankan China cenderung lebih ekstensif dibandingkan dengan anggota WTO lainnya yang masuk kategori negara berkembang.²⁰⁶ Komitmen ini telah mendorong integrasi ke ekonomi dunia dan menarik lebih banyak lagi investasi yang masuk.

Setelah tahun 2000, China menarik sekitar 10% dari total FDI di seluruh dunia jauh di atas ASEAN yang hanya mampu menarik kurang dari 4% FDI.²⁰⁷ Menariknya pasar China menyebabkan ASEAN pun tertarik untuk berinvestasi di China. Investasi ASEAN di China jauh lebih besar dibandingkan investasi China di ASEAN. Tidak seperti investasi China di ASEAN yang cenderung didominasi sektor energi, migas, dan infrastruktur, investasi ASEAN di China lebih bervariasi dan mayoritas berada pada sektor manufaktur dan jasa. Pada tahun 1991, investasi ASEAN di China hanya sekitar US\$ 90 juta dan naik menjadi US\$ 4,8 milyar pada tahun 1998 dan US\$ 26,2 milyar tahun 2001 atau sekitar 6.6% dari total FDI yang masuk ke China.²⁰⁸ Di bawah kerangka kerjasama ACFTA, total investasi China di ASEAN hingga tahun 2008 melesat mencapai US\$ 6,1 milyar sedangkan investasi ASEAN di China pada tahun 2008 saja mencapai US\$ 5,6 milyar.²⁰⁹ Pada

²⁰⁵ Shirk, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁰⁶ *Trade Policy Review: China 2008*, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²⁰⁷ Goh and Simon, *Op. Cit.*, hlm.26.

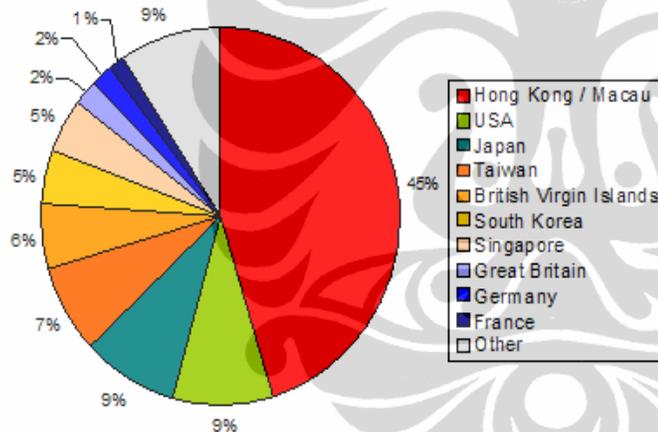
²⁰⁸ Goh and Simon, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁰⁹ *ASEAN-China Investment Agreement: Fact Sheet*, diakses dari <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/AEC/2009-AEC-031.pdf>, tanggal 24/4/11.

pertengahan tahun 2010, total investasi dua arah China-ASEAN mencapai US\$ 69,4 milyar.²¹⁰

Singapura adalah negara ASEAN sumber FDI terbesar di China. Singapura menguasai sekitar 70% investasi ASEAN di China yang sebagian besarnya berada di sektor manufaktur dan jasa.²¹¹ Bahkan, Singapura juga merupakan salah satu sumber FDI terbesar di China (lihat grafik 4.1). Pada tahun 2004 Singapura adalah investor terbesar ke-7 di China dan pada tahun 2008 naik menjadi investor ke-3 terbesar China.²¹² Saham FDI Singapura di China mencapai 5% dari total investasi langsung yang masuk ke China. China adalah salah satu pasar terbesar bagi perusahaan investasi terbesar Singapura, *Temasek Holding*.

Grafik 4.1 Negara sumber FDI China (2000-2004)



Sumber: Biro Statistik Nasional China, MOFCOM, diakses dari http://www.china-profile.com/data/fig_fdi_3.htm

Walaupun bukan sumber IDI utama China, beberapa anggota ASEAN lain juga mulai meningkatkan investasi mereka di China terutama sejak Perjanjian

²¹⁰ Disampaikan dalam pidato Konselor Perdagangan Filipina Simeon L. Fernandez pada Forum Kerjasama Ekonomi China-ASEAN tanggal 5/8/10 di Beijing. Diakses dari http://www.philembassychina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Aremarks-by-commercial-counsellor-hernandez-in-the-china-zhengzhou-asean-econ-cooperation-forum&catid=25%3Aeconomic-news&lang=en, tanggal 1/5/11.

²¹¹ Goh and Simon, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²¹² "China attracts \$52 bln investment from ASEAN", *Loc. Cit.*

Investasi ASEAN-China yang disepakati kedua pihak pada tahun 2009. Kelompok perusahaan Sinarmas dari Indonesia turut mengembangkan Zona Pembangunan Ekonomi Pelabuhan Qinzhou, China, dengan berinvestasi sebesar US\$ 1,2 miliar atau sekitar 10,88 triliun rupiah.²¹³ Malaysia, Thailand, dan Brunei juga mulai meningkatkan investasinya di China.

Ada beberapa faktor yang mendorong meningkatnya jumlah investasi ASEAN di China. Pertama, China memberlakukan beberapa kebijakan khusus yang dapat menarik investor ke dalam negeri, misalnya perbedaan pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah China bagi perusahaan asing (*FIEs—Foreign Invested Enterprises*) berbeda dengan pajak yang ditetapkan kepada perusahaan swasta domestik. FIE tidak diharuskan membayar pajak konstruksi dan perawatan kota seperti layaknya perusahaan lokal²¹⁴, walaupun FIE sebenarnya sangat diuntungkan dengan struktur kota dan infrastruktur China yang mendukung efektifitas dan efisiensi bisnis. Setelah penerapan Hukum Pajak Pendapatan Perusahaan²¹⁵ pada tanggal 1 Januari 2008, pemerintah China juga memotong pajak pendapatan FIE yang tadinya sebesar 33% menjadi 25%. Daerah Ekonomi Khusus juga dirancang pemerintah untuk menarik FDI dan menguntungkan FIE. Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah khusus menerima perlakuan pajak khusus yang cenderung lebih ringan. Pemotongan pajak serta perlakuan yang baik kepada investor asing menjadi faktor penting naiknya IDI dari luar, termasuk dari Asia Tenggara.

Kedua, para investor dari Asia Tenggara yang datang ke China daratan untuk berinvestasi tertarik pada tiga unsur terpenting yang dimiliki oleh China; infrastruktur yang mendukung, birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dan etos kerja buruh China yang dinilai sangat baik dan efektif. Ketika investor datang ke China untuk tujuan berinvestasi, maka yang perlu dilakukan hanyalah menemui walikota atau salah satu wakil dari pemerintah China di daerah tujuan dan menyampaikan

²¹³ “Sinarmas Investasi Rp 10 Trilyun di China”, 24/10/10, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/1287888564/sinarmas-investasi-rp-10-triliun-di-china>, tanggal 24/4/11.

²¹⁴ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 41.

²¹⁵ Hukum yang dimaksud adalah *Enterprise Income Tax Law*.

maksudnya datang ke China. Menurut pengalaman SK Budiardjo²¹⁶, salah seorang pengusaha Indonesia yang pernah berinvestasi di Guangzhou, mendirikan pabrik di China sangat mudah. Walikota Guangzhou sendiri sangat membantu dalam membuka pabrik dispenser yang pada tahun 2000 didirikan oleh Budiardjo. Ini menunjukkan peranan negara yang sangat baik dalam menarik investor asing masuk, yakni dengan mengerahkan seluruh pejabatnya untuk turun langsung membantu pengusaha asing berinvestasi di daerahnya.

China memiliki industri basis yang sangat maju dan jaraknya relatif dekat dengan pabrik-pabrik lainnya yang berukuran lebih kecil dan pabrik-pabrik ini membeli bahan-bahan dasar produk mereka dari industri basis tersebut.²¹⁷ Infrastruktur yang sangat baik mempercepat perpindahan bahan dasar yang dibeli dari industri basis ke pabrik yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha skala kecil dan menengah. Infrastruktur yang baik juga memperlancar distribusi dan perpindahan barang yang kemudian diekspor ke luar China. Birokrasi yang tidak berbelit-belit dan administrasi yang relatif cepat (hanya membutuhkan waktu sekitar tiga hari) sangat memudahkan pengusaha asing yang datang. Pemerintah juga tidak mengenakan tarif kepada barang-barang yang diekspor oleh perusahaan asing selain pajak penghasilan. Budiardjo juga mengungkapkan bahwa dengan modal awal sekitar tiga milyar rupiah, ia telah dapat mendirikan pabrik di China, yang jika ia dirikan di Indonesia maka akan membutuhkan biaya lebih dari sepuluh kali lipatnya.

Menurut Budiardjo, etos kerja yang baik dari buruh China menjadi faktor penting lain dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi dispenser pabriknya. Dalam waktu seminggu, pabriknya dapat mengekspor dispenser sebanyak sepuluh kontainer, yang jika diproduksi di Indonesia maka kuota sepuluh kontainer tidak dapat tercapai dalam waktu sebulan. Dukungan infrastruktur yang baik, birokrasi dan proses administrasi yang singkat, serta etos kerja buruh yang tinggi menjadikan nilai tambah China dan menghemat banyak biaya pengusahaan asing yang menanamkan modal. Dengan tiga kemudahan yang ditawarkan China, investor dari

²¹⁶ Hasil wawancara dengan SK Budiardjo, Mantan *Consultant Management* Mandala Airlines, dan pemilik PT. Orlen Prima Sejahtera, 12 Mei 2011, Jakarta.

²¹⁷ *Ibid.*

ASEAN pun berlomba-lomba untuk memasuki pasar China yang kondusif, efektif, efisien, dan ramah.

Ketiga, China memiliki kebijakan yang bernama “kebijakan netral” yang ditujukan untuk menciptakan perdagangan yang adil bagi ekspor agar dapat berkompetisi di area internasional.²¹⁸ Ada beberapa jenis perusahaan asing yang menanamkan modal di China. Pertama, perusahaan asing yang memang mengincar pasar domestik China dan yang menanamkan modal di China untuk menekan ongkos produksi produk yang akan dijual kembali. “Kebijakan netral” adalah kebijakan yang mendukung ekspor perusahaan yang bertempat di China karena jika 70% produk perusahaan tersebut diekspor ke luar China maka perusahaan tersebut akan menikmati 50% potongan pajak pendapatan perusahaan.²¹⁹ Sejak reformasi pajak dilakukan mulai 1 Januari 2008, China menghilangkan pajak di sektor pertanian, pembebasan pajak pendapatan perorangan, reformasi pajak konsumsi, dan pengurangan pajak terhadap bunga bank.²²⁰ Reformasi pajak menjadikan China sebagai negara dengan pajak yang relatif rendah sehingga menarik bagi investor dan pengusaha.

China mengategorikan jenis proyek investasi asing yang masuk ke dalam empat kategori: industri yang didorong, diizinkan, dibatasi, dan dilarang.²²¹ Yang termasuk ke dalam kategori “didorong” adalah jenis proyek yang didukung penuh oleh pemerintah China dan dimaksudkan untuk mengembangkan teknologi pertanian, mengembangkan energi, transportasi atau industri yang memproduksi atau memproses bahan mentah yang penting, serta proyek-proyek yang memanfaatkan penuh sumber daya manusia dan alam di pusat China dan bagian barat China.²²² Sebagian investasi ASEAN di China masuk ke dalam kategori yang didukung oleh pemerintah China karena umumnya negara ASEAN adalah negara-negara yang kaya

²¹⁸ Dalam makalah K.C. Fung, Hitomi Iizaka, *et. al.*, *Foreign Direct Investment in China: Policy, Trend, and Impact*, yang disiapkan untuk Konferensi Internasional “China’s Economy in the 21st Century”, yang diadakan pada tanggal 24-25 Juni 2002 di Hong Kong. Diakses dari http://www.hiebs.hku.hk/working_paper_updates/pdf/wp1049.pdf, tanggal 25/4/11.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 81.

²²¹ *Ibid.*, hlm. 39.

²²² *Ibid.*

akan bahan mentah dan sumber daya alam dan juga mengandalkan sektor pertanian. Contoh pebisnis ASEAN yang berinvestasi di China dalam bidang pertanian adalah Group Kuok dari Malaysia yang bergerak di industri perkebunan.²²³ Beberapa pebisnis ASEAN juga bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, misalnya Group Lippo dari Indonesia yang memiliki kantor di China daratan, Hong Kong, dan Makau.

Sebagian besar ekspor China didominasi oleh sektor manufaktur. Pada tahun 2006 manufaktur menyumbang 92.4% dari total ekspor barang China.²²⁴ Kebijakan pemerintah China memang fokus kepada ekspor sektor ini, oleh karena itu kebijakan investasi ataupun perpajakan sifatnya mendukung manufaktur. Dukungan terhadap sektor ini ditandai dengan rendahnya pajak bagi produk manufaktur yang tarif MFN nya hanya sebesar 9.7%.²²⁵ Tarif ini termasuk ringan, bahkan bagi standar negara berkembang sekalipun. Kebijakan ini mendorong perusahaan asing yang datang dari negara berkembang yang bergerak di bidang manufaktur berinvestasi China, tidak terkecuali dari ASEAN.

Negara ASEAN yang merupakan salah mitra bisnis terpenting China di kawasan adalah Singapura. China berhasil menarik lebih banyak lagi investasi yang datang dari Singapura dengan ikatan bisnis yang kuat dengan negara tersebut. Penting bagi China untuk memanfaatkan hubungan ekonominya dengan Singapura karena negara tersebut adalah salah satu “diaspora” China di kawasan. Kebijakan perdagangan yang mendorong ekspor mampu menarik investasi dari Singapura. Singapura menjadi salah satu investor terbesar dalam bidang manufaktur di propinsi Shaanxi China selain Hong Kong, Amerika Serikat, dan British Virgin Islands. Selain dari perusahaan negara, investasi dari Singapura juga datang dari MNC-MNC asing di Singapura yang merelokasi operasinya ke China dan dari usaha kecil dan menengah Singapura yang tertarik dengan upah buruh yang murah dan akses ke pasar China yang besar.²²⁶

²²³ Lam and Graham, *Op. Cit.*, hlm.364

²²⁴ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 109.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ Chia Siow Yue, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

Di samping kebijakan-kebijakan investasi yang ramah investor serta lingkungan bisnis yang kondusif, China juga diuntungkan dari apa yang dinamakan *guanxi* atau ikatan sosial dalam menarik investor dari Asia Tenggara. *Guanxi* adalah istilah yang digunakan untuk mewakili jaringan masyarakat China di ASEAN.²²⁷ Jaringan masyarakat China di ASEAN sangatlah penting karena sebagian besar pebisnis ASEAN yang menanamkan modal atau membuka usaha di China adalah orang-orang keturunan China. Mereka adalah masyarakat China di perantauan yang telah bermigrasi sejak lama ke Asia Tenggara dan merupakan salah satu penghubung perdagangan antara China dan Asia Tenggara sejak abad ke-4 dan 5. Di masa sekarang, masyarakat keturunan China di ASEAN umumnya juga merupakan pelaku bisnis utama di perusahaan-perusahaan besar di Asia Tenggara (lihat tabel 4.3). Umumnya para pengusaha China perantauan ini menjalin bisnis dengan China Daratan melalui hubungan kekeluargaan ataupun melalui koneksi pebisnis China di Asia Tenggara. Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat China di Asia Tenggara tertarik berbisnis di China, yakni faktor ekonomi dan sosial.

Tabel 4.4 Pemegang saham firma-firma utama di 4 negara ASEAN berdasarkan tipe kepemilikan (%)

Negara	Pemerintah	Lainnya	Asing	China
Malaysia	48.0	22.6	4.1	25.3
Indonesia	67.1	7.4	3.1	22.4
Thailand	13.2	9.9	45.6	31.3
Filipina	31.4	16.9	29.5	22.2

Sumber: David C. Kang dalam *China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia*. (Columbia University Press : 2007), hlm. 135.

Sebelum tahun 1992, investor dari barat masih ragu untuk berinvestasi di China Daratan. Investasi di China sejak reformasi ekonomi hingga tahun 1992 umumnya datang dari Hong Kong dan Asia Tenggara.²²⁸ Investasi ini ternyata cukup

²²⁷ Lam and Graham, *Op. Cit.*, hlm. 360.

²²⁸ Dalam paper Dr Wang Wangbo, *The Character of Southeast Asian Chinese Investment in Mainland China since 1978*, yang dipresentasikan pada “Simposium Internasional China dan Asia Tenggara” pada tanggal 24-25 September 2004 di Universitas Xiamen. Diakses dari

sukses sehingga menjadi pendorong bagi investor dari negara lain untuk berinvestasi di China. Investasi dari ASEAN terus berlanjut berdatangan ke China dan sebagian besar investor merupakan masyarakat keturunan China yang menetap di Asia Tenggara. Faktor keuntungan yang akan diraih dan rasionalisasi bisnis menjadi alasan utama bagi investor ini. Mereka ingin meraih profit yang lebih besar dengan menanamkan modal di China, memperoleh keuntungan dari iklim investasi yang kondusif serta fasilitas yang diberikan pemerintah China kepada investor asing.

Faktor sosial yang mendorong ikatan masyarakat China di Asia Tenggara ini berinvestasi adalah karena mereka dapat memanfaatkan koneksi yang mereka miliki di China daratan, yang merupakan asal-asul mereka. Sistem kekeluargaan serta keturunan mempengaruhi para investor China yang datang dari Asia Tenggara untuk berinvestasi di China. Rasionalitas bisnis yang didukung oleh faktor sosial ini memperkuat keinginan masyarakat keturunan China di ASEAN untuk meluaskan jaringan bisnisnya di China. Contohnya, Group Lippo yang merupakan milik keluarga Riady menanamkan sebagian besar investasinya di Fujian yang merupakan tanah leluhur keluarga Riady²²⁹ walaupun sebenarnya dilihat dari sudut pandang bisnis akan lebih menguntungkan berinvestasi di Shanghai daripada di Fujian. Kesuksesan usaha milik warga Asia Tenggara keturunan China di China daratan merupakan jaringan internasional modal China yang mendiversifikasi dan memperkuat perekonomian China dan hal ini dipahami betul oleh pemerintah China.²³⁰

Faktor pendorong lain yang meningkatkan arus investasi masuk dari ASEAN ke China setelah keanggotaan China di WTO adalah karena China memaksimalkan setiap potensi yang dimilikinya dan memetakan keunggulan tiap propinsi yang kemudian dijadikan nilai jual lebih kepada para investor asing. Setiap propinsi di China memiliki keunggulan masing-masing yang ditonjolkan sehingga setiap investor

[http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA_Workshop/CSEA_Workshop/PAPERS/SeptemberSymposium/WangWangbo\(English\).pdf](http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA_Workshop/CSEA_Workshop/PAPERS/SeptemberSymposium/WangWangbo(English).pdf), tanggal 1/5/11.

²²⁹ Lam and Graham, *Op. Cit.*, hlm. 362.

²³⁰ Yuan Wang, Rob Goodfellow, *et.al.*, *Menembus Pasar China*. (Kepustakaan Populer Gramedia: 2000), hlm. 19.

yang datang dapat memilih untuk berinvestasi di daerah mana sesuai dengan bidang usahanya. Guangdong merupakan propinsi di China yang memiliki nilai ekspor terbesar dan merupakan produsen terbesar dalam sektor industri.²³¹ Propinsi ini paling unggul dalam bidang manufaktur dan memiliki investasi di luar negeri sebesar US\$ 238 juta di Kamboja, Vietnam, Indonesia, dan lainnya.²³² Guangdong merupakan salah satu daya tarik utama investor ASEAN ke China mengingat posisinya sebagai produsen manufaktur terbesar dan letaknya yang relatif dekat dengan perbatasan China dan beberapa negara Asia Tenggara. Guangdong juga dekat dengan Hong Kong yang merupakan salah satu penerima investasi dari ASEAN dan biasanya digunakan sebagai pintu masuk ke China Daratan oleh pebisnis ASEAN.

China juga memiliki Propinsi Jiangsu yang merupakan penghasil *integrated circuit* terbesar di China, Shanghai yang merupakan pusat perbankan, transportasi, dan komunikasi serta perumahan, Zhejiang yang adalah penghasil perikanan pantai terbesar di China, Shandong sebagai penghasil produk agrikultur nomor satu China, serta Tianjin yang menampung sepertiga keseluruhan perusahaan teknologi tinggi yang ada di China.²³³ Pemetaan yang jelas bagi setiap potensi China mempermudah investor dalam menentukan lokasi tempat investasi ditanam.

Nilai tambah dari China adalah karena setiap kepala daerah atau propinsi China mengetahui persis persediaan dan permintaan setiap produk unggulan daerahnya. Wakil-wakil pemerintah mengetahui dengan pasti apa-apa saja yang menjadi kebutuhan utama setiap daerah dan propinsi sehingga berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang jika tidak dapat dipenuhi di dalam negeri maka mereka akan mengimpor atau mengundang investor asing untuk berinvestasi pada produk tersebut. Di setiap kantor perwakilan dagang China di negara-negara ASEAN dan negara lainnya tersedia informasi mengenai pasar China dan kebutuhan setiap propinsi China serta tata cara berinvestasi di China. Informasi-informasi ini memudahkan para investor untuk mempelajari tata cara berbisnis di China daratan.

²³¹ Dharmawan, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 89.

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*, hlm. 89-94.

4.2 Kebijakan Pemerintah China terhadap Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Asing Serta Implikasinya terhadap Hubungan Ekonominya dengan ASEAN pasca Keanggotaan China di WTO

Ketika investasi keluar ditetapkan sebagai bagian dari rencana pembangunan, Jiang Zemin mengumumkan bahwa sejak tahun 1992 perusahaan-perusahaan China dapat berkeespansi ke luar negeri. Sejak saat itu, ekspansi perdagangan China ke Asia Tenggara datang dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan asal China di kawasan, baik yang merupakan perusahaan negara (SOEs) maupun perusahaan swasta (PEs—*Private Enterprises*). SOE adalah perusahaan milik negara yang asetnya sepenuhnya dikuasai oleh negara ataupun perusahaan negara yang didanai oleh investasi asing. Sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang masuk kategori non-publik yang merupakan milik individu ataupun gabungan. Perusahaan swasta China dibagi ke dalam beberapa kategori, perusahaan swasta domestik, perusahaan asing (FIE), dan perusahaan swasta gabungan milik warga domestik dan asing.

Perusahaan negara dan swasta China datang dan berekspansi ke ASEAN sebagai perpanjangan tangan China dalam menjalani misi mereka di kawasan, yakni mencari profit, energi, dan bahan mentah. Pemerintah China bertanggung jawab atas kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut dan di balik layar pejabat pemerintah China mengawasi setiap kebijakan yang diambil mereka. Pertanyaan yang akan muncul adalah mengapa perusahaan-perusahaan China berekspansi ke ASEAN, jenis perusahaan China manakah yang lebih dominan menjalankan bisnis di ASEAN dan seperti apakah kebijakan pemerintah China dalam mendukung dan mendorong wakil-wakil bisnisnya ini untuk meningkatkan kerjasamanya dengan ASEAN sekaligus meraih tujuan utama mereka datang ke kawasan, yakni kepentingan politik dan ekonomi China. Analisis dari tiga pertanyaan di atas akan menjadi pembahasan utama subbab ini.

4.2.1 Ekspansi Perusahaan Milik Negara China di ASEAN

Perusahaan-perusahaan milik negara China yang sangat besar umumnya bergerak sesuai kendali negara melalui kepemilikan saham mayoritas, namun menarik keuntungan dari anak-anak perusahaannya yang terdaftar di pasar ekuitas Hong Kong.²³⁴ SOE –SOE China ini menyumbangkan sekitar 35% dari total PDB negara.²³⁵ Sebagian besar perusahaan negara China yang berekspansi di Asia Tenggara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pencarian energi dan bahan mentah (lihat tabel 4.4).

Tabel 4.5 Daftar SOE China terpilih di Asia Tenggara

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
China State Construction Engineering Corp.	Konstruksi.
China National Petroleum Corporation (CNPC)	Minyak.
China National Offshore Oil Corporation	Minyak.
Sinopec	Minyak.
Shanghai Baosteel Group Ltd.	Industri besi dan baja.
Sinochem Corporation	Pertanian, energi, bahan-bahan kimia, <i>real estate</i> and keuangan.
China Metallurgical Import & Export Corp.	Metalurgi.
Iron & Steel Corporation of Beijing	Besi dan baja.
China Worldbest Group.	Serat alam/sintetis, percetakan, tekstil.
China Minmetals Corporation	Logam dan mineral.
Bank of China	Perbankan.
Agricultural Bank of China	Perbankan.
Haier Group.	Peralatan elektronik rumah tangga.

Sumber: Elaborasi penulis.

Ekspansi SOE China yang kebanyakan bergerak dalam bidang pencarian dan pengamanan energi, migas, dan sumber daya alam ini sesuai dengan kebijakan energi China yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan cara menambah persediaan domestik melalui impor dan mendorong SOE untuk

²³⁴ Ian Bremmer, *Akhir Pasar Bebas: Siapa Pemenang dalam Perang antara Negara dan Swasta?*. (PT Gramedia Pustaka Utama: 2010), hlm. 152.

²³⁵ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 91.

berinvestasi di negara yang kaya energi, serta pendirian cadangan minyak yang strategis untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan domestik. SOE juga harus mampu berperan dalam membuka akses pasar dan sumber energi asing yang dapat berkontribusi terhadap cadangan energi dan bahan mentah China dalam jangka panjang. Negara memaksakan pengaruh yang cukup besar pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh SOE, misalnya melalui penetapan harga-harga energi di dalam negeri dan mengendalikan penentuan personil untuk jabatan-jabatan penting.²³⁶

Peran pemerintah China dalam perusahaan milik negara sangat besar karena pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam manajemen dan operasi perusahaan negara. Dalam rangka meningkatkan peran dan memajukan SOE, pemerintah China sejak tahun 1997 mengadaptasi kebijakan penjualan perusahaan negara kelas kecil dan menengah kepada swasta dan merestrukturisasi SOE-SOE yang besar.²³⁷ Pemerintah juga berperan sebagai pendukung utama perusahaan milik negara. Dukungan utama umumnya berupa sumber dana. Biaya operasional SOE bergantung pada pinjaman dari bank milik negara ataupun dari bantuan langsung pemerintah. Dana untuk menjalankan perusahaan terutama berasal dari bank negara dan pemerintah China sendiri pun mendukung secara finansial dengan memberikan subsidi yang memungkinkan China bergerak mengalahkan pesaing-pesaing mereka atau bahkan membeli produk-produk dengan harga di atas harga pasar untuk kontrak-kontrak kerja jangka panjang.²³⁸

Pemerintah China menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung dan mendorong SOEnya berekspansi keluar China, misalnya dengan melakukan monopoli perdagangan. Pemerintah telah memisahkan produk-produk atau jenis usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan negara dan swastanya. Misalnya, ekspor beras, jagung, kapas, minyak mentah, minyak yang telah diproses, ekspor rokok hanya boleh dilakukan oleh SOE, sementara perusahaan swasta boleh melakukan ekspor produk lainnya.²³⁹ Dengan demikian, perusahaan negara memonopoli usaha

²³⁶ Bremmer, *Op. Cit.*,

²³⁷ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 92.

²³⁸ Bremmer, *Op. Cit.*, hlm. 153.

²³⁹ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 79.

pencarian energi serta kebijakan perdagangan terkait energi, bahan mentah, dan sumber kebutuhan pangan utama lainnya. Selain memonopoli ekspor produk-produk yang sangat penting, pemerintah China juga terus mempertahankan kepemilikan negara akan industri-industri yang terkait dengan keamanan nasional, infrastruktur utama dan sumber daya mineral yang penting, industri yang menyediakan barang publik dan jasa, serta perusahaan-perusahaan yang menjadi tulang punggung negara dan industri teknologi tinggi.²⁴⁰ Pemerintah menjadi aktor utama dalam menentukan bidang usaha mana saja yang berada di bawah pengawasan ketat negara demi menjaga kelangsungan ekonominya dan menjamin tercapainya tujuan nasional China.

Selain untuk mengamankan cadangan minyak dan gas di negara-negara anggota ASEAN, China menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu target ekspansi perusahaan negaranya karena beberapa alasan. Deng Xiaoping memulai reformasi dengan cara membuka pasar China untuk investasi asing, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi China dan meroketnya jumlah perusahaan asing ataupun negara lain yang berinvestasi di China, China menyadari perlunya untuk melakukan tindakan yang lebih aktif seperti menanamkan investasi ke luar. Investasi di luar negeri diperlukan oleh China karena menyadari adanya komplementaritas dengan negara mitra ekonomi yang saling membutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik masing-masing. Pemerintah China menggalakkan program “going global” yang bertujuan untuk mendorong investasi keluar. Keputusan China untuk menanamkan modal di luar negeri dan menyebarkan SOE nya di ASEAN dapat dijelaskan dengan teori dasar perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) pada umumnya. Menurut John H. Dunning, sebuah perusahaan berinvestasi di negara asing berdasarkan tiga tujuan utama, yakni untuk mencari sumber daya alam, mencari pasar, dan mencari aset strategis lainnya.²⁴¹ Teori ini juga berlaku bagi China.

Negara anggota ASEAN sebagian besar adalah negara agraris dan merupakan eksporter bahan pangan pokok seperti beras yang juga merupakan makanan pokok masyarakat China pada umumnya. Untuk mengamankan sektor pangan maka China

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 92.

²⁴¹ John H. Dunning, *Multinational Enterprises and the Global Economy*. (Addison-Wesley:1993), hlm. 20.

mengirimkan perusahaan negaranya ke ASEAN untuk mengadakan kerjasama bidang pertanian dan bahan makanan. Contoh SOE China yang bergerak di bidang pangan dan pertanian dan berekspansi ke Asia Tenggara adalah *Hanzhou Provincial Enterprises* yang merupakan perusahaan gabungan China dengan perkebunan karet di Malaysia yang memproduksi sepatu untuk pelajar dan Sinochem Corporations yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan di Thailand dan Singapura.

Kebutuhan akan diversifikasi pasar menjadi faktor pendorong lainnya bagi China untuk berekspansi ke ASEAN. Ekonomi China selama lebih dari tiga dekade sangat bergantung kepada ekspor dan investasi asing. Perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal di China pada umumnya tidak sekedar mengincar pasar domestik China melainkan juga memanfaatkan China sebagai lokasi produksi dengan upah buruh yang rendah untuk mengekspor produk mereka ke luar China. Tingkat konsumsi domestik China cenderung lebih rendah untuk ukuran ekonomi sebesar China²⁴², oleh karena itu China perlu mencari alternatif pasar keluar. Asia Tenggara adalah pasar yang tepat bagi perusahaan negara China terutama setelah China dan ASEAN menyetujui perjanjian kerjasama perdagangan bebas.

Jauh sebelum ACFTA diajukan, banyak perusahaan negara milik China seperti *Worldbest Group* dan *TCL* telah membangun basis operasi manufaktur di beberapa negara ASEAN seperti Thailand.²⁴³ China tertarik dengan perjanjian perdagangan bebas antara negara anggota ASEAN (AFTA). AFTA mengeleminasi hambatan-hambatan dagang antara negara anggota ASEAN sehingga memudahkan dan mendorong arus barang, jasa, dan tenaga kerja di kawasan. FTA ini menjadi daya tarik ASEAN tersendiri bagi China karena jika China membangun bisnis atau berinvestasi di salah satu negara ASEAN, maka akan mudah bagi China untuk berekspansi ke sembilan negara anggota lainnya karena telah tereleminasinya

²⁴² Roach, *Op. Cit.*, hlm. 183.

²⁴³ Pittaya Suvakunta, *China's Go Out Strategy: Chinese Foreign Direct Investment in Thailand. Thailand Law Journal Spring Issue 1 Vol. 13*, (FSDLR: 2010), hlm. 2. Diakses dari <http://www.thailawforum.com/articles/chinese-foreign-investment.html>, tanggal 29/4/11.

hambatan-hambatan tarif dan non-tarif. Ekspansi pasar ke ASEAN juga memberikan keuntungan-keuntungan lain. Pertama, ini akan membantu perusahaan negara dalam meningkatkan devisa yang masuk. Kedua, masuknya perusahaan China ke ASEAN dapat memfasilitasi negara tuan rumah mendapatkan informasi mengenai perusahaan dan pasar China yang dapat mendorong investasi dari ASEAN masuk ke China. Kedua hal ini penting mengingat salah satu negara anggota ASEAN, yakni Singapura, adalah salah satu dari investor terbesar China.

SOE-SOE China memerlukan ACFTA untuk mendorong produksi dan meningkatkan keuntungan mereka. Pada tahun 2007, Kementerian Keuangan China dan Komisi Administrasi dan Pengawasan Aset Perusahaan Negara (SASAC—*The State-Owned Asset Supervision and Administration Commission*) mengeluarkan peraturan yang menentukan metode spesifik dalam pembayaran deviden oleh perusahaan-perusahaan negara. Menurut peraturan ini, SOE dalam level sentral dibagi ke dalam tiga bagian; *resource-oriented SOE*, yang wajib membayar 10% deviden dari keuntungan bersih mereka, *general industrial enterprises* yang wajib membayar 5% dari laba bersih, serta *military enterprises* dan SOE yang berasal dari institusi penelitian yang dibebaskan dari kewajiban membayar deviden.²⁴⁴ Kewajiban untuk membayar deviden ini tentu akan mengurangi jumlah total pendapatan SOE yang dapat digunakan untuk membiayai investasi mereka, sehingga memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk lebih bergantung pada dana eksternal, yang dapat membantu pembangunan pasar modal.²⁴⁵ Perjanjian Investasi ASEAN-China sepakat untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi kedua pihak melalui aktivitas investasi bersama.²⁴⁶ Ini merupakan kesempatan bagi China untuk menjalin kerjasama investasi dengan perusahaan-perusahaan asal ASEAN, misalnya dengan mendirikan perusahaan gabungan yang terdiri dari perusahaan negara China (baik level nasional maupun propinsi) dengan perusahaan lokal ASEAN seperti yang terjadi dalam kasus *Hanzhou Provincial Enterprises* yang merupakan perusahaan gabungan China

²⁴⁴ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 95.

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *ASEAN-China Investment Agreement: Fact Sheet, Loc.Cit.*

dengan Malaysia. Jika kerjasama dengan ASEAN berjalan baik, maka keuntungan yang akan diperoleh SOE China akan menambah pendapatan SOE tersebut.

Investasi China tersebar di berbagai negara, sekitar 60% nya ditujukan ke Asia, diikuti oleh Amerika Utara, Afrika, dan Amerika Latin.²⁴⁷ Sebagian besar investasi di negara maju difokuskan kepada sektor jasa dan teknologi informasi dan komunikasi sedangkan di negara berkembang fokus investasi China ada pada sektor eksploitasi sumber daya alam dan industri manufaktur ringan seperti tekstil, alas kaki, motor, elektronik, dan peralatan elektronik.²⁴⁸ ASEAN adalah pasar yang menarik karena memiliki level ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari negara maju seperti Singapura, hingga negara miskin dan berkembang seperti negara-negara CLMV, Filipina dan Indonesia. China dapat menanamkan modal di kedua sektor yang berbeda pada saat yang bersamaan di dalam satu kawasan yang sama dengan didukung oleh perjanjian kerjasama investasi yang sama pula. China dapat mengembangkan investasi di sektor jasa, perbankan, finansial dan teknologi tinggi di Singapura dan pada saat yang sama juga berinvestasi pada sektor sumber daya alam dan manufaktur ringan di negara-negara berkembang seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia serta menanamkan investasi besar-besaran pada sektor infrastruktur di negara-negara CLMV. Kondisi ekonomi, politik, lingkungan bisnis dan pasar yang berbeda-beda namun berada di bawah satu kawasan perdagangan bebas menjadi daya tarik ASEAN di mata China.

Letak geografis, kemiripan budaya dan bahasa, serta kedekatan sejarah menjadi faktor sosial yang mendorong ekspansi perusahaan negara China ke Asia Tenggara. Menurut Dunning, perusahaan-perusahaan multinasional (MNE) cenderung berinvestasi di negara-negara tetangganya yang memiliki ikatan ekonomi, politik, dan budaya yang terdekat.²⁴⁹ Investasi Kanada menyebar di seluruh Amerika Serikat, 50% investasi India berada di Asia, MNE Spanyol paling banyak berinvestasi di Amerika Latin dibandingkan dengan MNE Eropa, atau negara-negara Skandinavia

²⁴⁷ Suvakunta, *Loc.Cit.*, hlm. 2.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ John H. Dunning and Sarianna M. Lundan, *Multinational Enterprises and Global Economy, Second Edition.* (Edward Elgar Publishing Limited: 2008), hlm. 48.

lebih banyak berinvestasi di negara sesamanya dibandingkan di negara-negara lain. Warga China perantauan tersebar di seluruh Asia Tenggara, dan bahkan Singapura dapat dikatakan sebagai salah satu negara diaspora China, karena dominasi warga China perantauan yang mencapai 80% di negara tersebut. Fakta ini mendorong SOE China untuk berinvestasi lebih banyak lagi di Asia Tenggara setelah keanggotaannya di WTO. Terlebih lagi Singapura sebagai salah satu daya tarik utama ASEAN adalah pusat manufaktur teknologi tinggi, seperti Hong Kong, yang dapat menarik investor dan menguatkan posisinya sebagai pusat regional perusahaan-perusahaan multinasional.²⁵⁰

4.2.2 Ekspansi Perusahaan Swasta China di ASEAN

Pemerintah China telah mendorong pertumbuhan perusahaan swasta China yang terdiri dari perusahaan swasta domestik, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta gabungan domestik dan asing dengan banyak cara, diantaranya adalah dengan melakukan privatisasi terhadap perusahaan negara China serta dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta bergerak di sektor tertentu yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa perusahaan swasta menyumbang setengah dari total output industri di China dari yang tadinya hanya sekitar seperempat pada tahun 1998.²⁵¹ Firma atau perusahaan swasta pada umumnya lebih efisien dibandingkan perusahaan negara karena tingkat pengembalian modal mereka 30% lebih tinggi dari SOE yang sepenuhnya dimiliki negara dan 10% lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang diawasi negara.²⁵² Presiden Hu Jintao juga secara langsung mendorong perusahaan swasta China untuk berinvestasi keluar. Ia menegaskan bahwa China harus mempercepat pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional China dan merek-merek China di pasar dunia.²⁵³

²⁵⁰ Shenkar, *Op. Cit.*, hlm. 53.

²⁵¹ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 95.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Naisbitt dan Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm.199.

Sesuai dengan teori, untuk menyukseskan diplomasi komersialnya di ASEAN, pemerintah China perlu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta, karena manajemen hubungan yang baik dengan swasta adalah alat yang penting bagi kesuksesan kebijakan perdagangan.²⁵⁴ Pemerintah China melakukan ini pula sehingga mendorong peningkatan kerjasama China dengan ASEAN. Hubungan pemerintah China dengan perusahaan swastanya lebih erat dari kebanyakan negara lainnya karena sistem pasar sosialis yang dianut China. Campur tangan pemerintah terhadap perusahaan swasta cukup besar dan seringkali bersifat langsung. Berbeda dengan sistem perusahaan barat, sistem perusahaan China menganut sistem “manajemen paralel” yang berarti ada dua pemegang kekuasaan dalam perusahaan China, yakni pimpinan perusahaan itu sendiri dan seorang wakil dari partai komunis yang bertugas untuk sebagai pengawas.²⁵⁵ Partai Komunis China memiliki wakil di hampir setiap perusahaan negara, perusahaan swasta, dan perusahaan gabungan.²⁵⁶ Keberadaan wakil PKC menunjukkan bagaimana lingkungan bisnis China masih sangat didominasi oleh peran negara. Meskipun demikian, pemerintah China telah mengusahakan berbagai cara untuk mengurangi campur tangan negara terhadap pihak swasta. Contohnya adalah dengan desentralisasi, yakni dimana kekuasaan beralih ke pemerintah dan perusahaan lokal. Untuk mendorong FDI ke luar, pemerintah China mendorong perusahaan swasta dan lokal untuk berhubungan langsung dengan negara-negara lain, tanpa melalui pemerintah pusat.²⁵⁷ Dukungan pemerintah ini mendorong perusahaan swasta China untuk berekspansi ke luar negeri, dan salah satunya adalah ke Asia Tenggara.

Perusahaan swasta China berekspansi ke Asia Tenggara dengan cara mendirikan cabang dan menjalin kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan lokal ASEAN. Beberapa perusahaan swasta China di ASEAN memproduksi produk-produk yang cukup dikenal oleh pasar ASEAN, misalnya saja Huawei dan Cherry

²⁵⁴ Sumber: http://www.commercialdiplomacy.org/site_userguide/faq2.htm#What is Commercial Diplomacy, *Loc. Cit.*

²⁵⁵ Yuan Wang, Goodfellow, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 86.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Naisbitt dan Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm. 172.

QQ. Yang unik dari perusahaan swasta China ini adalah mereka tidak hanya mengincar pasar ASEAN yang cukup besar dan mengeruk keuntungan darinya, namun mereka juga menjalankan strategi-strategi yang berbeda untuk menarik hati pasar dan negara ASEAN, misalnya dengan memberikan donasi tertentu bagi negara tempat mereka berinvestasi.

Huawei adalah perusahaan jaringan dan peralatan telekomunikasi terbesar dari China dan merupakan pemasok peralatan infrastruktur telekomunikasi terbesar kedua di dunia setelah Ericsson. Huawei beroperasi di beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Pada tanggal 27 Januari 2004, PT Huawei Tech Investment berdiri di Jakarta. Huawei berekspansi ke Jakarta karena Huawei menyadari kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia akan solusi telekomunikasi yang harganya terjangkau serta memiliki nilai tambah dan berbagai macam jenis layanan.²⁵⁸ Selama beroperasi di Indonesia Huawei memiliki catatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik. Ketika Tsunami menerjang Aceh pada tahun 2004, Huawei mendonasikan 600 ribu dolar dalam bentuk uang tunai dan peralatan senilai 600 ribu dolar juga kepada pemerintah Indonesia.²⁵⁹ Penting untuk dicatat bahwa Huawei mendonasikan bantuan ini tidak lama setelah perusahaan ini berekspansi ke Indonesia. Selain itu Huawei juga mendonasikan peralatan senilai lima juta dolar kepada operator di Indonesia untuk program rekonstruksi telekomunikasi di Indonesia. Huawei juga mendonasikan 50 ribu pelanggan sistem CDMA 2000 1x EVDO untuk mendukung pemerintah Indonesia menjalankan program Obligasi Jasa Universal (USO) yang diluncurkan dengan sukses pada tahun 2006.²⁶⁰ Tidak hanya itu, bersama dengan komunitas telekomunikasi Indonesia Huawei ikut berpartisipasi membangun sekolah sebagai bentuk bantuan kepada korban gempa bumi di Jogjakarta.²⁶¹ Huawei tidak hanya merangkul kelompok bisnis Indonesia untuk berinvestasi tetapi juga merangkul pemerintah, kelompok

²⁵⁸ Sumber: http://www.huawei.com/corporate_information/partnerships.do, diakses tanggal 1/5/11.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

masyarakat, dan perusahaan lokal Indonesia untuk melancarkan bisnisnya di Indonesia.

Di Thailand, Huawei pertama kali berdiri pada tahun 1999. Perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi lokal terkemuka. Dengan mendirikan jaringan *broadband*, nirkabel, dan jaringan tetap yang modern, Huawei telah membantu operator telekomunikasi utama Thailand dalam mengurangi biaya kapitalisasi dan operasi di Thailand dan sekaligus memperluas jasanya.²⁶² Perusahaan ini juga menambah jumlah pegawai lokal yang mereka kerjakan yang jumlahnya mencapai 80% dari total pegawai mereka di Bangkok.

Huawei bukan satu-satunya merek China yang dikenal dengan baik di Asia Tenggara, merek mobil China Chery QQ yang diproduksi oleh perusahaan swasta China Chery Automobile Co. Ltd. Juga berhasil memasuki pasar ASEAN dengan berekspansi ke Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Di Indonesia, merek Chery QQ menerima penghargaan *Top China's Brand Award*, yang menjadi pembuktian bahwa Chery QQ sebagai mobil dari China sudah bisa diterima dengan baik di Indonesia.²⁶³ Beberapa perusahaan patungan China juga sudah memasuki pasar ASEAN, contohnya adalah produsen mesin konstruksi terbesar di China, *Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG)*. Perusahaan patungan ini mendirikan pusat penjualannya di Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Timur Tengah dan Asia Tenggara.²⁶⁴ Yang menarik adalah visi XCMG yang menyatakan siap “Menjadi konglomerat mesin konstruksi kelas dunia yang berdaya saing tinggi, membuat China bangga karenanya”.²⁶⁵ Ini menunjukkan bagaimana perusahaan swasta China berekspansi tidak hanya semata mengejar keuntungan melainkan juga menjalankan misi membawa nama baik China ke seluruh dunia.

Terlepas dari fakta bahwa pasar ASEAN telah begitu akrab dengan merek dan produk China, jika dibandingkan dengan perusahaan negara, perusahaan swasta China tidak terlalu banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan hubungan

²⁶² Sumber: <http://www.huawei.com/ap/en/catalog.do?id=302>, diakses tanggal 1/5/11.

²⁶³ Sumber: <http://www.chery-indomobil.com/news-3.htm>, diakses tanggal 1/5/11.

²⁶⁴ Naisbitt dan Naisbitt, *Op. Cit.*, hlm. 221.

²⁶⁵ *Ibid.*

dagang China dengan ASEAN karena sebagian besar investasi China masuk ke ASEAN melalui perusahaan negara. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan swasta China tidak berinvestasi di ASEAN sebanyak perusahaan negara China.

Alasan pertama adalah karena tidak semua perusahaan swasta China merupakan perusahaan domestik China. Banyak diantara perusahaan swasta China adalah perusahaan asing yang melakukan ekspansi di China dengan tujuan untuk mengekspor produknya keluar China. Perusahaan-perusahaan asing ini banyak diantaranya bergerak di sektor jasa dan teknologi tinggi. ASEAN masih belum menjadi pasar yang menarik karena alasan-alasan seperti lingkungan bisnis yang tidak mendukung, masalah birokrasi yang tumpang-tindih, kondisi infrastruktur yang menyulitkan distribusi barang, hingga alasan-alasan non-ekonomi seperti pengetahuan mengenai pasar ASEAN yang tidak memadai, dan latar budaya yang asing bagi investor asing yang datang dari negara-negara yang secara geografis letaknya berjauhan dengan Asia. Perusahaan-perusahaan yang berdiri atas modal asing ini juga tidak memiliki kepentingan-kepentingan politik terhadap ASEAN sehingga tidak mendapatkan dorongan dari negara tempat mereka berasal untuk melakukan ekspansi ke kawasan ini.

Kedua, sebagian besar industri penting dan strategis China telah dikuasai oleh negara, bahkan negara menentukan sektor-sektor industri apa sajakah yang dapat melakukan ekspor atau menanamkan investasi di luar negeri. Data menunjukkan bahwa 2% perusahaan swasta domestik China bergerak di bidang industri utama (perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan), 33% di sektor sekunder (konstruksi, pertambangan, manufaktur, produksi dan pemasok listrik, gas, dan air), dan 64% di industri tersier (jasa).²⁶⁶ Industri sekunder China sebagian besar berekspansi melalui SOE, sehingga mengurangi kesempatan dan ketertarikan swasta untuk berinvestasi di ASEAN karena jika berinvestasi berarti perusahaan-perusahaan swasta tersebut harus bersaing dengan SOE yang mendapat dukungan penuh pemerintah China. Sulit bagi perusahaan swasta domestik China yang berukuran kecil dan sedang untuk bersaing dengan di pasar ASEAN karena mereka tidak memiliki

²⁶⁶ *Trade Policy Review: China 2008, Op. Cit.*, hlm. 96.

cukup dana untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dan SOE yang sudah lama beroperasi di ASEAN.²⁶⁷

Kesulitan lain bagi perusahaan swasta China untuk bersaing di pasar ASEAN adalah kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Tidak seperti negara-negara Uni Eropa yang berada di dalam satu daratan (dengan mengecualikan Inggris), negara-negara di Asia Tenggara memiliki hambatan geografis yang cukup besar seperti kondisi beberapa negara yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina atau negara yang kawasannya terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan perairan seperti Malaysia. Butuh biaya distribusi dan transportasi yang besar bagi perusahaan China untuk berbisnis atau berinvestasi di ASEAN. Ini akan memberatkan atau paling tidak akan menjadi bahan pertimbangan terutama bagi perusahaan swasta kelas menengah. Tidak seperti perusahaan negara yang mendapat dukungan dana penuh dari pemerintah atau pihak asing, perusahaan swasta China perlu mempertimbangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti ini.

Alasan lain yang juga menghambat ekspansi perusahaan swasta China di ASEAN adalah karena perusahaan-perusahaan China di ASEAN, khususnya kelas menengah, tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik di pasar ASEAN.²⁶⁸ Umumnya, perusahaan-perusahaan ini beroperasi sendiri-sendiri tanpa ada kaitan dan kerjasama antara mereka dan mereka juga kurang mengetahui cara beroperasi di ASEAN.²⁶⁹ Kelemahan-kelemahan ini menjadi penghambat bagi perusahaan swasta China untuk melebarkan lingkup bisnis mereka di ASEAN. Pemerintah China sendiri sejauh ini belum mengeluarkan kebijakan yang secara spesifik dapat mengatasi hambatan ekspansi perdagangan perusahaan swasta China selain aturan-aturan umum yang telah tercantum dalam perjanjian kerjasama investasi ASEAN-China yang merupakan bagian dari kerjasama ACFTA.

²⁶⁷ Inayati, *Ed., Op. Cit.*, hlm. 86.

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ *Ibid.*

Tabel 4.6 Diplomasi komersial China di ASEAN dalam bidang investasi (2002-2010)

Kebijakan	Tujuan	Implementasi	Hasil
Menetapkan perjanjian di sektor investasi bersama ASEAN sejak ACFTA diajukan.	-Mempromosikan investasi di kedua belah pihak. -Meningkatkan kerjasama antara pihak swasta China dan ASEAN.	Mengadakan <i>ASEAN-China Business and Investment Summit</i> dan <i>ASEAN-China Business Council</i> .	Perjanjian di bidang investasi menjadi motor penggerak kerjasama ASEAN dan China.
Mengadakan China-ASEAN Expo (CAEXPO) di China.	-Meningkatkan kerjasama investasi kedua pihak. -Memperkenalkan Nanning sebagai tujuan investasi dan meningkatkan devisa dari turis yang datang dalam rangka CAEXPO.	- Menjadikan Nanning, China, sebagai tuan rumah CAEXPO setiap tahunnya sejak 2004.	CAEXPO berhasil meningkatkan investasi di kedua wilayah. Kegiatan ini masih berlanjut sampai sekarang (2011).
Berinvestasi pada pencarian migas dan SDA di ASEAN.	-Mengamankan kepentingan energi dan bahan mentah China.	-Mengirimkan SOE-SOE raksasa China ke seluruh negara ASEAN yang kaya akan minyak dan SDA lain.	Masih berjalan hingga hari ini (2011).
Berinvestasi pada sektor infrastruktur dan transportasi di ASEAN.	-Meningkatkan volume perdagangan dengan ASEAN. -Memudahkan akses China ke pasar ASEAN -Mendorong interaksi ekonomi propinsi China yang berbatasan langsung dengan negara anggota ASEAN.	-Berinvestasi besar-besaran pada proyek infrastruktur raksasa di negara-negara CLMV dan Indonesia. -Menghubungkan rute transportasi dari Yunnan ke Asia Tenggara. -Mendirikan China-ASEAN Fund sebesar 10 milyar dolar untuk pembangunan infrastruktur di ASEAN.	Sebagian besar proyek masih berjalan.

Tabel 4.6 (Lanjutan)

Kebijakan	Tujuan	Implementasi	Hasil
Berinvestasi di negara dengan masalah HAM berat.	Mengincar lokasi investasi yang tidak menarik bagi <i>major power</i> seperti Amerika atau UE untuk mengurangi persaingan.	Berinvestasi besar-besaran di Myanmar.	Mengadakan proyek pembangunan pipa minyak dan gas yang menghubungkan Yunnan dan Myanmar yang diperkirakan selesai tahun 2013.
Pemotongan pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di China.	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan investasi masuk ke China dari ASEAN. -Mengincar investasi masuk dari ASEAN yang bergerak dalam sektor-sektor yang didukung penuh pemerintah China seperti pertanian, SDA, dan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Memotong pajak dari 33% menjadi 25% bagi perusahaan asing. -Memberikan potongan pajak 50% kepada perusahaan asing yang mengekspor 70% produknya. -Group Lippo dari Indonesia dan Group Kuok dari Malaysia mulai gencar berinvestasi di China. 	Terjadi arus investasi besar-besaran dari ASEAN ke China karena banyaknya pengusaha ASEAN yang tertarik untuk menanamkan modal di China.

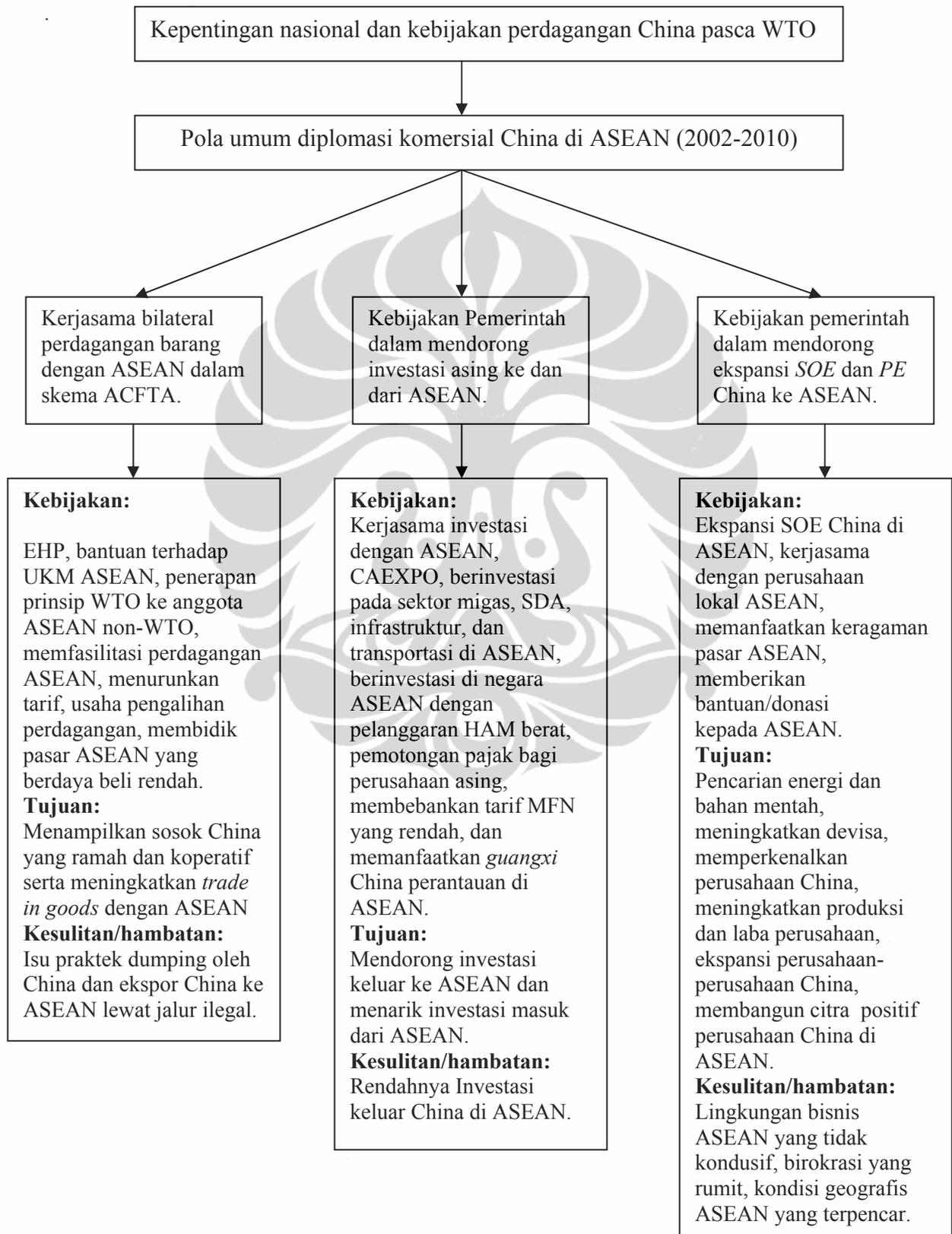
Sumber: Elaborasi penulis.

Tabel 4.7 Diplomasi komersial China di ASEAN melalui perusahaan negara dan swastanya (2002-2010)

Kebijakan	Tujuan	Implementasi	Hasil
Mendukung penuh ekspansi SOE China di ASEAN.	<ul style="list-style-type: none"> -Pencarian energi dan bahan mentah. -Merangkul pasar ASEAN yang besar dengan produk SOE-SOE utama China. -Meningkatkan devisa yang masuk dari SOE. -Memberikan ASEAN informasi yang memadai mengenai SOE China. 	SOE-SOE China bertebaran di ASEAN dan bergerak di dalam sektor energi, migas, manufaktur, infrastruktur, perbankan, dan jasa.	Beberapa proyek infrastruktur seperti <i>Bridgehead Strategy</i> yang membangun pipa minyak dan gas China-Burma sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan selesai tahun 2013.
Memanfaatkan ACFTA dengan cara melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan domestik ASEAN.	Mendorong produksi dan meningkatkan laba SOE-SOE China.	Melakukan investasi gabungan dengan perusahaan lokal ASEAN.	Salah satu bentuk usaha gabungan ASEAN-China adalah Hanzhou Provincial Enterprises, usaha gabungan China dan Malaysia.
Memanfaatkan diversifikasi pasar ASEAN.	Ekspansi perusahaan China yang bergerak pada sektor riil dan sektor finansial serta jasa pada saat yang bersamaan di satu kawasan yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> -Berinvestasi pada sektor migas, energi, infrastruktur dan SDA di Thailand, Indonesia, dan CLMV. -Berinvestasi di sektor jasa dan finansial di Singapura. 	Pada sektor finansial China bergerak salah satunya melalui bank-bank China yang banyak tersebar di Asia Tenggara seperti <i>Bank of China</i> dan <i>Agricultural Bank of China</i> .
Memberikan bantuan/donasi kepada ASEAN.	Membangun citra positif China, dan menunjukkan niat baik China terhadap ASEAN	Membantu menyerap tenaga kerja lokal ASEAN dan membantu negara yang tertimpa bencana alam.	Huawei mendonasikan 600 ribu USD kepada pemerintah Indonesia setelah tsunami Aceh tahun 2006.

Sumber: Elaborasi penulis.

Grafik 4.2 Model diplomasi komersial China di ASEAN pasca keanggotaan China di WTO (2002-2011)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Keanggotaan China di Organisasi Perdagangan Dunia menjadi momen penentu kebangkitan China sebagai raksasa ekonomi baru yang berangkat dari ekonomi komunis dengan perdagangan tertutup menuju sistem ekonomi pasar. China menunjukkan konsistensinya sebagai anggota WTO dengan cara merevisi undang-undang perdagangannya agar sesuai dengan ketentuan WTO. Seberapa keras pun usaha China dalam memproklamkan diri sebagai ekonomi pasar sosialis, sesungguhnya China telah menjadi salah satu motor penggerak globalisasi di abad 21 yang menggunakan kapitalisme sebagai alat pencipta kekayaan dan mendorong laju pertumbuhan ekonominya.

China tidak setengah-setengah dalam pencapaian kepentingan nasionalnya dan menggunakan segala cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi 1,3 milyar penduduknya. Sejak reformasi ekonomi yang dimulai Deng Xiaoping pada tahun 1978, China mulai menyadari pentingnya penggunaan jalur-jalur diplomasi untuk mengubah kemiskinan menjadi kemakmuran. China juga mulai melihat besarnya peran komunitas internasional dalam pembangunan ekonomi China. Dengan menggunakan diplomasi, China memperbaiki persepsi masyarakat internasional tentang negaranya dan mulai membangun kembali citranya sebagai negara berkembang yang mengalami kebangkitan dengan damai, dapat dipercaya, dan terbuka terhadap perubahan.

Salah satu diplomasi terpenting yang mendorong kebangkitan China adalah diplomasi ekonomi dan komersialnya. Diplomasi ini dimulai dengan China membuka pasarnya yang besar bagi investor yang datang. China berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional mengenai keuntungan berbisnis dengan China dengan menyediakan lingkungan bisnis yang prospektif, kondusif, dan visioner. Tidak hanya berhasil memenangkan kepercayaan negara-negara maju, China juga berhasil menarik negara-negara berkembang untuk berinvestasi dan melakukan berbagai kerjasama perdagangan. Dalam rangka menyukseskan pembangunan citra

China yang ramah, China pun menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan yang lebih erat dan bersahabat dengan negara-negara tetangganya di Asia, yakni dengan Jepang, Korea, dan Asia Tenggara.

Penting bagi China untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Asia Tenggara, yakni negara anggota ASEAN, mengingat hubungan keduanya telah lama terjalin. Sebelum negara-negara barat melirik China sebagai sasaran investasi dan target pasar, hubungan perdagangan China dan Asia Tenggara telah dimulai. Setelah ASEAN didirikan hubungan China dan Asia Tenggara mengalami pasang surut tetapi tidak pernah benar-benar putus dan terus berlanjut dengan menyebarnya masyarakat China perantauan yang memilih untuk pindah ke negara-negara di Asia Tenggara. Ditambah lagi, setelah Partai Komunis China memegang tampuk kekuasaan, China mengalami hubungan yang sulit dengan negara-negara barat yang menentang komunisme. Runtuhnya Uni Soviet yang juga menandai berakhirnya Perang Dingin memaksa China untuk mencari strategi baru untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem ekonomi sosialis. Pada tahun 1993, China mengumumkan diri sebagai ekonomi pasar sosialis.

Sistem ekonomi pasar memaksa China untuk merangkul negara-negara lain sebagai target pasar dan sumber investasi, salah satunya adalah Asia Tenggara yang telah menjadi mitra dagang China sejak lama. Setelah China bergabung dengan WTO, terjadi kenaikan signifikan pada volume perdagangan antara China dan ASEAN. Peningkatan hubungan ekonomi keduanya juga terlihat dari kenaikan investasi asing yang masuk dan keluar dari kedua belah pihak. Dalam tataran global peningkatan hubungan perdagangan keduanya memang tidak terlalu menonjol, tetapi pada level yang lebih rendah, yakni regional maupun domestik, peningkatan hubungan ekonomi keduanya secara nyata dirasakan oleh masyarakat ASEAN. Pasar ASEAN yang besar mulai merasakan serbuan produk-produk China yang murah, tidak hanya yang masuk ke dalam kategori industri ringan, tetapi juga teknologi tinggi seperti alat transportasi seperti pesawat terbang buatan China.

Dalam tataran lebih rendah, masyarakat awam ASEAN yang sebelumnya tidak menyadari kebangkitan China mulai bangun dan mendapati diri mereka

dikelilingi oleh produk-produk buatan China yang mengisi hari-hari mereka mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Dari sudut pandang masyarakat kecil yang tidak hidup dari berdagang kehadiran produk-produk China sangat menguntungkan. Mereka dapat menjangkau barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dulunya tidak mampu mereka beli. Tetapi dari perspektif pedagang, membanjirnya produk China adalah sebuah ancaman karena produk dalam negeri sulit bersaing dengan produk China yang murah. Pemerintah negara anggota ASEAN pun mulai cemas akan kebangkitan China.

China menyadari ketakutan ASEAN, terutama negara anggotanya yang masuk kategori negara berkembang, dalam menghadapi persaingan dengan China. Jika ASEAN ketakutan, maka hubungan ekonominya dengan China tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi kecemasan ASEAN atas kebangkitan China, China pun meluncurkan diplomasi komersialnya di ASEAN. Diplomasi komersial China di ASEAN dilakukan dengan mengajukan proposal kerjasama perdagangan bebas pada tahun 2000, menarik dan mendorong investasi dari dan ke ASEAN, dan melalui kebijakan pemerintah China terhadap perusahaan negara dan swastanya untuk berekspansi ke ASEAN.

Skema ACFTA diajukan China tidak hanya semata untuk mengurangi kecemasan ASEAN, namun juga membantu China mendapatkan kepercayaan ASEAN akan perkembangan ekonomi China yang pesat dan damai. Dalam skema ini, China membantu mendorong ekspor pertanian ASEAN ke China dengan memberikan program EHP dan fasilitas perdagangan lainnya bagi anggota ASEAN. Peran negara sangat dominan karena seluruh bentuk bantuan yang ditawarkan China ke ASEAN selalu mengacu kepada hukum dan peraturan perdagangan asing dan ekspor impor yang dibuat dan diawasi oleh negara. Pada level atas, pemerintah China terjun langsung dalam diplomasi komersialnya yang menekankan kepada sikap China yang kooperatif dalam melakukan hubungan dagang dengan ASEAN dalam skema ACFTA. Berulang kali pemerintah China menegaskan niat baiknya untuk membantu ASEAN meningkatkan ekspornya ke China dan bahwa China juga mendorong perdagangannya ke ASEAN.

Dalam sektor investasi, pemerintah China menyerukan kepada perusahaan negara dan pengusaha swasta untuk berinvestasi di ASEAN. Pemerintah juga menandatangani perjanjian kerjasama investasi dengan ASEAN yang diharapkan dapat mendorong investasi masuk dan keluar di kedua pihak. Kebijakan dalam negeri China yang banyak memberikan banyak kemudahan bagi iklim bisnis mampu menarik kelompok swasta dari ASEAN untuk menanamkan modal dengan China. Kelebihan China yang sangat menarik bagi ASEAN adalah infrastruktur yang baik, birokrasi yang mudah dan sederhana, serta etos kerja buruh yang tinggi dan produktif. Untuk investasi ke luar, peran negara tidak hanya dengan seruan langsung untuk menjadikan ASEAN sebagai tempat investasi China, China juga berinvestasi besar-besaran dalam bidang infrastruktur dan transportasi yang menghubungkan China dengan wilayah Asia Tenggara untuk mendorong perpindahan modal, tenaga kerja, dan distribusi barang.

Diplomasi komersial ketiga China di Asia Tenggara tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah China terhadap perusahaan negara (SOE) dan perusahaan swastanya (PE). Peran SOE dalam peningkatan hubungan ekonomi China dengan ASEAN lebih dominan dibandingkan dengan peran perusahaan swasta China. Umumnya SOE China bergerak di ASEAN dengan tujuan mengamankan ketahanan energi China dan kebutuhan China akan bahan mentah dari ASEAN. SOE-SOE ini berekspansi dalam wujud perusahaan China ataupun menjalin kerjasama dan membentuk usaha gabungan dengan perusahaan lokal di negara-negara ASEAN. Kelebihan SOE adalah kuatnya dukungan dana dari pemerintah China yang memiliki *power* dan pengaruh yang sangat kuat di kawasan. Hal ini membuat perusahaan swasta China tidak mampu bersaing dengan perusahaan negara sehingga ASEAN belum dilihat sebagai tujuan investasi yang sangat menguntungkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa **peran pemerintah China dalam menetapkan kebijakan perdagangan China di ASEAN telah menjadi faktor penting dalam peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan China dan ASEAN terutama sejak keanggotaan China di WTO.** Kebijakan ini tertuang dalam bentuk diplomasi komersial China di ASEAN terutama

dalam kerjasama perdagangan barang, investasi dan ekspansi perusahaan negara dan swastanya. Benang merah dari kebijakan di tiga bidang kerjasama tersebut adalah **karakteristik kebijakan perdagangan China yang sifatnya lebih integratif dan visioner jika dibandingkan dengan diplomasi komersial China di ASEAN sebelum keanggotaannya di WTO.** Selain itu, **peran negara dalam diplomasi komersial China di ASEAN lebih dominan dibandingkan dengan peran pihak swasta China.** Peran pemerintah China tidak sebatas sebagai pembuat kebijakan atau melakukan negosiasi dengan pemerintah ASEAN dalam perjanjian kerjasama, melainkan juga sebagai penyokong dana utama, fasilitator perdagangan dan aspek-aspek terkait, pengawas, dan pengambil keputusan-keputusan penting. Hubungan kerjasama yang semakin erat ditandai dengan kenaikan signifikan volume perdagangan dan investasi antara kedua mitra terutama sejak China menjadi anggota WTO pada akhir tahun 2001.

Terlepas dari besarnya peran China dalam meningkatnya hubungan ekonomi China dan ASEAN, Diplomasi komersial China di Asia Tenggara tetap memiliki beberapa kelemahan. Pertama, China menemukan kesulitan dalam mendorong perusahaan swastanya berinvestasi di ASEAN. Masalah ini sebenarnya lebih cenderung bersumber dari ASEAN sendiri. Kondisi negara anggota ASEAN yang sebagian besar negara berkembang dan masih harus berjuang dengan masalah internal seperti infrastruktur yang buruk, birokrasi yang rumit, serta etos kerja buruh yang kurang efisien, membuat perusahaan swasta China enggan menanamkan modal atau memperluas usahanya di wilayah ini. Pemerintah China lebih banyak memberikan dukungan kepada perusahaan negaranya dibandingkan kepada pihak swastanya. Padahal, inti dari perjanjian investasi di bawah skema ACFTA bagi China dan ASEAN adalah untuk sama-sama mendorong investasi yang bisa datang baik dari perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Pemerintah China perlu memberikan stimulus lebih kepada perusahaan swastanya untuk berinvestasi di ASEAN, misalnya dengan memberikan bantuan dana untuk biaya distribusi barang sehingga mengurangi beban perusahaan swasta dalam mendistribusikan produknya di negara-negara ASEAN khususnya yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina.

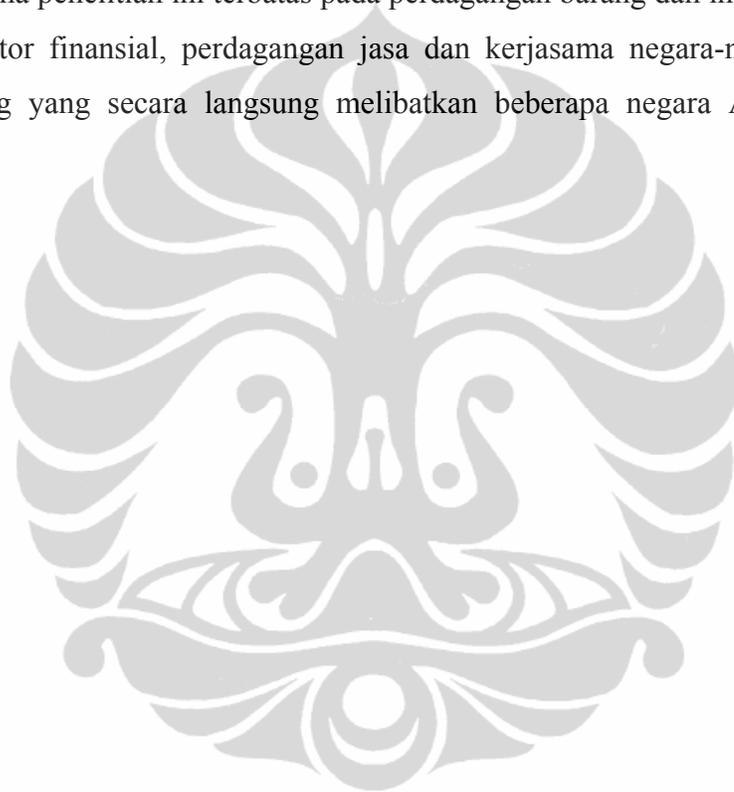
Kedua, China juga masih harus menghadapi beberapa masalah lain terkait hubungan dagangnya dengan ASEAN. Pemerintah China harus lebih tegas menanggapi keluhan-keluhan ASEAN mengenai *dumping* yang mereka tuduhkan kepada China. Selain kasus *dumping*, pemerintah juga perlu menindak produsen atau distributor barang-barang China yang masuk ke ASEAN melalui jalur ilegal karena ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan ASEAN terhadap komitmen China untuk mempromosikan perdagangan yang adil dan transparan. ACFTA baru dimulai tahun 2010, jalan menuju realisasi penuh kerjasama perdagangan bebas antara kedua pihak masih panjang, oleh karena itu pemerintah China masih memiliki waktu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi diplomasi komersialnya di ASEAN.

Anggota ASEAN, khususnya negara berkembang, seharusnya dapat belajar banyak dari China. China tidak berangkat dari negara yang kaya akan sumber daya alam yang berlimpah seperti seperti Indonesia, tetapi China memiliki determinasi yang kuat untuk membangun negerinya dan menyejahterakan rakyatnya. China berhasil memajukan ekonominya dengan menyusun kebijakan-kebijakan perdagangan yang sesuai dengan tuntutan WTO tanpa perlu mengubah tatanan politiknya. RRC juga berhasil maju dengan seperangkat kebijakan yang revolusioner, visioner, dan total dengan memperhitungkan penuh sumber daya yang dimilikinya serta resiko-resiko yang harus diambil. China berhasil menggunakan kekuatan diplomasi ekonomi dan komersialnya dengan sangat berani dan seringkali tidak terpikirkan oleh negara-negara lain demi mencapai kepentingan nasionalnya.

ASEAN juga harus belajar tentang bagaimana campur tangan pemerintah China dalam memenangkan persaingan dagang dengan negara mitra. Jika ASEAN ingin bersaing dengan China maka ASEAN harus membenahi persoalan-persoalan domestiknya terlebih dahulu. Misalnya dengan membuat perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih matang yang dapat menarik investasi asing, memastikan kejelasan hukum demi lingkungan bisnis yang lebih kondusif, membangun industri strategis yang dapat mendorong pertumbuhan produksi barang manufaktur dalam

negeri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat memenangkan persaingan.

Penting bagi ASEAN untuk mempelajari diplomasi komersial China di Asia Tenggara untuk kemajuan ASEAN sendiri sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui diplomasi komersial China di ASEAN setelah tahun 2010 mengingat ACFTA baru secara resmi dimulai tahun 2010. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan karena penelitian ini terbatas pada perdagangan barang dan investasi tanpa menyentuh sektor finansial, perdagangan jasa dan kerjasama negara-negara aliran Sungai Mekong yang secara langsung melibatkan beberapa negara ASEAN dan China.



DAFTAR PUSTAKA

PUBLIKASI CETAK

- ASEAN Secretariat (2001). *Statistics of Foreign Direct Investment in ASEAN 2000 Edition*.
- ASEAN Secretariat (2011). *ASEAN Statistical Yearbook 2010*.
- Balaam, David N. and Veseth, Michael (1996). *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Barston, R. P. (1997). *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education Limited.
- Bell, Michael W., et. al. (1993). *China at the Threshold of A Market Economy*. Washington DC: IMF.
- Bryman, Alan (2004). *Social Research Method*. New York: Oxford University Press.
- Chang Chiou Yi (2007), *ASEAN-China Economic Relations: Moving Towards Services*. In ASEAN-China Economic Relations (hlm. 146-165). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Chen Wen (2007). *ASEAN-China Trade Relations: Origins, Progress and Prospect*. In ASEAN-China Economic Relations (hlm. 67-85). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Chiu, Becky and Lewis, Mervyn K. (2006). *Reforming China's State-Owned Enterprises and Banks*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Dharmawan, Bagus, Ed. (2006). *Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Djaffar, Zainuddin (2006). *Rethinking the Indonesian Crisis*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Djaffar, Zainuddin (2008). *Indonesia, ASEAN, & Dinamika Asia Timur*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Dunning, John H. (1993). *Multinational Enterprises and Global Economy*. Addison-Wesley.

- Dunning, John H. and Lundan, Sarianna M. (2008). *Multinational Enterprises and Global Economy, Second Edition*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Eichengreen, Barry, et. al., Ed. (2008). *China, Asia, and the New World Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Feenstra, Robert C. and Shang-Jin Wei, Ed. (2010). *China's Growing Role in World Trade*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Goh, Evelyn and Simon, Sheldon W. Ed. (2008). *China, the United States, and Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Haacke, Jungen (2005). *The Significance of Beijing's Bilateral Relations: Looking 'Below' the Regional Level in China-ASEAN Ties*. In *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges* (hlm. 111-145). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hill, Christopher (2003). *The Changing Politics of Foreign Policy*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku, Ed. (2005). *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hui Feng (2006). *The Politics of China's Accession to the World Trade organization: The Dragon Goes Global*. New York: Routledge.
- Inayati, Ratna Shofi, Ed. (2006). *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?*. Jakarta: LIPI.
- Irawan, Prasetya (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA FISIP UI.
- Joshua Eisenman, et. al. (2007). *China and the Developing World: Beijing's Strategy for the Twenty-First Century*. New York: M.E. Sharpe Inc.
- Kang, David C. (2007). *China Rising : Peace, Power, and Order in East Asia*. New York: Columbia University Press.
- Kronick, Scott (2002). *Branding for China*. In *China after WTO* (hlm. 34-45). Beijing: China Intercontinental Press.
- Kusuma, Dwijaya (2008). *China Mencari Minyak: Diplomasi China ke Seluruh Dunia 1990-2007*. FIB UI Depok: Center for Chinese Study.

- Lam, N. Mark *and* Graham, John L. (2007). *China Now*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Liu Yunhua (2009). ASEAN AND CHINA: *Managing Competition and Exploring Complementarities*. In *Southeast Asia in the Global Economy: Securing Competitiveness and Social Protection* (hlm. 59-86). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and S. Rajaratnam School of International Studies.
- Montesano, Michael J. *and* Lee Poh Onn, Ed. (2011). *Regional Outlook: Southeast Asia 2011-2012*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Naisbitt, John *dan* Naisbitt, Doris (2010). *China's Megatrends: 8 Pilar yang Membuat Dahsyat China*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Oxford University Press (1995). *Asian Development Outlook 1994*.
- Pambudi, Daniel *dan* Chandra, Alexander C. (2006). *Garuda Terbelit Naga*. Jakarta: Institute for Global Justice.
- Roach, Stephen S. (2009). *The Next Asia: Opportunities and Challenges for A New Globalization*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Roy, S. L. (1991). *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schweickart, David *et. al.* (1998). *Market Socialism: The Debate among Socialists*. New York: Routledge.
- Shenkar, Oded (2005). *The Chinese Century: The Rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, the Balance of Power, and Your Job*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Shirk, Susan L. (1994). *How China Opened Its Door: The Political Success of the PRC's Foreign Trade and Investment Reforms*. Washington DC: The Brookings Institution.
- Shi Guangsheng (2002). *WTO Opens An Era of New Opportunities*. In *China after WTO* (hlm i-iii). Beijing: Intercontinental Press.
- Stopford, John M., Strange, Susan *et. al.* (1991). *Rival States, Rival Firms: Competition for world market shares*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stuart-Fox, Martin (2003). *A Short History of China and Southeast Asia: Tribute, Trade, and Influence*. Australia: Allen & Unwin.
- Susilo, Taufik Adi (2008). *China Connection*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.

- Tamura, Eileen H., et. al. (1997). *China: Understanding Its past*. United States of America: University of Hawaii Press.
- Tsunekawa, Jun (2009). *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, Japan: The National Institute for Defense Studies Japan.
- Wei-cheng Wang, Vincent (2005). *The Logic of China-ASEAN FTA: Economic Statecraft of "peaceful Ascendancy"*. In *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges* (hlm. 17-41). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wiemer, Calla and Cao, Heping (2004). *Ed., Asian Economic Cooperation*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Wong, John (1987). *Politik Perdagangan China di Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- World Trade Organization and Bernan (2007). *Trade Policy Review: China 2006*.
- World Trade Organization and Bernan (2009). *Trade Policy Review: China 2008*.
- Yuan Wang, Goodfellow, Rob et. al. (2000). *Menembus Pasar China*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

Jurnal

- Suvakunta, Pittaya (2002). *China's Go Out Strategy: Chinese Foreign Direct Investment in Thailand*. Thailand Law Journal Spring Issue 1 Vol. 13 (hlm. 2). FSDLR. <http://www.thailawforum.com/articles/chinese-foreign-investment.html>
- Zamroni (Des. 2006) *Thailand Agricultural Sector and Free Trade Agreements*. Asia-Pacific Trade and Investment Review, Vol. 2, No. 2 (hlm. 51-70). www.unescap.org/tid/publication/aptir2436_zamroni.pdf

Paper

- Chia Siow Yue (2004). *ASEAN-China Free Trade Area*. <http://www.hiebs.hku.hk/aep/chia.pdf>
- Frost, Ellen L (2010). *Promise or threat? China's commercial diplomacy in Asia*. <http://www.gspia.pitt.edu/LinkClick.aspx?fileticket=Sx9Cut3RQpI%3D&tabid=235>

Frost, Stephen (2004). *Going to Southeast Asia: Chinese Foreign Direct Investment and its implications*. City University of Hong Kong. http://www.cctr.ust.hk/materials/conference/workshop/2/Frost-SE_Asia_Dstr-01.pdf

Fung, K.C., Iizaka, Hitomi, et. al. (2002). *Foreign Direct Investment in China: policy, trend, and impact*. http://www.hiebs.hku.hk/working_paper_updates/pdf/wp1049.pdf

Tambunan, Tulus (29-30 Juli 2006). *Is ASEAN still Relevant in the Era of the ASEAN-China FTA?* <http://www.apeaweb.org/confer/sea06/papers/tambunan.pdf>

Wang Wangbo (2004). *The Character of Southeast Asian Chinese Investment in Mainland China since 1978*. [http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA_Workshop/CSEA_Workshop/PAPERS/SeptemberSymposium/WangWangbo\(English\).pdf](http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA_Workshop/CSEA_Workshop/PAPERS/SeptemberSymposium/WangWangbo(English).pdf)

Dokumen

ASEAN Official Website (2003). *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. <http://www.aseansec.org/16805.htm>

ASEAN Official Website (2004). *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. www.aseansec.org/16646.htm

ASEAN Official Website (2009). *ASEAN-China Investment Agreement: Fact Sheet*. <http://www.aseansec.org/Fact%20Sheet/AEC/2009-AEC-031.pdf>

Situs Departemen Perdagangan Indonesia. *China-ASEAN FTA Rate (China's Tariff Book 2009)* http://ditjenkpi.depdag.go.id/Website_tr/Preferential%20Tariff/ASEAN-CHINA/China_s%20tariff%20book%20in%202009.pdf

The Website of Ministry of Commerce People's Republic of China (Des. 2010). *Foreign Trade Law of the People's Republic of China (2004)*. <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>

The website of Ministry of Commerce People's Republic of China (Des. 2010). *Regulations of People's Republic of China on Import and Export Duties Foreign Trade Law*. <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715851.html>

Artikel dan surat kabar online

Antara News (5 April 2010). *RI, China set up working group to overcome ACFTA's impact*. <http://antara.co.id/en/news/1270479482/ri-china-set-up-working-group-to-overcome-acftas-impact>

Antara News (24 Okt. 2010). *Sinarmas Investasi Rp 10 Trilyun di China*. <http://www.antaraneews.com/berita/1287888564/sinarmas-investasi-rp-10-triliun-di-china>

ASEAN Official Website (Jan. 2010). *ASEAN-China Free Trade Area: Not a Zero-Sum Game*. <http://www.aseansec.org/24161.htm>

ASEAN Official Website (Des. 2010). <http://www.aseansec.org/23752.htm>

ASEAN Official Website (2011). *ASEAN-China Free Trade: Joint Press Statements 2007*. <http://www.aseansec.org/19105.htm>

ASEAN Official Website (2011). *ASEAN Investment Area: An Update*. <http://www.aseansec.org/7664.htm>

Atimes. *Beijing Keen to Unlock ASEAN Investment Doors*. http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HK02Cb01.html

CAEXPO Website (23 Okt. 2010). *Investment Cooperation to be New Engine for China and ASEAN*. http://eng.caexpo.org/special/7thExpoReview/EventsNews/t20101023_92492.html

CIA World Factbook Website (2010). <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html> diakses 3/12/10

China Daily (2011). *China's direct investment to ASEAN countries reaches \$2,57b*. http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-03/02/content_12104984.htm

Commercial Diplomacy Website (2010). *What is Commercial Diplomacy?* http://www.commercialdiplomacy.org/site_userguide/faq2.htm#What is Commercial Diplomacy

Fernandez, Simeon L. (2010). *ASEAN-China Economic Co-operation Forum*. http://www.philembassychina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Aremarks-by-commercial-counsellor-hernandez-in-the-china-zhengzhou-asean-econ-cooperation-forum&catid=25%3Aeconomic-news&lang=en

Kompas Cetak Online (11 April 2011) *Produk China di setiap lini*. <http://cetak.kompas.com/read/2011/04/11/03194964/produk.china.di.setiap.lini>

Situs Huawei Indonesia (Februari 2011). http://www.huawei.com/corporate_information/partnerships.do

Situs Chery Indomobil (Feb. 2011). <http://www.chery-indomobil.com/news-3.htm>

Situs Departemen Perdagangan Indonesia (2010). *Statistik Perkembangan Ekspor non-Migas Menurut Negara Tujuan*. [http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_ekspor_nonmigas_\(negara_tujuan\)/](http://www.kemendag.go.id/statistik_perkembangan_ekspor_nonmigas_(negara_tujuan)/)

The Financial Express. *China to help push forward Doha round talks (2007)*. http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=1741

The Website of Ministry of Commerce People's Republic of China (2005). *Actual Foreign Direct Investment (FDI) by Country of Origin, 1990-2004*. http://www.china-profile.com/data/fig_fdi_3.htm

The Website of Ministry of Commerce People's Republic of China (Maret 2009). *Economic and Commercial Counsellor's Office, Embassy of P.R.China, Bilateral Economic and Trade Cooperation*. <http://id2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/inbrief/200809/20080905771803.html>

The Official Website of International Labor Organization (ILO) (2011). <http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/minimumwages?pageClass=org.ilo.legislation.work.web.ReferencePage&LinkId=18357>

WTO Website (2011). *WTO Successfully Concludes Negotiations on China's Entry (2001)*. http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm

Xinhuanet (21 Okt 2009). *China attracts \$52 bln investment from ASEAN*. http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/21/content_12290261.htm

WAWANCARA

SK Budiardjo, mantan *Consultant Management* Mandala Airlines, dan pemilik PT. Orlen Prima Sejahtera, Jakarta, Indonesia, 12 Mei 2011.

Foreign Trade Law of The People's Republic of China(2004)

Thursday, July 01, 2004 Posted: 21:20 BJT(20 GMT) MOFCOM

Chapter 1 General Provisions

Article 1 This Law is formulated with a view to expanding the opening to the outside world, developing foreign trade, maintaining foreign trade order, protecting the legitimate rights and interests of foreign trade dealers and promoting the sound development of the socialist market economy.

Article 2 This Law applies to foreign trade and the protection of trade-related aspects of intellectual property rights. For the purposes of this Law, "foreign trade" refers to import and export of goods and technologies and the international trade in services.

Article 3 The authority responsible for foreign trade under the State Council is in charge of the administration of the foreign trade of the entire country pursuant to this Law.

Article 4 The State shall pursue a uniform foreign trade regime, encourage the development of foreign trade and maintain fair and free foreign trade order.

Article 5 The people's Republic of China shall, on the principle of equality and mutual benefit, promote and develop trade relations with other countries and regions, enter into or participate in such regional economic trade agreements as customs union agreement, free trade agreement and participate in regional economic organizations.

Article 6 The People's Republic of China shall, in accordance with the international treaties and agreements to which it is a contracting party or a participating party grant the other contracting parties or participating parties, or on the principle of reciprocity grant the other party most-favored-nation treatment or national treatment in the field of foreign trade.

Article 7 In the event that any country or region applies prohibitive, restrictive or other like measures on a discriminatory basis against the People's Republic of China in respect of trade, the People's Republic of China may, as the case may be, take counter-measures against the country or region in question.

Chapter 2 Foreign Trade Dealers

Article 8 For the purposes of this Law, "foreign trade dealers" refers to legal persons, other organizations or individuals that have fulfilled the industrial and commercial registration or other practicing procedures in accordance with laws and engage in foreign trade dealings in compliance with this Law and other

relevant laws and administrative regulations.

Article 9 Foreign trade dealers engaged in import and export of goods or technologies shall register with the authority responsible for foreign trade under the State Council or its authorized bodies unless laws, regulations and the authority responsible for foreign trade under the State Council do not so require. The specific measures for registration shall be laid down by the authority responsible for foreign trade under the State Council. Where foreign trade dealers fail to register as required, the Customs authority shall not process the procedures of declaration, examination and release for the imported and exported goods.

Article 10 The international trade in services shall be carried out in compliance with the provisions of this Law and other relevant laws and administrative regulations. The units engaged in foreign contract of construction project or foreign labor cooperation shall be equipped with corresponding eligibility or qualification. The specific measures therefore shall be laid down by the State Council.

Article 11 The State may implement state trading on certain goods. The import and export of the goods subject to state trading shall be operated only by the authorized enterprises unless the state allows the import and export of certain quantities of the goods subject to state trading to be operated by the enterprises without authorization. The lists of the goods subject to state trading and the authorized enterprises shall be determined, adjusted and made public by the authority responsible for foreign trade under the State Council in conjunction with other relevant authorities under the State Council. In the event of importation of the goods subject to state trading without authorization in violation of paragraph 1 of this Article, the Customs shall not grant release.

Article 12 Foreign trade dealers may accept the authorization of others and conduct foreign trade as an agent within its scope of business.

Article 13 Foreign trade dealers shall, in accordance with the regulations laid down by the authority responsible for foreign trade under the State Council or other relevant authorities under the State Council in accordance with law, submit the documents and materials relevant to their foreign trade dealings to relevant authorities. The authorities concerned shall keep business secrets confidential for the providers thereof.

Chapter 3 Import and Export of Goods and Technologies

Article 14 The State permit free import and export of goods and technologies unless the laws or administrative regulations provide otherwise.

Article 15 The authority responsible for foreign trade under the State Council may, in accordance with the need to supervise import and export, implement automatic import and export licensing certain goods subject to free import and export and make public the list thereof. Where the consignee or the consigner of the imported or exported goods subject to automatic licensing submits the automatic licensing application before going through the Customs declaration

procedures, the authority responsible for foreign trade under the State Council or its authorized authorities shall grant approval. In case of failure to accomplish automatic licensing procedures, the Customs shall not grant release. In the case of importing or exporting technologies subject to free import and export, the contracts thereof shall be registered with the authority responsible for foreign trade under the State Council or its authorized authorities.

Article 16 The State may restrict or prohibit the import or export of relevant goods and technologies for the following reasons that:

- (1) the import or export needs to be restricted or prohibited in order to safeguard the state security, public interests or public morals,
- (2) the import or export needs to be restricted or prohibited in order to protect the human health or security, the animals and plants life or health or the environment,
- (3) the import or export needs to be restricted or prohibited in order to implement the measures relating to the importations and exportations of gold or silver,
- (4) the export needs to be restricted or prohibited in the case of domestic shortage in supply or the effective protection of exhaustible natural resources,
- (5) the export needs to be restricted in the case of the limited market capacity of the importing country or region,
- (6) the export needs to be restricted in the case of the occurrence of serious confusion in the export operation order,
- (7) the import needs to be restricted in order to establish or accelerate the establishment of a particular domestic industry,
- (8) the restriction on the import of agricultural, animal husbandry or fishery products in any form is necessary,
- (9) the import needs to be restricted in order to maintain the State's international financial status and the balance of international payment,
- (10) the import or export needs to be restricted or prohibited as laws and administrative regulations so provide, or
- (11) the import or export needs to be restricted or prohibited as the international treaties or agreements to which the state is a contracting party or a participating party so require.

Article 17 The State may, in the case of the import or export of the goods and technologies relating to fissionable and fissionable materials or the materials form which they are derived as well as the import or export relating to arms, ammunition and implements for war, take any measures as necessary to safeguard the state security. The State may, in the time of war or for the

protection of international peace and security, take any measures as necessary in respect of import or export of goods and technologies.

Article 18 The authority responsible for foreign trade under the State Council in conjunction with other relevant authorities under the State Council shall, in accordance with the provisions of Articles 16 and 17 in this Law, establish, adjust and publish the list of goods and technologies of which the import or export is subject to restrictions or prohibitions. The authority responsible for foreign trade under the State Council independently or in conjunction with other relevant authorities under the State Council may, with the approval from the State Council, decide, on a temporary basis, to impose restrictions or prohibitions on the import or export of goods and technologies not included in the list provided in the above paragraph within the meaning of Article 16 and Article 17 in this Law.

Article 19 Goods subject to import or export restriction shall be subject to quota and/or licensing control; technologies whose import or export is restricted shall be subject to licensing control. Import or export of any goods and technologies subject to quota and/or licensing control will be affected only with the approval of the authorities responsible for foreign trade under the State Council or the joint approval of the foregoing authorities and other relevant authorities under the State Council in compliance with the provisions of the State Council. Certain imported goods may be subject to tariff rate quota control.

Article 20 Quotas and tariff rate quotas of the imported and exported goods shall be distributed on the principles of transparency, equity, impartiality and efficiency by the authority responsible for foreign trade under the State Council or the relevant authorities under the State Council within their respective responsibilities. Specific measures for the distribution shall be laid down by the State Council.

Article 21 The state shall implement the commodity assessment system in a uniform manner and in accordance with the provisions of relevant laws and administrative regulations carry out certification, inspection or quarantine in respect of imported and exported commodities.

Article 22 The state shall implement origin management in respect of the imported and exported goods. Specific measures therefore shall be laid down by the State Council.

Article 23 Where the import or export of cultural relics, wildlife animals, plants and the products thereof are prohibited or restricted by other laws or administrative regulations, the provisions of relevant laws and regulations shall be observed.

Chapter 4 International Trade in Services

Article 24 In respect of international trade in services, the People's Republic of China shall, in accordance with the commitments made in international treaties or agreements to which the People's Republic of China is a contracting party or a participating party, grant the other contracting parties or participating parties

market access and national treatment.

Article 25 The authority responsible for foreign trade under the State Council in conjunction with other relevant authorities under the State Council shall, pursuant to provisions of this Law and other laws and administrative regulations, administer the international trade in services.

Article 26 The State may impose restrictions and prohibitions on the international trade in services for the reasons that:

- (1) restrictions or prohibitions are needed to safeguard the state security, public interests or public morals,
- (2) restrictions or prohibitions are needed to protect the human health or security, the animals and plants life or health or the environment,
- (3) restrictions are needed to establish or accelerate the establishment of a particular domestic service industry,
- (4) restrictions are needed to maintain the balance of international payment of the state,
- (5) restrictions or prohibitions are needed as laws and administrative regulations so provide, or
- (6) restrictions or prohibitions are needed as the international treaties or agreements to which the state is a contracting party or a participating party so require.

Article 27 The State may, in the case of military-related international trade in services, as well as the international trade in services relating to fissionable and fissionable materials or the materials from which they are derived, take any measures as necessary to safeguard the state security. The state may, in the time of war or for the protection of international peace and security, take any measures as necessary in respect of international trade in services.

Article 28 The authority responsible for foreign trade under the State Council in conjunction with other relevant authorities under the State Council shall, in accordance with the provisions of Articles 26 and 27 in this Law and other relevant laws and administrative regulations, determine, adjust and publish the market access list of international trade in services.

Chapter 5 Protection of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Article 29 The State shall, in accordance with laws and administrative regulations relevant to intellectual property rights, protect trade-related aspects of intellectual property rights. Where the imported goods infringe intellectual property rights and impair foreign trade order, the authority responsible for foreign trade under the State Council may take such measures as prohibiting the import of the relevant goods from being produced or sold by the infringer within a certain period.

Article 30 Where the intellectual property right owner is involved in any one of such practices as preventing the licensee from challenging the validity of the intellectual property right in the licensing contract, conducting coercive package licensing or incorporating exclusive grant back conditions in the licensing contract, which impairs the fair competition order of foreign trade, the authority responsible for foreign trade under the State Council may take measures as necessary to eliminate such impairment.

Article 31 If other countries or regions do not grant the legal persons, other organizations and individual from the People's Republic of China national treatment in respect of the protection of intellectual property rights, or cannot provide adequate and effective protection of intellectual property rights for the goods, technologies or services from the People's Republic of China, the authority responsible for foreign trade under the State Council may, in accordance with the provisions of this Law and other relevant laws and administrative regulations and the international treaties or agreements to which the People's Republic of China is a contracting party or a participating party, take measures as necessary in respect of the trade with the country or region in question.

Chapter 6 Foreign Trade Order

Article 32 In foreign trade dealings, monopolistic behavior in violation of relevant provisions of anti-monopoly laws and administrative regulations is not allowed. In foreign trade dealings, any monopolistic behavior with the effect of eliminating market fair competition shall be disposed of in accordance with relevant provisions of anti-monopoly laws and administrative regulations. Where any activities in violation of laws set forth in the former paragraph occur with the effect of impairing foreign trade order, the authority responsible for foreign trade under the State Council may take measures as necessary to eliminate the impairment.

Article 33 In foreign trade activities, such unfair competition activities as selling the products at unreasonable low prices, colluding with each other in a tender, producing and releasing false advertisements and conducting commercial bribery and others like are not allowed. Any unfair competitive practice conducted in the foreign trade activities shall be disposed of in accordance with relevant laws and administrative regulations against unfair competition. Where any illegal activities as provided in the previous paragraph occur with the effect of impairing foreign trade order, the authority responsible for foreign trade under the State Council may take such measures as prohibiting the dealer from importing and exporting relevant goods and technologies to eliminate the impairment.

Article 34 The following practices are not allowed in foreign trade activities:

(1) forgery, distortion of origin marks of the imported and exported goods; forgery, distortion or trading of origin certificates of imported or exported goods, import and export licenses, certificates of import and export quota or any other certificate for import and export;

- (2) defrauding the State of the refunded tax on exports;
- (3) smuggling;
- (4) evading certification, inspection and quarantine inspection as provided by laws and administrative regulations;
- (5) other activities in violation of the provisions of laws and administrative regulations.

Article 35 In foreign trade activities, foreign trade dealers shall act in compliance with relevant provisions of foreign exchange administration of the state.

Article 36 The authority responsible for foreign trade under the State Council may give a notice to the public the activities in violation of this Law for impairing foreign trade order.

Chapter 7 Foreign Trade Investigation

Article 37 In order to maintain the foreign trade order, the authority responsible for foreign trade under the State Council may carry out investigations on the following matters in accordance with laws and administrative regulations at its disposal or in conjunction with other relevant administrations:

- (1) the impact on the domestic industry as well as the competitive strengths of import and export of goods, import and export of technologies and international trade in services;
- (2) trade barriers of relevant countries or regions;
- (3) matters needed to be investigated on in order to determine whether such foreign trade remedies as anti-dumping, countervailing or safeguard measures shall be taken;
- (4) activities that circumvent foreign trade remedies;
- (5) matters in relation to state security in foreign trade;
- (6) matters needed to be investigated on in order to enforce the provisions of Articles 7, 29(2),30,31,32(3) and 33(3).
- (7) Other matters which may have impact on foreign trade order and need to be investigated on.

Article 38 The authority responsible for foreign trade shall give a notice in case of initiating foreign trade investigations. The investigation may take the form of questionnaires in writing, hearings, on-the-spot investigations, entrusted investigations and otherwise. The authority responsible for foreign trade under the State Council shall, on the basis of the findings, submit investigation reports or make determinations and give public notices.

Article 39 Relevant units and individuals shall provide the foreign trade investigation with cooperation and assistance. The authority in charge of foreign trade and other authorities under the State Council as well as their staff members shall have the obligation to keep the state secrets and business secrets known to them confidential during foreign trade investigations.

Chapter 8 Foreign Trade Remedies

Article 40 The State may take appropriate foreign trade remedies on the basis of the findings of foreign trade investigation.

Article 41 Where a product from other countries or regions is dumped into the domestic market at a price less than its normal value and under such conditions as to cause or threaten to cause material injury to the established domestic industries, or materially retards the establishment of domestic industries, the State may take anti-dumping measures to eliminate or mitigate such injury, threat of injury or retardation.

Article 42 Where the export of a product from other countries or regions to the market of a third country causes or threatens to cause material injury to the established domestic industries, or materially retards the establishment of domestic industries, the authority responsible for foreign trade under the State Council may, on the request of the domestic industries, carry out consultations with the government of that third country and require it to take appropriate measures.

Article 43 Where an imported product has directly or indirectly accepts any specific subsidiary granted by the exporting country or region and under such conditions as to cause or threaten to cause material injury to the established domestic industries, or materially retards the establishment of related domestic industries, the State may take countervailing measures to eliminate or mitigate such injury or threat of injury or retardation.

Article 44 Where a product is being imported in substantially increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products, the State may take safeguard measures as necessary to eliminate or mitigate such injury or threat of injury and provide the industry concerned with necessary support.

Article 45 Where the increase of services provided to China by the service suppliers from other countries or regions causes or threatens to cause injury to the domestic industries that provide like or directly competitive services, the State may take remedies as necessary to eliminate or mitigate such injury or threat of injury and provide such industry with necessary support.

Article 46 Where the restriction imposed by a third country on the import of a certain product causes the increase in quantities of such product imported into the domestic market and under such conditions as to cause or threaten to cause injury to the established domestic industry, or materially retards the establishment of related domestic industries, the state may take remedies as

necessary to restrict the import of the product concerned.

Article 47 Where any country or region that enters into or participate in the economic and trade treaties or agreements with the People's Republic of China deprives the People's Republic of China of or impairs her interests under such treaties or agreements, or hinders realization of the object of such treaties or agreements, the People's Republic of China has the right to request the relevant country or region to take appropriate remedies and has the right to suspend or terminate its performance of relevant obligations in compliance with relevant treaties and agreements.

Article 48 The authority responsible for foreign trade under the State Council shall carry out bilateral or multilateral foreign trade consultations, negotiations and settle disputes in accordance with this Law and other relevant laws.

Article 49 The authority responsible for foreign trade under the State Council and the other relevant authorities under the State Council shall establish the pre-warning and emergency system for import and export of goods, import and export of technologies and international trade in services so as to cope with the unexpected and unusual situations in foreign trade for the purpose of safeguarding the economic security of the State.

Article 50 The State may take necessary anti-circumvention measures against the activities circumventing the foreign trade remedies provided under this Law.

Chapter 9 Foreign Trade Promotion

Article 51 The State formulates foreign trade expansion strategies, establishes and improves the foreign trade promotion mechanism.

Article 52 The State shall establish and improve financial institutions for foreign trade and establish funds for foreign trade development and risk as the development of foreign trade requires.

Article 53 The State may take such measures as import and export credit, export credit insurance, export tax refund and other foreign trade promotion measures for the purpose of developing foreign trade.

Article 54 The State establishes the foreign trade public information service system, providing foreign trade dealers and the public with information services.

Article 55 The State shall take measures to encourage foreign trade dealer to explore international market, and develop foreign trade by adopting various forms such as foreign investment, foreign contract of construction project and foreign labor cooperation.

Article 56 Foreign trade dealers may organize or participate in relevant associations or chambers of commerce for importers and exporters in accordance with the law. Relevant associations or chambers of commerce shall abide by relevant laws and regulations, provide in compliance with their articles of association their members with foreign trade related services in aspects of

manufacturing, marketing, information and training, play a positive role in coordination and self-discipline, submit applications for relevant foreign trade remedies, safeguard the interests of their members and the industry, report to the relevant authorities the suggestions of their members with respect to foreign trade promotion, and actively promote foreign trade.

Article 57 The organization for the promotion of international trade in China shall, in accordance with its articles of association, engage in developing foreign trade relations, sponsoring exhibitions, providing information and advisory services and carry out other foreign trade promotion activities.

Article 58 The State shall support and facilitate the foreign trade carried out by small and medium-sized enterprises with small or middle scale.

Article 59 The State shall support and promote the development of foreign trade in national autonomous areas and economically under-developed areas.

Chapter 10 Legal Liabilities

Article 60 Anyone who imports or exports the goods subject to the state trading without authorization in violation of Article 11 of this Law may be imposed on a fine of not more than RMB 50,000 Yuan by the authority responsible for foreign trade under the State Council or other authorities under the State Council; if the circumstances are serious, the aforesaid authorities may refuse to accept the application submitted by the trade dealer in violation of laws for carrying out imports or exports of the goods subject to state trading within three years from the date the administrative sanction decision takes effect or may withdraw the granted authorization of import and export of goods subject to state trading.

Article 61 Anyone who imports and exports the goods of which import and export is prohibited, or imports and exports the goods of which import and export is restricted without authorization shall be disposed of and punished by the Customs in accordance with relevant laws and administrative regulations; if the case constitutes a crime, he shall be prosecuted for criminal liabilities in accordance with the law. Anyone who imports and exports the technologies of which import and export is prohibited, or imports and exports the technologies of which import and export is restricted without authorization shall be disposed of and punished in accordance with relevant laws and regulations; Where no laws or regulations are available to apply to such activities, the authority responsible for foreign trade under the State Council shall order him to make a rectification, confiscate the illegal proceeds and impose a fine from one to five times the amount of the illegal gains. If there are no illegal proceeds or the illegal proceeds are less than RMB 10,000 Yuan, a fine from RMB 10,000 Yuan to RMB 50,000 Yuan shall be imposed; if the case constitutes a crime, he shall be prosecuted for criminal liabilities in accordance with the law. The authority responsible for foreign trade under the State Council and other relevant authorities under the State Council may, from the date when the administrative sanction decision or criminal penalty judgment takes effect as provided in paragraphs 1 and 2 of this Article, refuse the applications for import and export quotas or licenses submitted by the law-breaker, or prohibit the law-breaker from engaging in the import and export of relevant goods and technologies

within a period from one to three years.

Article 62 Anyone who engages in the international trade in services subject to prohibition or engages in international trade in services subject to restriction without authorization shall be disposed of and punished in accordance relevant laws and administrative regulations; Where no laws or regulations are available to apply to such activities, the authority responsible for foreign trade under the State Council shall order him to make a rectification, confiscate the illegal gains and impose a fine from one to five times the amount of the illegal proceeds. If there are no illegal proceeds or the illegal proceeds are less than RMB 10,000 Yuan, a fine from RMB 10,000 Yuan to RMB 50,000 Yuan shall be imposed; if the case constitutes a crime, he shall be prosecuted for criminal liabilities in accordance with the law. The authority responsible for foreign trade under the State Council may, from the date when the administrative sanction decision or criminal penalty judgment takes effect as provided in the previous paragraph of this Article, prohibit the law-breaker from engaging in relevant international trade in services within a period from one to three years.

Article 63 Anyone who acts in violation of the provision of Article 34 of this Law shall be punished in accordance with relevant laws and administrative regulations; if the case constitutes a crime, he shall be prosecuted for criminal liabilities in accordance with the law. The authority responsible for foreign trade under the State Council may, from the date when the administrative sanction decision or criminal penalty judgment takes effect as provided in the previous paragraph of this Article, prohibit the law-breaker from engaging in relevant foreign trade activities within a period from one to three years.

Article 64 Where a foreign trade dealer is prohibited from engaging in the relevant foreign trade activities in accordance with Articles 61-63, within the period of prohibition the Customs authority shall not grant release to the relevant imported or exported goods of that foreign trade dealer in accordance with the decision made by the authority responsible for foreign trade under the State Council, and the foreign exchange administration or designated foreign exchange banks shall not process the procedures of selling and purchasing foreign exchange.

Article 65 Any staff member serving in the authority responsible for foreign trade in accordance with this Law who neglects his duty, engages in malpractices for personal gains or abuses his power, shall be prosecuted for criminal liabilities if the case constitutes a crime, or shall be subject to administrative sanctions if the case does not constitute a crime in accordance with the law. Any staff member serving in the authority responsible for foreign trade in accordance with this Law, who extorts property from others with job convenience or illegally accepts others' property and seeks advantages for them in return shall be prosecuted for criminal liabilities if the case constitutes a crime, or shall be subject to administrative sanctions if the case does not constitute a crime in accordance with the law.

Article 66 The parties in the foreign trade activities may apply for an administrative reconsideration or bring an administrative lawsuit before a people's court in case of dissatisfaction with a specific administrative act by the

authority responsible for foreign trade administration in accordance with this Law.

Chapter 11 Supplementary Provisions

Article 67 Where other laws or administrative regulations provide otherwise in respect of foreign trade administration of military supplies, fissionable and fissionable materials or the materials from which they are derived and import and export administration of cultural products, the provisions thereof shall be observed.

Article 68 The State applies flexible measures, provides preferential conditions and conveniences to the trade between the towns on the frontier and those towns of neighboring countries on frontier as well as trade among border residents. Specific measures therefore shall be laid down by the State Council.

Article 69 This Law shall not apply to the separate customs territories of the People's Republic of China.

Article 70 This Law shall come into force as of July 1, 2004.

(All information published in this website is authentic in Chinese. English is provided for reference only.)

<http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html>

Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity

Pursuant to the Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity signed at the Seventh ASEAN-China Summit on 8 October 2003 in Bali, Indonesia, this Plan of Action is formulated to serve as the "master plan" to deepen and broaden ASEAN-China relations and cooperation in a comprehensive and mutually beneficial manner for the next five years (2005-2010) with the view to strengthening the strategic partnership for regional peace, development and prosperity and playing a proactive role to tap the opportunities and meet the challenges of the new millennium.

This Plan of Action will also support the implementation of the Declaration of ASEAN Concord II, signed in Bali on 7 October 2003, leading to an ASEAN Community.

In the light of the above, ASEAN and China will pursue the following joint actions and measures:

1. POLITICAL AND SECURITY COOPERATION

2. ECONOMIC COOPERATION

2.1 ASEAN-China Free Trade Area

- 2.1.1 Expedite the implementation of the ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation to liberalise and promote trade in goods and services and create a transparent, liberal and facilitative investment regime;
- 2.1.2 Fulfil obligations and commitments under the Early Harvest Programme and the ASEAN-China Trade in Goods Agreement and expedite negotiations on Trade in Services and Investment;
- 2.1.3 Enhance trade, investment and economic cooperation as well as upgrade technical cooperation;
- 2.1.4 Establish channels of communication with all the stake holders, such as government officials, chamber of commerce and industry, research institutions, think-tanks, etc., for the successful implementation of the Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation; and
- 2.1.5 Strengthen the economic and technical cooperation in the areas of agriculture, information and communication technology, human resource development, investment, Mekong River basin development, Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), and other areas of mutual interest so as to reach the goal of common development and prosperity of China and ASEAN.

2.2 Investment Cooperation

- 2.2.1 Promote mutual investments by increasing exchanges and mutual understanding among investment authorities, including the private sectors in ASEAN Member Countries and China;
- 2.2.2 Promote networking and cooperation among governments, business associations, academic institutions and corporations, among others, through promotion fairs on investment policies in China and ASEAN Member Countries and by holding regular ASEAN-China Exposition in Nanning, China, and if or when appropriate in ASEAN;
- 2.2.3 Promote mutual understanding and cooperation among enterprises in ASEAN Member Countries and China, among others, through the chambers of commerce,

- the ASEAN-China Business and Investment Summit and the ASEAN-China Business Council;
- 2.2.4 Encourage enterprises in China to make ASEAN a priority investment destination and vice versa, and create a more conducive and attractive climate for the flow of such investments; and
- 2.2.5 Strengthen the law enforcement and regulations so as to provide favourable conditions for investments.

2.3 Financial Cooperation

- 2.3.1 Strengthen economic review and policy dialogue through the ASEAN Plus Three framework, including the development of early warning system and monitoring of short-term capital flows;
- 2.3.2 Promote closer financial cooperation and greater financial stability in ASEAN Plus Three countries;
- 2.3.3 Promote dialogues on macro-economic and financial policies in appropriate fora;
- 2.3.4 Enhance the effectiveness of the Chiang Mai Initiative;
- 2.3.5 Develop and deepen regional bond markets;
- 2.3.6 Promote regional financial and monetary integration;
- 2.3.7 Strengthen human resource development and capacity building in banking and financial sectors, particularly under the ASEAN Plus Three cooperation; and
- 2.3.8 Enhance cooperation and technical assistance to develop ASEAN-China capital markets.

2.4 Agricultural Cooperation

- 2.4.1 Continue implementing the MoU between the ASEAN Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China signed on 2 November 2002 in Phnom Penh;
- 2.4.2 Enhance cooperation on human resources development through training courses, including on agricultural techniques and management;
- 2.4.3 Establish technology demonstration farms, including the establishment of technology demonstration zones;
- 2.4.4 Undertake hi-tech exchanges and promote cooperation in various key areas of mutual interest such as hybrid rice and corn, horticultural plants cultivation, bio-technology application, fertiliser, water management, post harvest technology, food security, aquaculture, livestock breeding, organic farming and marsh gas application in the rural areas;
- 2.4.5 Support economic and trade cooperation through training, seminars, exhibitions, shows and project demonstrations to promote the trade of farm tools, processing machinery and techniques and equipment, agricultural production materials, grains and improved species;
- 2.4.6 Enhance technical exchanges and cooperation among agricultural experts and agriculture-related enterprises for study, observation, and training in agriculture, fisheries and agriculture-related fields;
- 2.4.7 Improve agricultural productivity and diversification;
- 2.4.8 Promote Greater Mekong Sub-region (GMS) agricultural exchanges and development among GMS member countries, in cooperation with the Asian Development Bank (ADB);
- 2.4.9 Enhance trade and marketability of food, agriculture and forestry products/ commodities between ASEAN and China;
- 2.4.10 Enhance cooperation to adopt joint approaches, where appropriate, in international and regional issues pertaining to agriculture;
- 2.4.11 Promote sustainable management of forest resources through enhancing dialogue and cooperation;

- 2.4.12 Harmonise related protocols on food safety and organise a network of food laboratories in ASEAN and China; and
- 2.4.13 Build the capacity of farmers and farming community in ICT in ASEAN and China.

2.5 ICT Cooperation

- 2.5.1 Expedite the implementation of the MoU between ASEAN and China on Cooperation in Information and Communications Technology signed in October 2003 in Bali, Indonesia;
- 2.5.2 Promote the establishment and development of ASEAN-China broadband high-speed optical fibre network and information flow and the application of new technology in the region;
- 2.5.3 Promote HRD cooperation through various training courses, seminars, workshops as well as exchange of visits among ICT experts;
- 2.5.4 Establish the ASEAN-China ICT cooperation website;
- 2.5.5 Explore the possibility of convening ASEAN-China ICT Ministers' Meeting to foster ICT policy dialogues and cooperation;
- 2.5.6 Convene "ASEAN-China ICT Week" on a regular basis to promote ICT cooperation;
- 2.5.7 Formulate cooperative and emergency response procedures for purposes of maintaining and enhancing cybersecurity, and preventing and combating cybercrime; and
- 2.5.8 Strengthen cooperation in research and development and transfer of technology.

2.6 Transport Cooperation

- 2.6.1 Conclude MoU between ASEAN-China on Transport Cooperation and implement the measures and activities contained in the MoU;
- 2.6.2 Formalise a consultation mechanism for maritime transport cooperation under the ASEAN-China Transport Ministers' Meeting in close coordination with other related ASEAN fora and carry out mutually beneficial projects in such areas as maritime safety and security, search and rescue at sea, marine environmental protection against pollution from ships, ship ballast water management, port state control and international shipping;
- 2.6.3 Work towards developing and signing a ASEAN-China regional maritime transport cooperation framework agreement;
- 2.6.4 Support the development of the Asian Highway Network by taking measures such as establishing routes databases, harmonising technical standards of infrastructure and facilities and facilitating international land transport;
- 2.6.5 Complete Kunming-Bangkok highway by the end of 2007; and
- 2.6.6 Strengthen capacity building in port management, navigation channel technology, transportation infrastructure design and construction and other areas of common interest in the transport sector.

2.7 Tourism Cooperation

- 2.7.1 Explore the possibility of establishing a high-level cooperation mechanism between relevant tourism authorities;
- 2.7.2 Promote better understanding of each other's tourism industry, policies, laws and regulations, among others, through workshops, exhibitions, and shows;
- 2.7.3 Promote and strengthen tourism information exchange and cooperation on regulating tourism markets among national tourism organisations covering areas such as tourism products, policies, laws and regulations;
- 2.7.4 Encourage flows of tourists and attract more foreign visitors through joint promotion campaigns;

- 2.7.5 Promote networking and training programmes among ASEAN and China tourism schools and colleges;
- 2.7.6 Jointly formulate tourism development plans incorporating joint promotion, marketing, investment and human resource development;
- 2.7.7 Support the organisation and implementation of ASEAN tourism investment road shows and seminars;
- 2.7.8 Encourage each other participation in International Tourism Fair in China and the annual ASEAN Tourism Forum;
- 2.7.9 Enhance cooperation on rectifying tourism business operators and standardising outbound travels and border tours; and
- 2.7.10 Encourage participation in the capacity-building activities provided by the World Tourism Organisation (WTO).

2.8 Energy Cooperation

- 2.8.1 Explore the possibility of establishing a high-level cooperation mechanism between relevant energy authorities;
- 2.8.2 Strengthen policy exchanges and communication with a view to promoting greater openness, transparency, and cooperation in energy security and sustainable energy development activities;
- 2.8.3 Enhance cooperation in the development and production of renewable energy, energy efficiency and conservation, clean coal technology and energy policy and planning, as well as in the establishment of institutional linkages for developing other programs of cooperation;
- 2.8.4 Strengthen energy cooperation and encourage greater private-sector participation and investment in joint energy resource exploration and development;
- 2.8.5 Cooperate in the promotion of energy conservation and the development of clean and efficient energy resources in efforts to diversify sources of primary energy supply while preserving a balance between energy production, consumption and environmental protection;
- 2.8.6 Establish a sound and commercially viable regional energy transportation network through mutually beneficial activities and investments including the exploration and production of oil and natural gas, development of gas pipeline and transport infrastructure, and other supply facilities; and
- 2.8.7 Encourage exchange of information on energy pricing and market stabilising initiatives to better manage the risks of international oil market volatility, on voluntary basis.

2.9 Mekong River Basin Development Cooperation

- 2.9.1 Strengthen cooperation under the framework of the Greater Mekong Sub-region (GMS) and ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC); and
- 2.9.2 Develop the Singapore-Kunming Rail Link.

2.9.1.1 Transportation

- 2.9.1.1.1 Build railways and roads from Kunming to Yangon and Myitkyina;
- 2.9.1.1.2 Improve the roads from China's Yunnan province to Viet Nam and the railway links between China and Viet Nam;
- 2.9.1.1.3 Carry out possibility study of building railway links from China to Laos and Myanmar;
- 2.9.1.1.4 Consider implementing measures to improve navigational safety on the Lancang-Mekong River in a sustainable manner through consultations among the riparian countries, while undertaking to preserve the environment and unique way of life of the people who live along the river;

- 2.9.1.1.5 Consider the further expansion of the Environmental Impact Assessment of the navigation channel improvement project on the upper Mekong River, and share information with the lower Basin countries;
- 2.9.1.1.6 Consider the possibility to open more aviation routes in the sub-region at an appropriate time; and
- 2.9.1.1.7 Carry out preliminary study on the missing rail link between Phnom Penh and Loc Ninh, the missing section in Cambodia which is part of the Singapore-Kunming Rail Link.

2.9.1.2 ICT

- 2.9.1.2.1 Promote international cooperation in terms of investment and human resources development on ICT; and
- 2.9.1.2.2 Explore the possibility of establishing a GMS information highway.

2.9.1.3 Trade

- 2.9.1.3.1 Launch the experimental project of one stop inspection under the Agreement for Facilitation of Cross Border Movement of Goods and People between and among GMS Countries whose modalities are subject to consultation and consensus among countries concerned so as to facilitate trade; and
- 2.9.1.3.2 Explore the possibility study of setting up commodity markets in major border cities and other distribution centres in ASEAN and China.

2.9.1.4 Tourism

- 2.9.1.4.1 Explore the possibility of establishing a regional tourism corridor with a view to making tourism a key industry in the region.

2.9.1.5 Electrification

- 2.9.1.5.1 Implement the GMS Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade (IGA) and speed up the formulation of Sub-region Power Trade Operating Agreement (PTOA);
- 2.9.1.5.2 Promote GMS transnational electric power networking conducive to environmental and social well-being; and
- 2.9.1.5.3 Enhance cooperation on rural electrification.

2.9.1.6 Environmental Protection

- 2.9.1.6.1 Enhance cooperation on the protection of bio-diversity in the sub-region and explore the possibility of establishing a bio-diversity corridor;
- 2.9.1.6.2 Promote forestation in Lancang-Mekong River basin and Honghe River basin to bring soil erosion under control;
- 2.9.1.6.3 Work towards managing and monitoring water quality of Mekong river;
- 2.9.1.6.4 Establish nature reserves to protect rare species, among others, through the mechanism of the relevant environmental instruments, such as the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and the ASEAN Declaration on Heritage Parks;
- 2.9.1.6.5 Continue to protect the environment and promote sustainable use including the equitable access and benefit sharing of the sub-region's shared natural resources and their biodiversity;
- 2.9.1.6.6 Promote exchange of information and strengthen cooperation concerning the use of water in the Lancang-Mekong River, with a view to achieve sustainable development of all riparian countries; and
- 2.9.1.6.7 Promote cooperative activities to address global warming.

2.9.1.7 Public Health

- 2.9.1.7.1 Establish an integrated prevention and control system for communicable and non-communicable diseases;
- 2.9.1.7.2 Promote Alternative Development (AD) to check drug production and distribution; and
- 2.9.1.7.3 Strengthen cooperation to prevent production and spread of counterfeit drugs.

2.9.2 Other Sub-regional Initiatives

- 2.9.2.1 Support other sub-regional development initiatives and welcome Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) as further means to narrow the development gap.

2.10 Initiative for ASEAN Integration

- 2.10.1 China will intensify support for the ASEAN's integration efforts by implementing Initiative for ASEAN Integration (IAI) projects and providing technical assistance for projects developed to implement the Vientiane Action Programme (VAP) and other related ASEAN action programmes, including human resource development and capacity building for the least developing countries (LDC) of ASEAN and pockets of underdevelopment in the ASEAN-6 countries; and
- 2.10.2 China will support ASEAN's efforts to narrowing the development gaps within ASEAN and between ASEAN and China by enhancing regional and sub-regional development.

2.11 Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

- 2.11.1 Explore the possibility of establishing a regular dialogue between BIMP-EAGA Secretariat and China;
- 2.11.2 Strengthen cooperation in the priority sectors identified for BIMP-EAGA development, namely SMEs, agriculture, transport, infrastructure and ICT, natural resources, and tourism;
- 2.11.3 Cooperate in resource development through direct investment, project-contracting and technology-sharing;
- 2.11.4 Increase dialogue between the East Asian Business Council (EABC) and relevant associations in China (i.e., China Council for the Promotion of International Trade, its quasi-government business chamber), apart from government-to-government dialogue, to strengthen coordination and synergise links among the private sectors of China and EAGA;
- 2.11.5 Promote and support the efforts of the BIMP-EAGA and the East Asian Business Council to expand mutual trade and investments between BIMP-EAGA and China; and
- 2.11.6 Provide opportunities for possible technical and capital assistance for BIMP-EAGA programs and projects.

2.12 SMEs Cooperation

- 2.12.1 Explore the possibility of establishing a SMEs Joint Committee to discuss issues and promote cooperation related to SMEs;
- 2.12.2 Jointly identify possible areas of cooperation, including promotion of business collaboration, investment and finance, and marketing development, capacity building for SMEs, business matching, and exchange of information on SMEs policies and best

- practices through seminars, workshops, networking, research and development for SMEs, and promotion of industrial clustering between SMEs of both sides; and
- 2.12.3 Promote programmes for enhancing ASEAN Small and Medium Enterprise and Industries' capacity, technology, financing, business opportunities and market access.

2.13 Industrial Cooperation

- 2.13.1 Strengthen cooperation in HRD and exchange of experience in the formulation of plans and models of local industries.

